



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**TRANSFORMASI KONFLIK SOSIAL ANTAR ETNIS BALI DAN
LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI BALINURAGA
KECAMATAN WAY PANJI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

TESIS

Oleh :

**Akbar Kurniadi
NPM 120170303002**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK
BOGOR
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Akbar Kurniadi
NIM : 120170303002
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul Tesis : Transformasi Konflik Sosial Antar Etnis Bali dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan

Telah berhasil diseminarkan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Tri Legionosuko, S.IP, M.A.P (.....)

Pembimbing II : Drs. Wibisono Poespito Hadi, M.Sc, M.Si (Han) (.....)

Penguji I : Dr. Ichsan Malik, M.Sc (.....)

Penguji II : Dr. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A (.....)

Penguji III : Dr. Achmed Sukendro, S.H, M.H (.....)

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : Januari 2019

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya maupun bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi. Serta, sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, sub bab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, Januari 2019

Akbar Kurniadi

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Pertahanan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar kurniadi
NPM : 120170303002
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas : Keamanan Nasional
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Transformasi Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan diberikannya Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya intelektual dari Tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Januari 2019

Akbar Kurniadi

KATA PENGANTAR

Puji sukur *alhamdulillah* peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, *'inayah*, dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Transformasi Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan”**. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Pertahanan (M.Han) pada Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP, M.A.P, selaku Rektor Universitas Pertahanan sekaligus pembimbing I (satu) yang telah memberikan banyak ilmu, masukan dan juga kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan potensi diri dan keilmuan di universitas tercinta ini.
2. Laksamana Muda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, S.T., M.MT, selaku Dekan Fakultas Keamanan Nasional yang banyak memberikan kelancaran serta dorongan motivasi bagi peneliti dan seluruh rekan seperjuangan dalam proses penyelesaian tesis.
3. Laksamana Pertama TNI Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Keamanan Nasional yang telah memberikan dukungan dan arahan.
4. Brigjen TNI Drs. Wibisono Poespito Hadi, M.Sc, M.Si (Han) selaku pembimbing II yang banyak memberikan arahan,

motivasi dan semangat juang pantang mundur dalam proses penyelesaian tesis ini.

5. Bapak Kolonel Inf. Dr. Bambang Wahyudi, M.M., M.Si selaku Sesprodi Damai dan Resolusi Konflik sekaligus sosok seorang ayah yang banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan bagi peneliti juga rekan-rekan DRK Co.6, serta selalu memberikan dorongan kuat untuk dapat segera menyelesaikan tugas akhir penulisan tesis dengan sebaik mungkin.
6. Civitas Akademika Universitas Pertahanan, Staf Prodi Damai dan Resolusi Konflik beserta TU Fakultas Keamanan Nasional yang banyak membantu dalam proses pemberkasan surat dan administrasi sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar.
7. Bapak Dr. Hartoyo, Bapak Dr. KH. Ahmad Rafiq Udin, S.Ag., M.A., Ibu Dr. Nina Yuda, Bapak Erdiansyah, S.IP., Bapak Fajar Isnawan, Bapak Fadhli, Bapak Isro Abdi, Bapak Letkol Inf. Ediyanto, Bapak Made Santre, Bapak Mayor Inf. Agus Waluyo, Bapak Trimujiyanto, S.IP., Bapak Brigpol Denni, selaku narasumber yang telah berpartisipasi dalam proses pengumpulan data dan informasi.
8. Ibunda tercinta, Sri Sugiani dan Ayahanda terkasih, Sukur Edy, serta Adinda tersayang, Diah Tri kurnia dan Kakanda, Imam Kurniawan beserta istrinya tercinta, juga ponakan kecilku Uwais Imam al-Fatih yang telah banyak menganugerahkan cinta, kasih sayang, kebahagiaan dan doa dalam hidup peneliti. Semua proses perjuangan dalam penyelesaian hasil karya tesis ini tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan, doa, dan *ridla* keduanya, ayah dan ibu. *I do love you*, mamah dan papah.
9. Seluruh mahasiswa Universitas Pertahanan Co. 9 T.A. 2017/2018, terutama rekan seperjuangan DRK Co. 6 yang telah mengukir bersama hari-hari indah selama perjuangan, tempat

berbagi cerita dan rindu, *you all guys have become a special part in the niche of my soul.*

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam bentuk penyusunan maupun substansi penelitian. Kritik konstruktif dari pembaca sangat peneliti harapkan untuk penyempurnaan segala kekurangan yang ada. Akhir kata, semoga tesis ini dapat membawa manfaat, diterima dengan baik oleh kalangan luas dan berguna bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam studi kajian damai dan resolusi konflik.

Bogor, Januari 2019

Akbar Kurniadi

ABSTRAK

Nama : Akbar Kurniadi
NIM : 120170303002
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul Tesis : Transformasi Konflik Sosial Antar Etnis Bali dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan

Tesis ini membahas tentang upaya transformasi pasca konflik sosial antar etnis Bali dan suku asli Lampung di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai faktor penyebab konflik laten di Balinuraga menjadi konflik terbuka, serta bagaimana upaya transformasi pasca konflik dilakukan untuk mengubah kondisi yang konfliktual menjadi harmonis, destruktif menjadi konstruktif, sehingga terwujud perdamaian yang berkelanjutan di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), konflik Balinuraga masuk kedalam lima (5) wilayah dengan tingkat diskriminasi terburuk pasca reformasi. Selain itu, belum ada penelitian yang mengkaji tentang bagaimana upaya transformasi konflik di Balinuraga, sehingga peneliti merasa perlu untuk mengangkat tema transformasi konflik Balinuraga sebagai judul dan pokok pembahasan dalam tesis ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses analisis kasus, peneliti menggunakan beberapa teori dan konsep, seperti Teori Konflik, Teori Transformasi Konflik, Teori Kerja Sama, Teori Identitas Sosial, Konsep Segitiga ABC Konflik Galtung, Konsep SAT, dan Konsep Perdamaian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Balinuraga dipicu oleh kenakalan remaja, diperluas dengan isu etnisitas dan arogansi antar kelompok sebagai akselerator, dan dilatarbelakangi kebijakan transmigrasi serta isu kesenjangan ekonomi sebagai faktor struktural. Upaya transformasi konflik dilakukan dalam empat dimensi, yaitu personal dengan mengubah sikap dan perilaku, relasional dengan menjalin kembali hubungan kerja sama, kultural dengan penguatan budaya dan adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik, dan struktural melalui penguatan institusi pemerintah daerah Provinsi Lampung dan TNI/Polri, demi mewujudkan perdamaian dan keamanan nasional.

Kata Kunci: Konflik, Transformasi Konflik, Suku Bangsa, Budaya, dan Perdamaian.

ABSTRACT

Name : Akbar Kurniadi
NIM : 120170303002
Study Program : Peace and Conflict Resolution
Title of Thesis : Transformation of Balinese and Lampung Inter-Ethnic Social Conflict in Realizing Peace in Balinuraga, Way Panji District, South Lampung Regency

This thesis works through an issue related to the transformation efforts post social conflict between Balinese and indigenous Lampung tribes in Balinuraga, Way Panji District, South Lampung Regency. The aim of this study is to analyze the various factors that cause latent conflict in Balinuraga to be a manifest conflict, and how post-conflict transformation efforts are carried out to change conflictual conditions to be harmonious, destructive to constructive, so that sustainable peace can be realized in Balinuraga, Way Panji District, South Lampung Regency . Based on the survey results from the Indonesian Survey Circle (LSI), the Balinuraga conflict falls into five (5) regions with the worst levels of discrimination after reformation era. In addition, there has been no research that examines how conflict transformation efforts in Balinuraga, so researcher feels the need to raise the theme of Balinuraga conflict transformation as the title and subject matter of this thesis. This research was conducted using qualitative methods by collecting data through interviews, observation and documentation. Whereas in the case analysis process, researchers used several theories and concepts, such as Conflict Theory, Conflict Transformation Theory, Cooperation Theory, Social Identity Theory, ABC Triangle Conflict Concept, SAT Concept, and Peace Concept. The results of the study show that the Balinuraga conflict was triggered by juvenile delinquency, extended by issues of ethnicity and arrogance between groups as accelerators, and was motivated by transmigration policies and the issue of economic inequality as structural factors. Conflict transformation efforts are carried out in four dimensions, namely personal by changing attitudes and behaviors, relational by re-establishing cooperative, cultural relations with cultural and customary reinforcement as a mechanism for conflict resolution, and structural through strengthening the institutions of local government in Lampung Province and TNI / Polri, for realize national peace and security.

Keywords: Conflict, Transformation of Conflict, Tribe, Culture, and Peace.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian	11
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
1.5.1 Manfaat Teoretis	12
1.5.2 Manfaat Praktis	12
BAB II KAJIAN TEORITIK	
2.1 Deskripsi Konseptual	13
2.1.1 Teori Konflik	13
2.1.1.1 Segitiga ABC Konflik Galtung.....	17
2.1.1.2 Perdamaian.....	20
2.1.2 Teori Transformasi Konflik	23
2.1.3 Teori Identitas Sosial.....	29
2.1.4 Teori Kerja Sama	32
2.1.5 Konsep SAT	34

2.2	Penelitian Terdahulu	36
2.3	Kerangka Pemikiran	43

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.1.1	Tempat Penelitian	44
3.1.2	Waktu Penelitian	45
3.2	Subjek dan Objek Penelitian	45
3.2.1	Subjek Penelitian	46
3.2.2	Objek Penelitian	50
3.3	Teknik Pengumpulan Data	50
3.4	Pemeriksaan Keabsahan Data	53
3.5	Teknik Analisis Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.1	Kondisi Geografis dan Iklim Provinsi Lampung...	57
4.1.2	Pemerintahan	59
4.1.3	Kependudukan	60
4.1.4	Agama	60
4.1.5	Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan	61
4.1.6	Kondisi Geografis dan Pemerintahan	61
4.1.7	Demografi	63
4.1.8	Adat Istiadat	65
4.2	Hasil Penelitian	67
4.2.1	Faktor-faktor Penyebab Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga Menjadi Konflik Terbuka	67
4.2.1.1	Kronologi Terjadinya Konflik	68
4.2.1.2	Faktor-faktor Konflik	73
4.2.2	Upaya Transformasi Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga	91

4.2.2.1	Upaya Penanganan Konflik yang Pernah Dilakukan	91
4.2.2.2	Upaya Transformasi Konflik	95
4.3	Pembahasan.....	100
4.3.1	Faktor-faktor Penyebab Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga Menjadi Konflik Terbuka	100
4.3.2	Upaya Transformasi Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga	115
4.3.3	Evaluasi.....	133
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI		
5.1	Simpulan.....	136
5.2	Rekomendasi.....	139
DAFTAR PUSTAKA.....		142
LAMPIRAN:		
LAMPIRAN 1: SURAT KETERANGAN PENELITIAN		
LAMPIRAN 2: PEDOMAN WAWANCARA		
LAMPIRAN 3: INFORMAN PENELITIAN		
LAMPIRAN 4: DOKUMEN TERKAIT PENELITIAN		
RIWAYAT HIDUP PENELITI		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Insiden dan Dampak Kekerasan Antarkelompok di 13 Provinsi Priode 2005-2013.....	7
Gambar 2.1 Model Segitiga ABC Konflik Galtung.....	18
Gambar 2.2 Definisi Damai.....	22
Gambar 2.3 Pola Transformasi Konflik.....	28
Gambar 2.4 Skema Kerangka Pemikiran.....	43
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	55
Gambar 4.1 Peta Provinsi Lampung.....	57
Gambar 4.2 Peta Kabupaten Lampung Selatan.....	62
Gambar 4.3 Analisis Eskalasi Konflik Balinuraga Dengan ABC Triangle J. Galtung.....	113
Gambar 4.4 Konflik Balinuraga Tahun 2012.....	114
Gambar 4.5 Dampak Kerugian Akibat Konflik Balinuraga.....	114
Gambar 4.6 Transformasi Konflik sosial Antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan.....	115
Gambar 4.7 Acara Ngaben Massal Desa Balinuraga.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lima Kasus Diskriminasi Besar di Indonesia	6
Tabel 2.1 Teori Konflik	16
Tabel 2.2 Konsep Segitiga ABC Konflik Galtung	18
Tabel 2.3 Konsep Perdamaian.....	23
Tabel 2.4 Teori Transformasi Konflik	27
Tabel 2.5 Teori Identitas Sosial.....	32
Tabel 2.6 Teori Kerja Sama	34
Tabel 2.7 Konsep SAT	36
Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	45
Tabel 4.1 Statistik Geografi Provinsi Lampung, 2017	58
Tabel 4.2 Statistik Iklim Provinsi Lampung, 2017.....	59
Tabel 4.3 Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut di Provinsi Lampung.....	61
Tabel 4.4 Kronologi Terjadinya Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.....	69
Tabel 4.5 <i>Timeline</i> Dinamika Konflik di Lampung Selatan 1982-2012	77
Tabel 4.6 Banyaknya SD, SMP dan SMA Menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan, 2017	82
Tabel 4.7 Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan, 2017.....	83
Tabel 4.8 Jumlah Transmigran Masuk Lampung Periode Kolonisasi .	86
Tabel 4.9 Jumlah Transmigran Masuk/Keluar Lampung Pelita IV	88
Tabel 4.10 Rekapitulasi Transmigran Masuk dan Keluar Provinsi Lampung.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Lampung sering disebut sebagai “Jawa Utara” karena letaknya yang berada di ujung selatan Pulau Jawa, dan secara geografis hanya dipisahkan oleh sebuah selat, yaitu Selat Sunda. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Lampung merupakan wilayah Karesidenan Provinsi Sumatera Selatan yang ibu kotanya adalah Palembang. Berdasarkan aspek legalitas hukum (*de Jure*) Provinsi Lampung¹ didirikan pada 18 Maret 1964 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 3 Tahun 1964 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1964.²

Secara administratif, sebelah Utara Provinsi Lampung berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Banten, dan sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Hindia.³ Menurut Badan Pusat Statistik (2014), jumlah penduduk Lampung pada 2014 adalah 8.026.191 jiwa.⁴ Dari hasil sensus tersebut, suku Jawa merupakan entitas terbesar dengan persentase sebesar 61,02%, sedangkan suku Lampung hanya berkisar 11,9%, jumlah ini masih lebih kecil dari etnis Sunda 13,29%, dan sisanya adalah suku minoritas seperti Banten 3,68%, Palembang 2,89%, Bali 1,62%, serta

¹ Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 51.991,8 km², dengan luas daratan 35.376,5 km² dan luas perairan pesisir sekitar 16.625,3 km². Panjang garis pantainya kurang lebih 1.105 km yang terdiri dari 69 pulau-pulau kecil dengan pulau terbesarnya adalah Pulau Tabuan. Selain itu, terdapat dua teluk besar di Lampung, yaitu Teluk Lampung dan Teluk Semangka. Dalam Merajut Jurnalisme Damai di Lampung, *Aji Bandar Lampung* (2012): 10-11.

² Budiman, Budisantoso & Saroso, Oyos HN. Catatan Pembuka: Merajut Jurnalisme Damai di Lampung. Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung, 2012, hlm. 10.

³ *Ibid.*

⁴ Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten atau Kota, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin 2014; dari <https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2017/04/11/391/jumlah-penduduk-provinsi-lampung-menurut-kabupaten-kota-jenis-kelamin-dan-rasio-jenis-kelamin-2014.html>; diakses pada 4 Agustus 2018.

etnis lainnya 3,48%.⁵ Fakta ini menunjukkan bahwa Lampung merupakan salah satu daerah dengan keragaman suku dan budaya yang tinggi.

Heterogenitas budaya, suku dan agama di Provinsi Lampung tersebut merupakan produk dari kebijakan transmigrasi yang dimulai dari masa kolonialisasi (1905-1942),⁶ pra-Pelita (1950-1969), Pelita I-IV/Masa Orde Baru (1969/1970-1998/1999), dan pasca Orde Baru (1999/2000-2009).⁷ Lebih dari satu abad arus transmigrasi telah dilakukan oleh pemerintah saat itu, transmigran dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Bali datang dan bertempat tinggal di daerah Lampung.⁸ Selain transmigran dari beberapa daerah di atas, terdapat beberapa transmigran dari daerah Banten dan pulau Sumatera yang juga ikut bertransmigrasi ke daerah Lampung.

Di kabupaten Lampung Selatan,⁹ beragam suku yang mendiami daerah tersebut hidup damai berdampingan dengan dua suku besar, yaitu suku Saibatin dan Pepadun. Berdasarkan data yang ada, transmigran dari Bali menjalani kehidupannya di desa Balinuraga (Lampung Selatan) dan

⁵ Sudrajat, Djadjat. Catatan Penutup: Lampung, Merajut Jurnalisme Damai di Lampung. Bandar Lampung: Aji Bandar Lampung, 2012, hlm. 185.

⁶ Transmigrasi pada periode ini dilatarbelakangi oleh gagasan "Politik Balas Budi" Van Deventer, ditulis dalam bukunya, "Een Eere Schuld", yang bertujuan untuk mengurai rantai kemiskinan di Pulau Jawa akibat kerja paksa dan *culture stelsel*. Transmigrasi pada masa Kolonialisasi tersebut, ditandai dengan perpindahan penduduk ke dari Pulau Jawa ke beberapa wilayah di antaranya Lampung (1905-1942). "Pada gelombang pertama sebanyak 155 keluarga dari Bagelen, Karesidenan Kedu, Jawa Tengah ditempatkan ke daerah Gedong Tataan Lampung yang saat ini merupakan ibukota Kabupaten Pesawaran. Program kolonisasi yang dijalankan oleh pemerintah Kolonial Belanda ke Lampung tercatat sebanyak 44.687 KK dengan 175.867 jiwa yang berasal dari Jawa Tengah (5.839 KK dengan 25.25.718 jiwa), Jawa Timur (19.567 KK dengan 62.782 jiwa), dan daerah lain-lain (eks buruh kontrak dan Bangka) sebanyak 19.281 KK dengan 87.367 jiwa." Lihat buku Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I. tahun 2015, hlm. 4.

⁷ Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 2009. Buku Data Ketransmigrasian, hal 2-7.

⁸ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, "Peta Kekerasan Indonesia (September-Desember 2013) dan Konflik Antarkelompok di Indonesia", *The Habibie Center*, Edisi 06 Maret 2014, hlm. 13.

⁹ Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibukotanya adalah Kalianda. Lampung Selatan terbagi ke dalam 17 kecamatan dan 248 desa dan 3 kelurahan. Dalam Khubban, Abdan, "Judicial Review Spread Hatred of Race: Case Study Riot Balinuraga-South Lampung", *International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER)*, Vol. 2 (4), 2014, hlm. 126-131.

diperkirakan mulai datang ke daerah Lampung Selatan pada tahun 1958 bersamaan para transmigran dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Para transmigran tersebut oleh Pemerintah pusat ditempatkan di Seputih Banyak, Way Seputih 1, Palas, dan Sidomulyo.¹⁰ Secara khusus, Sidomulyo merupakan kecamatan di kabupaten Lampung Selatan, lebih tepatnya Desa Balinuraga, disiapkan untuk menampung para transmigran dari Bali.

Berdasarkan hasil laporan penelitian yang dilakukan oleh Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK - The Habibie Center, 2014) bahwa program transmigrasi pemerintah telah memperoleh persetujuan dari komunitas adat yang mendiami lahan di daerah tujuan transmigrasi (hasil wawancara SNPK terhadap tokoh adat Lampung Selatan, 7 Februari 2014).¹¹ Selain itu, banyak juga tokoh adat Lampung Selatan yang menyatakan bahwa penduduk lokal dan komunitas adat di Lampung Selatan menyambut hangat kedatangan para migran di daerah mereka.

Sejarah masuknya orang Bali ke Lampung Selatan tidak akan pernah lepas dari semangat seorang tokoh adat Lampung, Intan Mas Jahidin, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Negari Kalianda (sekarang bupati) periode 1957-1968, untuk mempraktikkan nilai-nilai moral suku Lampung, *Nemui Nyimah* yaitu terbuka dan menerima tamu dengan baik.¹² Dikutip dari catatan Pengantar Budisantoso, dalam buku, "Merajut Jurnalisme Damai di Lampung", bahwa Intan Mas yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Negari Kalianda sekaligus sebagai *penyimbang* adat kedatangan lima orang warga Bali ke rumahnya. Kelima orang tersebut menceritakan bahwa rumahnya telah hancur akibat terkena dampak letusan Gunung Agung tahun 1963 silam. Mereka menyampaikan niatnya untuk melanjutkan kehidupannya di tanah Lampung. Tidak sekedar memberikan tempat menumpang, namun Intan Mas juga

¹⁰ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, *op. cit.*, hlm. 13.

¹¹ *Ibid.*

¹² Budiman, Budisantoso & Saroso, Oyos HN. Pengantar Penyunting: Merajut Jurnalisme Damai di Lampung. Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung, 2012, hlm. xv-xvii.

menjanjikan akan memberikan tanah seluas dua hektare bagi setiap kepala keluarga. Setidaknya seluas 15.000 hektare tanah telah dihibahkan kepada sekitar 7.000 kepala keluarga dari Bali yang memutuskan untuk hidup di Lampung saat itu.¹³

Masyarakat bali yang ada di Balinuraga sebagian besar berasal dari Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang lebih dikenal dengan sebutan Bali Nusa karena letaknya di sebelah Timur Pulau Bali. Pulau Nusa Penida merupakan daerah gersang, dan secara geografis letaknya “terasingkan”. Dilihat dari aspek sosio-historisnya, warga Pulau Nusa Penida digolongkan sebagai *Jabawangsa*,¹⁴ sebutan lain dari *Sudrawangsa* atau orang *Sudra*.¹⁵

Jika diperhatikan secara saksama, struktur dan dimensi kehidupan sosial yang terbangun di Provinsi Lampung cenderung berbentuk *enklaf-enklaf* kesukuan. Terbukti dengan adanya perkampungan Lampung, perkampungan Bali, Sunda dan suku lainnya. Hal inilah yang dikemudian hari menjadi salah satu faktor penyumbang terjadinya konflik identitas antar kelompok di Lampung Selatan.

Lampung dikenal dengan julukannya sebagai, “Indonesia Mini”, karena dengan komposisi masyarakatnya yang heterogen, mulai dari suku Lampung, Bali, Jawa, Sunda, Padang, Semendo, Komerling, Batak, Bugis, Tionghoa, Madura dan suku lainnya, mereka tetap dapat hidup berdampingan secara harmonis.¹⁶ Namun julukan tersebut kemudian dipertanyakan kembali setelah munculnya konflik kekerasan pada tanggal 28-29 Oktober 2012, di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Sebutan *Jabawangsa* disematkan pada warga Pulau Nusa Penida, karena pada awalnya pulau tersebut merupakan tempat pembuangan para tahanan politik pihak kerajaan, pelaku praktek ilmu hitam dan kejahatan di lingkungan masyarakat ketika berada di pulau induk Bali. Status dan kedudukan orang yang mengalami pengasingan ke Pulau Nusa Penida akan secara otomatis lenyap dan menjadi orang *jaba*, yaitu orang luar. Lihat Setiawan, Wahyu, “*Pasraman* sebagai Media Pembentuk identitas Pasca Konflik”, *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 4 (1), 2015, hlm. 72.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Budiman, Budisantoso & Saroso, Oyos HN, *op. cit.*, hlm. 11.

Keperihatinan terhadap tragedi konflik kekerasan yang terjadi di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial yang terbangun belum cukup kuat dalam menopang dan mengukuhkan integrasi sosial sebagai bangsa yang plural tetapi tetap satu, *Bhineka Tunggal Ika*.

Fakta bahwa masih rapuhnya fondasi struktur kehidupan sosial di Provinsi Lampung, dikuatkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh dua lembaga terkemuka, yaitu Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan The Habibie Center, berturut-turut mengungkapkan fakta bahwa *pertama*, LSI dan Yayasan Denny JA merilis hasil risetnya tentang lima wilayah dengan tingkat diskriminasi terburuk paska reformasi, yaitu 1) Maluku, Konflik Muslim-Kristen; 2) konflik etnis Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Barat; 3) kekerasan terhadap etnis Tionghoa tahun 1998, di Jakarta; 4) kekerasan terhadap kelompok penganut aliran Ahmadiyah di Mataram, yang dampaknya menjadikan kelompok Ahmadiyah sebagai pengungsi sejak tahun 2005; dan terakhir 5) kekerasan atau konflik multietnik yang melibatkan kelompok pendatang Bali dan penduduk lokal Lampung, di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan.¹⁷

LSI mengkonfirmasi data bahwa konflik berlatar etnik di Lampung Selatan yang berlangsung selama tiga hari, 27-29 Oktober 2012, menelan korban tewas sebanyak 14 Orang, 13 luka parah dan 1.700 orang mengungsi ke Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kemiling, Bandar Lampung. Sedangkan kerugian materiil mencapai Rp. 24.88 miliar, dan sebanyak 532 rumah rusak dibakar (**lihat tabel 1.1**).¹⁸

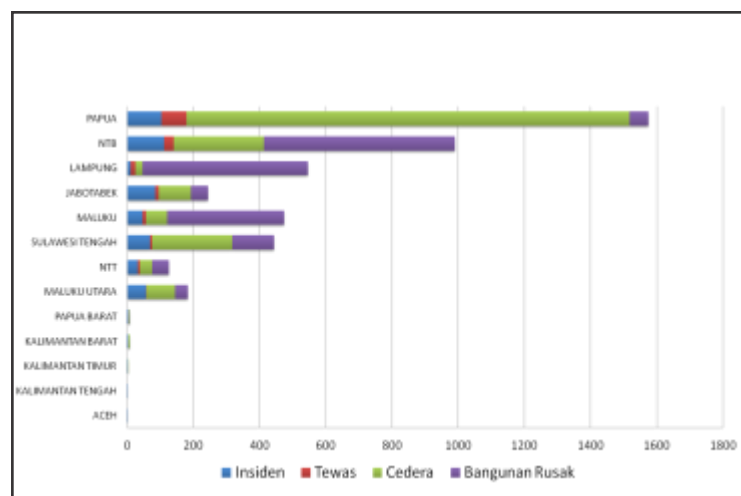
¹⁷ Denny J.A. "Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi". Jakarta: Inspira.co, 2014, hlm. 44.

¹⁸ Yayasan Denny JA dan LSI Community, "Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman", Materi Konferensi Pers, 23 Desember 2012. Dari https://books.google.co.id/books?id=TO4xDwAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=Dicari+Capres+2014+yang+Melindungi+Keberagaman&source=bl&ots=VZrScty2BJ&sig=UUYIztdwxv1gVYBe_9gEkQ47k74&hl=jv&sa=X&ved=2ahUKEwj30_6H1dLcAhWLFH0KHUNNB2UQ6AEwBHoECAYQAAQ#v=onepage&q=lampung&f=true; diakses pada 4 Agustus 2018.

Tabel 1.1 Lima Kasus Diskriminasi Besar di Indonesia				
Kasus	Jumlah Korban	Lama Konflik dan Luas Konflik	Kerugian Materi	Frekuensi Berita
Diskriminasi berlatar agama (Maluku dan Maluku Utara)	8000-9000 orang meninggal. 700.000 orang mengungsi	4 tahun (1999-2002). 2011 juga terjadi konflik. Provinsi (Maluku)	29.000 rumah terbakar, 7046 rumah rusak, 45 masjid, 47 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintah, dan 4 bank hancur	Google search "Kerusuhan Ambon" = 147.000 item
Diskriminasi berlatar etnik (Sampit)	496 orang meninggal, 108.000 orang mengungsi	10 hari (puncak konflik). Sepanjang 2001 terjadi ketegangan. Kota Sampit, ibu kota Kotawaringin Timur. Meluas ke kota Palangkaraya, Kuala Kapuas, dan Pangkalanbun	192 rumah dibakar, 748 rumah rusak, 16 mobil dan 43 sepeda motor hancur	Google search "Kerusuhan Sampit" = 41.000 item
Diskriminasi berlatar etnik dan gender (Jakarta 13-15 Mei 1998)	1.217 jiwa meninggal, 85 perempuan diperkosa, 70.000 orang mengungsi	3 hari (13-15 Mei 1998). Provinsi (DKI Jakarta)	+/- Rp 2.5 Triliun	Google search "Kerusuhan 13-15 Mei 1998" = 24.700 item
Diskriminasi berlatar perbedaan keyakinan (Transito Ahmadiyah Mataram)	9 orang meninggal, 8 luka-luka, 9 gangguan jiwa, 379 orang terusir, 9 pasangan dipaksa cerai, 3 perempuan hamil keguguran, 61 siswa putus sekolah, 45 orang dipersulit KTP, 322 orang dipaksa keluar Ahmadiyah	7 kali penyerangan massif (1998-2006). 8 thn pengungsian (2005-2012). 4 wilayah dalam 1 provinsi (Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Mataram)	11 tempat ibadah dan 144 rumah rusak, 64,17 ha tanah telantar, 25 tempat usaha rusak, harta benda rusak/dijarah	Google search "Penyerangan Ahmadiyah Lombok" = 30.800 item
Diskriminasi berlatar etnik (Lampung Selatan)	14 orang tewas, belasan luka parah, 1700 orang mengungsi	3 hari (27-29 Oktober 2012). Kecamatan (Kalianda dan Way Panji)	Rp. 24,88 miliar, 532 rumah rusak dan dibakar	Google search "Bentrok Lampung Selatan 28 Oktober 2012" = 80.700 item

Sumber: Yayasan Denny JA dan LSI Community, "Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman", Materi Konferensi Pers, 23 Desember 2012.

Kedua, The Habibie Center melalui SNPK (Sistem Nasional Pemantau Kekerasan) merilis data bahwa bahwa jika ditinjau berdasarkan persebaran wilayahnya, kekerasan antar kelompok berbasis identitas dominan terjadi di tiga provinsi, yakni Papua, NTB, dan Lampung. Provinsi Lampung masuk dalam kategori wilayah yang rerata insiden dengan dampak korban tewas tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya (**Lihat Gambar 1.1**).¹⁹



Gambar 1.1 Insiden dan Dampak Kekerasan Antarkelompok di 13 Provinsi Periode 2005-2013

Sumber: Kajian Perdamaian dan Kebijakan, "Peta Kekerasan Indonesia (September-Desember 2013) dan Konflik Antarkelompok di Indonesia", *The Habibie Center*, Edisi 06 Maret 2014, hlm. 13.

Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kerawanan konflik yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan oleh fakta bahwa hampir terjadi konflik komunal yang melibatkan pendatang dan penduduk asli di setiap kabupaten di Lampung, seperti kasus Menggala dan Gunung Terang (Tulang Bawang), Fajar Bulan (Lampung Barat), Jabung (Lampung Timur), dan terakhir yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan pada 27-29 Oktober 2012, berupa konflik etnis

¹⁹ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, *op. cit.*, hlm. 9-10.

Balinuraga yang melibatkan pendatang Bali dan penduduk lokal Lampung.²⁰

Jika ditilik lebih jauh ke dalam, konflik laten yang muncul menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*) dan konflik kekerasan di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan, 28-29 Oktober 2012 yang lalu adalah manifestasi dari akumulasi kekesalan dan kekecewaan (frustrasi) atas serangkaian konflik masa lalu yang penyelesaiannya selalu tertunda dan tidak pernah tuntas. Maka, sewaktu-waktu ada pemicu, mereka dapat marah dan melakukan perlawanan (agresi).

Muncul beragam perspektif terkait kronologis sebab munculnya konflik kekerasan di Balinuraga, Lampung Selatan, Oktober 2012. Berdasarkan data SNPK, The Habibie Center, mengutip dari berita “www.tempo.co”, 2 November 2012, bahwa konflik kekerasan yang mampu mengerahkan massa penduduk lokal Lampung dari desa di sekitar Kecamatan Way Panji dan seluruh penjuru Provinsi Lampung, dipicu oleh insiden pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemuda Balinuraga terhadap dua gadis Lampung, bernama Nurdiyana Dewi (18 tahun), warga Desa Agom Kecamatan Kalianda, dan Emiliya Elisa (17 tahun), warga Desa Negeri Pandan Kecamatan Kalianda, pada hari Sabtu 27 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 WIB.²¹

Kronologi peristiwa konflik kekerasan di Balinuraga bermula saat kedua gadis Lampung, Diana dan Emi, berboncengan mengendarai sepeda motor usai berbelanja peralatan *make up* pada sebuah minimarket di Desa Patok-Sidoharjo Kecamatan Way Panji. Dalam perjalanan pulang, keduanya melewati segerombolan pemuda Balinuraga yang sedang menunggangi sepeda (Data SNPK, mencatat terdapat 10 orang pemuda Balinuraga). Tidak disangka seorang pemuda berusaha memegang paha Emi. Emi, yang posisinya dibonceng oleh Diana, berusaha menepisnya. Namun, karena jumlah pemuda yang lebih banyak, fokus dan

²⁰ Setiawan, Wahyu, *op. cit.*, hlm. 67-79.

²¹ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, *op. cit.*, hlm. 14.

keseimbangan Diana buyar sehingga sepeda motornya terjatuh.²² Keduanya berusaha ditolong seorang warga Desa Balinuraga, untuk diangkat ke pinggir jalan. Tak lama setelah Diana menghubungi keluarganya, kakaknya datang dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, keduanya diurut dan diobati karena mengalami luka memar di siku dan lutut. Sementara orang tua menunggu anaknya diurut, di luar sudah berkerumun massa yang datang dari desa tetangga bersiap untuk memberi pelajaran pada pemuda Balinuraga yang dianggap sudah keterlaluan dan menghina *pi'il* atau harga diri suku Lampung.²³ Inilah salah satu alasan mengapa konflik menjadi membesar, yaitu dalam tata kehidupan sosialnya, orang Lampung memegang prinsip *Piil Pesengiri* yang menempatkan harga diri dalam posisi tertinggi. Sehingga, ketika mereka merasa harga dirinya telah dicerai oleh kelompok lain, maka akan sangat mungkin terjadi gesekan sosial yang memicu terjadinya konflik terbuka.

Kabar menyebar lebih cepat dari perkiraan, pada hari Minggu, 28 Oktober 2012, ratusan orang berkumpul kembali di perempatan Jalan Way Harong. Kali ini massa berdatangan hingga dari luar Lampung Selatan. Mereka siap melakukan penyerangan dan akhirnya konflikpun tak dapat dihindari, sehingga menjatuhkan tiga korban meninggal. Pada hari ketiga, Senin 29 Oktober 2012, konflik kekerasan dalam skala besar semakin tidak dapat dicegah oleh aparat kepolisian dan TNI yang berjumlah 2.100 personel, sedangkan jumlah massa mencapai belasan ribu.²⁴ Akhirnya konflik memakan korban jiwa yang tidak sedikit dan kerugian materil yang cukup besar.

Dikutip dari Laporan Penelitian LPM Unkris, Panggabean menandakan bahwa terulangnya konflik Lampung menjadi indikator gagalnya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum dan keamanan, yang dinilai tidak mampu mencegah terjadinya konflik kekerasan yang

²² Budiman, Budisantoso & Saroso, Oyos HN, *op. cit.*, hlm. 4.

²³ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 5-10.

melibatkan etnis Bali dan penduduk lokal Lampung. Aparat kemanan gagal dalam mende-eskalasi ketegangan dan mencegah konflik kekerasan karena intervensi dilakukan setelah konflik mulai meluas.²⁵

Pemerintah Daerah dianggap gagal dalam melakukan upaya penanganan konflik sosial di Balinuraga seperti yang diamanatkan dalam UU No. 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, yaitu seyogianya pemerintah harus melakukan: *Pertama*, upaya pencegahan (pasal 1), dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Namun, realisasinya lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah seperti FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) belum dimaksimalkan perannya karena kurangnya sumber daya dan anggaran; *kedua*, penghentian konflik dalam pasal 12; dan *ketiga*, pemulihan pasca konflik yang meliputi tahap rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Daerah dalam hal ini gagal dalam melakukan penghentian terhadap konflik kekerasan yang terjadi karena hanya berorientasi pada upaya penghentian kekerasan, bukan penghilangan akar konflik sehingga konflik dapat muncul kembali sewaktu-waktu.

Berdasarkan pada fakta yang dipaparkan di atas maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian atas upaya transformasi konflik yang dilakukan di Balinuraga, Lampung Selatan dalam rangka mewujudkan perdamaian positif yang berkelanjutan.

Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan, yaitu: 1) Kerusakan di Balinuraga menimbulkan efek mematikan dan kerugian materil yang cukup besar; 2) konflik identitas yang melibatkan kelompok tidak hanya antara transmigran dan penduduk lokal, tetapi juga melibatkan suku lainnya; 3) kompleksitas hubungan antara migran dan penduduk lokal; 4) penyelesaian yang tidak pernah tuntas; dan 5) kompleksnya sumber konflik yang ada.

²⁵ Laporan Penelitian LPM Unkris, dalam <http://eprints.ipdn.ac.id/9/2/ISI.pdf>, diakses pada 20 Juli 2018.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian dalam Tesis ini adalah “Transformasi Konflik Sosial Antar-Etnis Bali dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan”. Secara lebih spesifik, penelitian dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi subfokus penelitian, antara lain:

1. Faktor-faktor penyebab eskalasi konflik laten menjadi konflik terbuka di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan
2. Upaya transformasi konflik di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta yang dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik di Balinuraga, Lampung Selatan dapat bereskalasi dari konflik laten menjadi konflik terbuka?
2. Bagaimana upaya transformasi konflik di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian terhadap konflik kekerasan yang melibatkan pendatang dan penduduk lokal di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan adalah: 1) menganalisis faktor-faktor penyebab eskalasi konflik laten menjadi konflik terbuka (*manifest conflict*) di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan; dan 2) menganalisis upaya transformasi konflik di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan dan mengembangkan konsep transformasi yang baik guna mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Lampung Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan berkenaan dengan pengembangan konsep, teori, metode, dan pendekatan dalam kajian Keamanan Nasional, khususnya dalam kajian Studi Damai dan Resolusi Konflik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya transformasi konflik dalam menyelesaikan akar persoalan (*root causes*) melalui pembangunan sinergitas yang baik antara pemerintah, lembaga terkait, tokoh masyarakat, agama dan adat, dengan melibatkan masyarakat (*grassroot*) dalam usaha menghilangkan prasangka-prasangka negatif (*stereotip*), masalah sosio-kultural, meminimalkan tingkat disparitas ekonomi dengan membangun identitas *we-ness* (kekitaan) dan komunikasi baru baik melalui kearifan lokal maupun modal sosial lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi *guideline* bagaimana menciptakan pola hubungan dan komunikasi yang harmonis antar berbagai suku, khususnya Suku Lampung dengan Suku Bali, agar terwujud koeksistensi antar suku dan perdamaian yang berkelanjutan di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

Teori dan konsep merupakan instrumen penting dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian kualitatif misalnya, teori digunakan sebagai perspektif yang memberikan batasan dalam pemikiran peneliti, sehingga dalam proses analisis tidak akan terjadi pembauran dengan prespektif teori lainnya.

2.1 Deskripsi Konseptual

Peneliti menggunakan beberapa kerangka teori dan konsep yang dikemukakan sebagai landasan berpikir. Teori dan konsep yang dianggap relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian, yaitu Teori Konflik, Teori Transformasi Konflik, Teori Identitas Sosial, Teori Kerja Sama, konsep SAT, Konsep Perdamaian, dan konsep Segitiga ABC Konflik Galtung.

2.1.1 Teori Konflik

Konflik merupakan sebuah keniscayaan dalam fenomena sosial yang melekat erat dalam hidup dan kehidupan manusia. Konflik biasanya muncul dalam konteks baik personal, interpersonal, komunal maupun interkomunal. Konflik personal digambarkan sebagai suatu pergolakkan dan pertentangan²⁶ dalam hati nurani yang muncul pada diri setiap individu. Sedangkan konflik dalam konteks komunal atau kelompok merupakan suatu pertentangan yang muncul antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain yang saling berhadapan sebagai bentuk pertahanan diri maupun perlawanan untuk mempertahankan identitas dan kepentingan

²⁶ Pertentangan atau perbedaan dalam aspek keagamaan dilihat sebagai rahmat sekaligus *sunnatullah* (sebuah keniscayaan dalam kehidupan manusia) yang tidak dapat dinisbikan tetapi dapat dikelola menjadi suatu kekuatan integrasi dengan cara mengikat setiap elemen atau nilai-nilai yang memiliki unsur kesamaan dan diakui secara universal.

kelompoknya masing-masing.²⁷ Dengan demikian, *nature of conflict* atau konflik secara alamiah dipandang sebagai suatu fenomena yang wajar sepanjang dapat dikelola dan diarahkan bagi tercapainya tujuan bersama yang lebih besar, yaitu integrasi sosial.

Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin “*con*” yang artinya “bersama” dan “*fligere*” yang berarti “benturan atau tabrakan.”²⁸ Istilah konflik sosial secara umum mengandung makna sebagai suatu rangkaian peristiwa pertentangan, disharmonisasi dan pertikaian antar individu atau kelompok melalui konflik kelas, yang dimulai pada tahap pertentangan hingga ke titik kulminasinya, yaitu peperangan internasional.

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai upaya memperjuangkan nilai dan pengakuan terhadap status yang langka dengan cara menetralkan kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan, serta mengeliminir lawan-lawan politiknya.²⁹ Sedangkan, Soerjono Soekanto dalam bukunya, “Kamus Sosiologi” mendefinisikan konflik sebagai suatu proses mencapai tujuan dan kepentingan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.³⁰

Berdasarkan definisi di atas, maka peneliti menggambarkan konflik sebagai suatu fenomena sosial yang menyatu dalam kehidupan manusia berupa pertentangan kepentingan, nilai, tujuan baik disertai dengan ancaman dan kekerasan maupun tidak yang terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain. Coser dan Dahrendorf sepakat bahwa konflik memiliki fungsi positif dan konstruktif. Menurut Coser, konflik merupakan proses instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Meskipun

²⁷ LPM Unkris, “Perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian”, dalam <http://eprints.ipdn.ac.id/9/2/ISI.pdf>, diakses pada 20 Juli 2018.

²⁸ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 345.

²⁹ Teori konflik Lewis A. Coser, dalam <http://crateridea.blog.ums.ac.id/2016/03/21/teori-konflik-lewis-a-coser/>; diakses pada 18 Agustus 2018.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal.99.

Coser mendefinisikan konflik sebagai pertentangan, perjuangan memperoleh akses terhadap sumber yang langka dimana setiap orang akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan kelompoknya, namun Coser menegaskan bahwa konflik dapat bersifat fungsional dan disfungsional dalam mengkonstruksi atau mendestruksi pola suatu hubungan dalam struktur kehidupan sosial.³¹ Jika model ini mempertimbangkan masyarakat sebagai suatu sistem yang mejemuk dan plural, dimana di dalamnya terdapat banyak kepentingan yang saling bertentangan, maka seseorang akan cenderung memikirkan tindakan spesifik yang dapat mendatangkan keuntungan dan jarang orang berpikir tentang tindakan yang mampu menguntungkan sistem secara keseluruhan. Jika terjadi stabilitas struktur dan sistem sosial secara keseluruhan, maka inilah yang disebut sebagai fungsi positif konflik.³² Contoh, konflik antar kasta di India semakin meneguhkan pemisahan dan perbedaan kasta-kasta yang bervariasi, tetapi juga menjamin stabilitas sosial India secara keseluruhan.

Dahrendorf sendiri melihat masyarakat dalam dua rupa, yaitu konflik dan konsensus. Menurutnya, sebuah masyarakat tidak akan mengalami konflik jika tidak ada konsensus sebelumnya. Misalnya, kelompok A dan kelompok B tidak akan terlibat dalam konflik karena belum pernah hidup bersama dan tidak mengenal satu sama lain. Begitupun sebaliknya, konflik dapat mengantarkan kita terhadap konsensus. Contohnya, kerja sama atau aliansi yang saat ini dibangun oleh Amerika Serikat dan Jepang adalah hasil konsensus yang dibangun pasca terlibat dalam konflik dan perang besar pada masa Perang Dunia II.³³

Berdasarkan sudut pandang yang dibangun Teori Konflik ini, peneliti akan menganalisis bagaimana konflik yang terjadi di Balinuraga, Way

³¹ Teori konflik Lewis A. Coser, *loc. cit.*

³² *Ibid.*

³³ Tumengkol, Selvie M., "Teori Sosiologi Perspektif tentang Teori Konflik dalam Masyarakat Industri", Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Manado, 2012.

Panji, Lampung Selatan mampu membawa perubahan yang positif dalam struktur sosial yang ada.

Jika ditinjau berdasarkan sumbernya, menurut William (1997) konflik laten dapat berkembang menjadi konflik terbuka jika, 1) terdapat tuntutan yang bersebrangan dari masing-masing pihak berkonflik atas akses terhadap sumber daya, 2) perbedaan standar nilai, norma, dan hilangnya kepercayaan, serta 3) ekspresi perilaku yang afektif dan impulsif. Sedangkan Ichsan Malik dalam bukunya, “Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian”, menguraikan setidaknya ada 5 sumber konflik yang dominan terjadi di Indonesia, yaitu 1) konflik hubungan, 2) konflik kepentingan, 3) konflik struktural, 4) konflik data, dan 5) konflik nilai-nilai adat.³⁴ Selain itu, konflik juga dapat bersumber dari faktor objektif, berupa kesenjangan sosial, kebijakan atau perilaku yang diskriminatif, pengangguran, kemiskinan dan tindak kejahatan;³⁵ faktor ideologis dapat menyuburkan sentimen dan segregasi sosial dan pengambinghitaman kelompok lainnya, serta faktor subjektif seperti prasangka sosial (*prejudice*) dan stereotip yang dapat memperlebar jarak (*distance*) antar kelompok.

Berdasarkan sumber konflik yang dirumuskan oleh beberapa ahli di atas, maka peneliti akan mencoba untuk menganalisis berbagai faktor atau sumber konflik yang ada di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan yang mendorong konflik laten menjadi konflik terbuka.

Tabel 2.1 Teori Konflik

Teori	Variabel	Indikator
Konflik	Konflik Struktural	1) Disparitas akses dan kontrol sumber daya 2) Kebijakan yang diskriminatif 3) Kesewenangan dalam pengambilan keputusan

³⁴ Malik, Ichsan, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017), hlm. 13-16.

³⁵ Fisher, Simon, dkk. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. (Jakarta: SMK Grafika Desa Putra, . 2001), hlm. 4.

	Konflik Kepentingan	1) Pemuasan kebutuhan 2) Mengorbankan orang lain
	Konflik Hubungan	1) Stereotip 2) Prejudice 3) Diskriminasi
	Konflik Nilai	1) Perbedaan nilai, adat, ideologis 2) Perbedaan implementasi agama
	Konflik Data	1) Kurang informasi 2) Perbedaan interpretasi 3) Pemalsuan sejarah
Sumber: Diolah dari berbagai sumber		

2.1.1.1 Segitiga ABC Konflik Galtung

Konflik dan kekerasan dapat dikatakan sebagai antitesis dari perdamaian. Sama halnya dengan perdamaian, konflik juga merupakan fenomena sosial yang melibatkan hubungan atau relasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok *liyan*. Pola relasi yang demikian muncul, karena adanya kontradiksi (*contradiction*) antara sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*).³⁶ Dalam bukunya, "*Peace by Peaceful Means*", Galtung (2012) merumuskan bahwa konflik merupakan bangunan triadik yang tersusun atas tiga elemen, yaitu C (*conflict*) = A (*attitudes*) + B (*behaviour*) + C (*contradiction*).³⁷ Galtung (2007) merumuskannya sebagai Model Segitiga ABC Konflik. Sebagaimana dikutip Simon Fisher (2001), Galtung menyebutkan ada tiga kategori kekerasan³⁸ (**Gambar 2.1**) dalam konflik, yaitu 1) kekerasan langsung atau *direct violence* (perilaku), 2) kekerasan kultural (sikap), dan 3) kekerasan struktural (konteks).³⁹

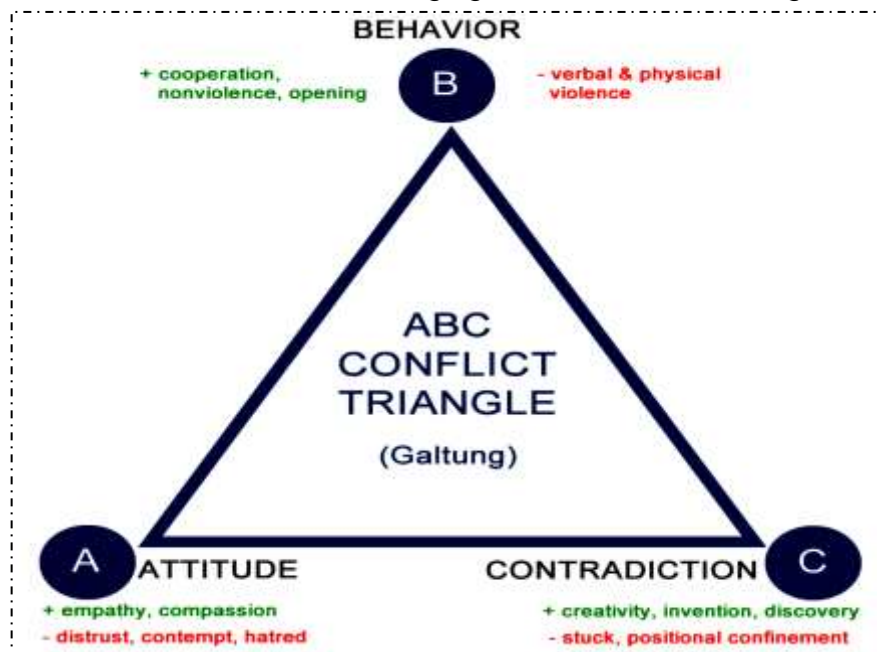
³⁶ Webel, Charles & Galtung, Johan, *Handbook of Peace and Conflict Studies*, (New York, Routledge, 2007), hlm. 71.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

³⁸ Kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain. Lihat Galtung, Johan, 1971, *A Structural Theory of Imperialisme*, *Journal of Peace Research* (online) Vol 8 No 2, (<http://www.jstor.org/stable/423477> diakses pada 5 Agustus 2018).

³⁹ Fisher, Simon, dkk, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*, diterjemahkan oleh *The British Council Indonesia*, (Jakarta: SMK Grafika Desa Putra, 2001), hlm. 9.

Gambar 2.1 Model Segitiga ABC Konflik Galtung



Sumber: *Interpersonal Peace Nurturing & Sustaining Right Relationships with Others*, dari <http://nationalpeaceacademy.us/images/adultselfstudyguide/ADULT-4-v-1.pdf>; diakses pada 15 Agustus 2018.

Secara rinci, Galtung dalam Czyz (2006) mendefinisikan setiap elemen dalam segitiga konflik ABC (**Tabel 2.2**),⁴⁰ yaitu: *pertama*, *Contradiction* merupakan akar masalah yang menyebabkan munculnya konflik. Kontradiksi merujuk pada situasi dasar konflik, yaitu adanya ketidakcocokan tujuan (*incompatible goal*) antar pihak-pihak yang bertikai;⁴¹ *kedua*, *attitude* atau sikap merupakan cara pandang pihak-pihak yang bertikai, baik terhadap pihak lawan maupun kelompoknya sendiri. Dalam situasi konflik terbuka (yang disertai kekerasan), pihak-pihak yang terlibat dalam konflik cenderung mengembangkan stereotip terhadap lawan yang biasanya dipengaruhi oleh emosi seperti, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan dan kebencian. Sikap yang demikian merupakan elemen emotif (perasaan), kognitif (keyakinan), dan konatif

⁴⁰ Hendrastin, Refia Juniarti & Budi Purwoko, Studi of Psychological Dynamics Interpersonal Conflict Reference from Galtung ABC Triangle Conflict and resolution Conflict Methode by The Department of Multimedia Class XII SMK Mahardhika Surabaya, *Jurnal BK UNESA*, Vol. 4 (02), 2014, hlm. 364-374.

⁴¹ Webel, Charles & Johan Galtung, *op. cit.*, hlm. 71.

(kehendak);⁴² dan *ketiga*, perilaku dapat berupa sikap persahabatan, permusuhan, kerja sama dan persaingan. Perilaku konflik yang disertai kekerasan misalnya, dicirikan dengan adanya perlawanan, ancaman, dan serangan yang bersifat destruktif.⁴³

Dalam mengatasi berbagai bentuk kekerasan baik struktural, kultural maupun *direct violence*, Galtung (1981) mengatakan bahwa kekerasan secara langsung dapat diatasi melalui upaya mengubah perilaku konflik menjadi kooperatif dan konstruktif (*peacekeeping*), sedangkan kekerasan kultural dapat dihilangkan melalui perubahan sikap (*peacemaking*), sementara kekerasan struktural dapat diakhiri dengan mengeliminir segala bentuk kontradiksi struktural melalui penegakkan keadilan dan mewujudkan persamaan hak atas akses terhadap sumber daya, ekonomi, dan pendidikan (*peacebuilding*).⁴⁴

Peneliti menggunakan konsep Segitiga ABC Konflik Johan Galtung untuk menganalisa proses eskalasi konflik di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan, dari konflik yang awalnya bersifat laten menjadi konflik terbuka pada tanggal 27-29 Oktober 2012. Model Segitiga ABC ini juga dapat digunakan untuk memprediksi langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk menangani bentuk kekerasan yang terjadi baik kultural, struktural maupun kekerasan terbuka.

Tabel 2.2 Konsep Segitiga ABC Konflik Galtung		
Konsep	Variabel	Indikator
Segitiga ABC Konflik	<i>Attitude</i> (sikap/kultural)	1) Aspek kognitif meliputi kesalahpahaman, stereotip negatif, dan perasaan seperti kemarahan, kebencian, kecurigaan
	<i>Contradiction</i> (struktural/akar konflik)	1) ketidakcocokan tujuan, Kelangkaan sumber daya, Persaingan, Migrasi, Perubahan (sosial, politik, ekonomi,

⁴² Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse, *op. cit.*, hlm. 20-22.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

		globalisasi, iklim)
	<i>Behaviour</i> (perilaku/konflik terbuka)	1) Polarisasi tindakan aktual, terkadang dalam bentuk destruktif antar pihak di dalam konflik (pembakaran, pembunuhan, intimidasi, penembakan, dan perang)
Sumber: Diolah dari berbagai sumber		

2.1.1.2 Perdamaian

Perdamaian merupakan bagian integral dalam teori konflik, karena untuk memahami konflik dan kekerasan kita harus mengetahui tentang perdamaian. Peneliti menggunakan konsep perdamaian sebagai alat sekaligus indikator untuk melihat apakah proses transformasi konflik sosial antar etnis di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan berjalan dengan baik sehingga memunculkan perdamaian yang berkelanjutan.

Hicks (dalam Fountain 1999) mendefinisikan perdamaian sebagai suatu kondisi damai dimana tidak ada kekerasan secara terang-terangan, serta terwujud didalamnya segala bentuk keadilan baik sosial, ekonomi maupun politik, artinya perdamaian memiliki makna yang lebih mendalam dari hanya sekedar absennya perang dan permusuhan. Damai dalam perspektif Galtung (1967) diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu *negative peace* (damai negatif) dan *positive peace* (damai positif) yang merujuk pada tiga bentuk kekerasan, yaitu kekerasan kultural, struktural dan kekerasan langsung (*direct violence*) (**Gambar 2.2**).⁴⁵

Perdamaian negatif oleh Galtung didefinisikan sebagai suatu keadaan damai tanpa adanya kekerasan kolektif yang terorganisir (*absence of organized collective violence*). Sedangkan perdamaian positif merujuk pada suatu kondisi dimana terdapat nilai-nilai (*value*) yang secara umum disepakati bersama oleh setiap entitas masyarakat pada suatu wilayah tertentu, seperti bebas dari rasa takut (*free of fears*), pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, kerja sama, bebas dari eksploitasi, ada

⁴⁵ Zainal, Suadi, "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 21 (1), 2016, hlm. 84-85.

persamaan hak dan kesempatan, keadilan, pluralisme, partisipasi, bebas bertindak dan wujud keadilan sosial lainnya.⁴⁶ Lebih dari itu, perdamaian positif didefinisikan sebagai suatu kondisi yang tidak hanya meliputi fase kesepakatan damai dan berakhirnya perang,⁴⁷ tetapi juga dibangun didalamnya sendi-sendi kehidupan yang harmonis, adanya penghormatan dan penghargaan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia, pembangunan sosial dan ekonomi yang berjalan dengan baik, besarnya peran dan sokongan dari berbagai lembaga politik yang memiliki kapasitas serta kemampuan dalam menciptakan perubahan, sekaligus mampu menyelesaikan beragam konflik sosial dengan tanpa menggunakan kekerasan sebagai alatnya.

Beberapa ahli seperti Askandar (2006) juga memberikan definisi tentang perdamaian positif, yaitu kondisi dimana terdapat manifestasi penghormatan dan penghargaan terhadap hak personal dan kolektif, serta adanya saluran dan sarana bagi rakyat untuk secara bebas mengungkapkan dan menyampaikan pendapatnya di muka umum.⁴⁸ Selain itu, keadilan terus diperjuangkan, dan adanya mekanisme yang mencakup strategi, prosedur, dan peraturan yang berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan isu-isu konflik yang mungkin muncul dalam struktur kehidupan sosial.

Positive Peace Index (PPI) membuat 8 indikator perdamaian positif (**Tabel 2.3**),⁴⁹ yaitu 1) pemerintahan yang berfungsi dengan baik; 2) lingkungan bisnis yang sehat; 3) distribusi sumber daya yang merata; 4) menghormati dan mengakui adanya hak orang lain; 5) terjalinnya hubungan baik dengan sesama; 6) adanya keterbukaan informasi; 7) tingginya sumber daya manusia; dan 8) tingkat korupsi rendah.

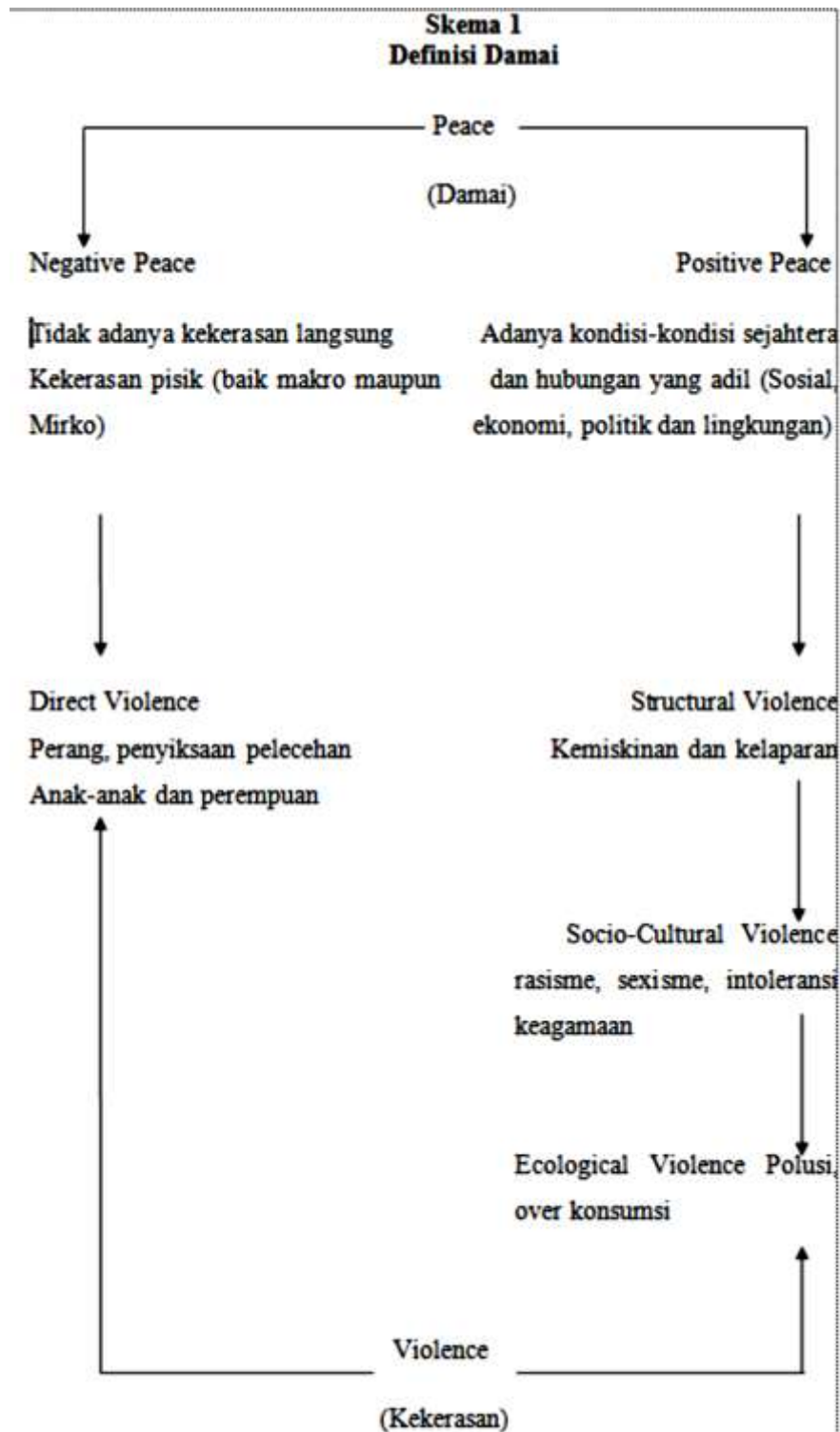
⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Ukaid, *Building Peaceful States and Societies*, (London, UK: Department for International Development, 2010).

⁴⁹ Charlatanism: "The Positive Peace, *Editorial* 11 Juli 2016 dalam Index" <https://www.transcend.org/tms/2016/07/charlatanism-the-positive-peace-index/>; diakses pada 20 Agustus 2018.

Gambar 2.2 Definisi Damai



Sumber: Kontruksi budaya damai, dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/6997/3/BAB%20II.pdf>; diakses pada 20 Agustus 2018

Tabel 2.3 Konsep Perdamaian		
Konsep	Variabel	Indikator
Perdamaian	Damai negatif	1) Tidak adanya kekerasan langsung atau terbuka, kekerasan fisik (baik makro maupun mikro)
	Damai positif: bebas dari ketakutan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, kerja sama, tidak adanya eksploitasi, ada persamaan hak dan kesempatan, keadilan, pluralisme, partisipasi	1) pemerintahan yang berfungsi dengan baik; 2) lingkungan bisnis yang sehat; 3) distribusi sumber daya yang merata; 4) menghormati dan mengakui adanya hak orang lain; 5) terjalinnya hubungan baik dengan sesama; 6) adanya keterbukaan informasi; 7) tingginya sumber daya manusia; dan 8) tingkat korupsi rendah
Sumber: Diolah dari berbagai sumber		

2.1.2 Teori Transformasi Konflik

Dalam bentuk pemikiran yang sederhana, perdamaian merupakan antitesis dari peperangan dan berakhirnya konflik kekerasan. Namun, ungkapan di atas disangkal oleh Hicks dalam Fountain (1999) yang berargumen bahwa perdamaian tidak simplisiti dimaknai dengan absennya kekerasan atau dalam bahasa Galtung (1967) disebut sebagai *negative peace*, tetapi juga mencakup di dalamnya manifestasi keadilan baik sosial, ekonomi, maupun politik.⁵⁰ Dalam cakupan makna yang lebih mendalam, perdamaian adalah wujud dari *positive peace*, yang didalamnya terdapat berbagai bentuk perjuangan untuk mentransformasikan segala wujud kekerasan menjadi perdamaian, destruktif menjadi konstruktif, dan konflikturnya menjadi harmonis.

Untuk menganalisis konflik di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan, peneliti menggunakan teori transformasi konflik sebagai tahapan rekonstruksi pasca konflik yang muncul setelah upaya resolusi konflik

⁵⁰ Zainal, Suadi, "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 21 (1), 2016, hlm. 84-85.

dilakukan. Teori ini dipopulerkan oleh Lederach melalui karya-karyanya yang mengasumsikan bahwa dinamika pasang dan surut konflik sosial memberi peluang dan ruang dalam kehidupan, untuk melakukan suatu perubahan yang bersifat konstruktif, guna meminimalisir angka kekerasan dan mendorong terwujudnya keadilan yang merata dalam berbagai sektor kehidupan sosial.⁵¹ Transformasi konflik bertumpu pada upaya menciptakan perubahan hubungan dalam konflik dan pembangunan pasca konflik, bukan mengendalikan terlebih menihilkan konflik. Merujuk pada pendapat Fisher, *et.al*, (2001) dalam Zainal (2016) bahwa tujuan transformasi konflik adalah mengatasi berbagai sumber dan akar konflik sosial maupun politik yang lebih luas secara mendalam, dengan cara mengelola kembali energi dan kekuatan negatif dalam perang dan permusuhan menjadi kekuatan sosial politik yang bernilai positif,⁵² serta dengan mewujudkan keadilan melalui perubahan struktur secara holistik.⁵³

Transformasi konflik dalam pandangan Noter dan Diamond (1996) merupakan suatu proses pergerakan dari *conflict system to peace system*.⁵⁴ Ditinjau berdasarkan titik tekannya, transformasi konflik menitikberatkan pada perubahan sistemik, poin inilah yang membedakan antara transformasi dengan resolusi konflik. Dengan demikian, transformasi konflik merupakan suatu proses transformatif yang menuntut perubahan dari segala aspek baik struktural, kultural, hubungan, perilaku, sikap, kepentingan, perdebatan, maupun konstitusi yang mendorong ke arah terciptanya permusuhan dan konflik, menuju pada transformasi

⁵¹ "Conflict transformation is to envision and respond to the ebb and flow of social conflict as life-giving opportunities for creating constructive change processes that reduce violence, increase justice, in direct action and social structures, and respond to real-life problems in human relationships" Lihat dalam L. Mc. Opiyo, *Music as Education, Voice, Memory and Healing : Community Views on the Role of Music in Conflict Transformation in Northern Uganda*, hlm. 44.

⁵² Zainal, Suadi, *op. cit.*, hlm, 84.

⁵³ Mitchell, C, "Beyond Resolution: What does Conflict Transformation actually Transform?," *Peace and Conflict Studies*, Vol. 9 (1), 2002, hlm. 1-22.

⁵⁴ Noter, J., dan Diamond, L., "Occasional Paper: Building Peace and Transforming Conflict: Multy Track Diplomacy," dalam *Practice, Institute for Muty Track Diplomacy*, Washington, DC. Dari <http://www.imtd.org/publications/occasional-papers/>; diakses pada 7 Agustus 2018.

(perubahan) hubungan, struktur sosial, dan keadaan yang lebih positif, konstruktif, dan damai. Maka dari itu, Ramsbotham (2011) berargumen bahwa transformasi konflik adalah upaya penyelesaian konflik hingga level yang paling dalam yaitu pembangunan perdamaian melalui struktur dan budaya.⁵⁵

Dalam transformasi konflik setidaknya ada empat elemen pokok yang harus ditransformasikan, yaitu: 1) transformasi proses; 2) transformasi personel; 3) transformasi struktur; dan 4) transformasi hubungan (**Lihat gambar 2.3**).⁵⁶

Pertama, transformasi proses menuntut partisipasi multi level dari berbagai elemen, mencakup usaha-usaha yang bertujuan menguatkan pihak yang lemah dan menjamin mereka yang terlibat langsung dalam konflik memiliki kemampuan dan kapasitas dalam mengontrol proses transformasi. Upaya ini tidak hanya terfokus terhadap masalah dan isu yang baru mencuat kepermukaan, tetapi juga pada luka dan trauma lama yang masih terpendam, serta “rasa sakit” atas segala bentuk ketidakadilan. Upaya semacam ini dapat dilakukan dengan mediasi yang melibatkan pihak ketiga (*third party*), disarankan orang atau pihak yang secara mendalam memahami kondisi sosial budaya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, untuk membangun kembali pemahaman dan sudut pandang baru tentang konflik, melatih kemampuan dalam membuat dan menjalankan prosedur untuk memelihara dan melanjutkan proses transformasi. *Kedua*, transformasi personil, yaitu pembentukan pemahaman mengenai isu-isu konflik sekaligus memberi pengakuan terhadap legitimasi kelompok lain, munculnya rasa tanggung jawab atas sebab munculnya konflik, menghargai serta mengakui perspektif dan tujuan pihak lain, mampu dan cakap dalam mencari solusi, simpati dan mau mendengar keluhan juga trauma masa lalu, bersikap inklusif, dan mengedepankan penyelesaian secara bersama. *Ketiga*, transformasi

⁵⁵ Ramsbotham, O., Woodhouse, T., Miall, H, *Contemporary Conflict Resolution*, (UK: Polity Press, 2011).

⁵⁶ Mitchell, C, *op. cit.*, hlm. 12-25.

struktur, misalnya perubahan sistem politik dari terpusat menjadi desentralisasi. *Keempat*, transformasi hubungan, terwujudnya perubahan hubungan dari konfliktual menjadi harmonis, dari destruktif menjadi konstruktif.⁵⁷

Lederach (2003) melengkapi aspek-aspek transformasi yang diinisiasi oleh Mitchell ke dalam bentuk transformasi yang dirumuskannya sendiri,⁵⁸ yaitu: 1) transformasi personal, berupa perubahan pada diri individu yang meliputi aspek kognitif, emosi, persepsi, dan spiritual; 2) transformasi relasional, yaitu perubahan bentuk dan pola komunikasi serta interaksi yang dipengaruhi oleh konflik, dengan cara meminimalisir komunikasi yang tidak berfaedah serta meningkatkan rasa saling percaya dan saling memahami; 3) transformasi struktur, merujuk pada pola dan cara bagaimana masyarakat mengatur juga membangun hubungan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan institusi dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok (dasar) manusia, serta menyediakan akses yang merata terhadap sumber daya, dan terakhir bagaimana seharusnya membuat keputusan yang dapat mempengaruhi dan berdampak luas terhadap suatu kelompok, komunitas maupun masyarakat secara keseluruhan; 4) transformasi budaya, perubahan pola budaya yang mendorong ke arah destruktif menjadi budaya yang bersifat konstruktif bagi pengendalian konflik dan pemeliharaan perdamaian (**Tabel 2.4**).

Vayrynen (1991) menambahkan 2 aspek baru yang harus ditransformasikan, yaitu: 1) transformasi konteks, adalah perubahan yang dilekatkan dalam konteks sosial, regional, dan internasional. 2) transformasi aktor, merujuk pada perubahan kepemimpinan, merumuskan kembali arah tujuan, kepentingan, nilai, dan keyakinan baru.⁵⁹

⁵⁷ Zainal, Suadi, *op. cit.*, hlm, 85.

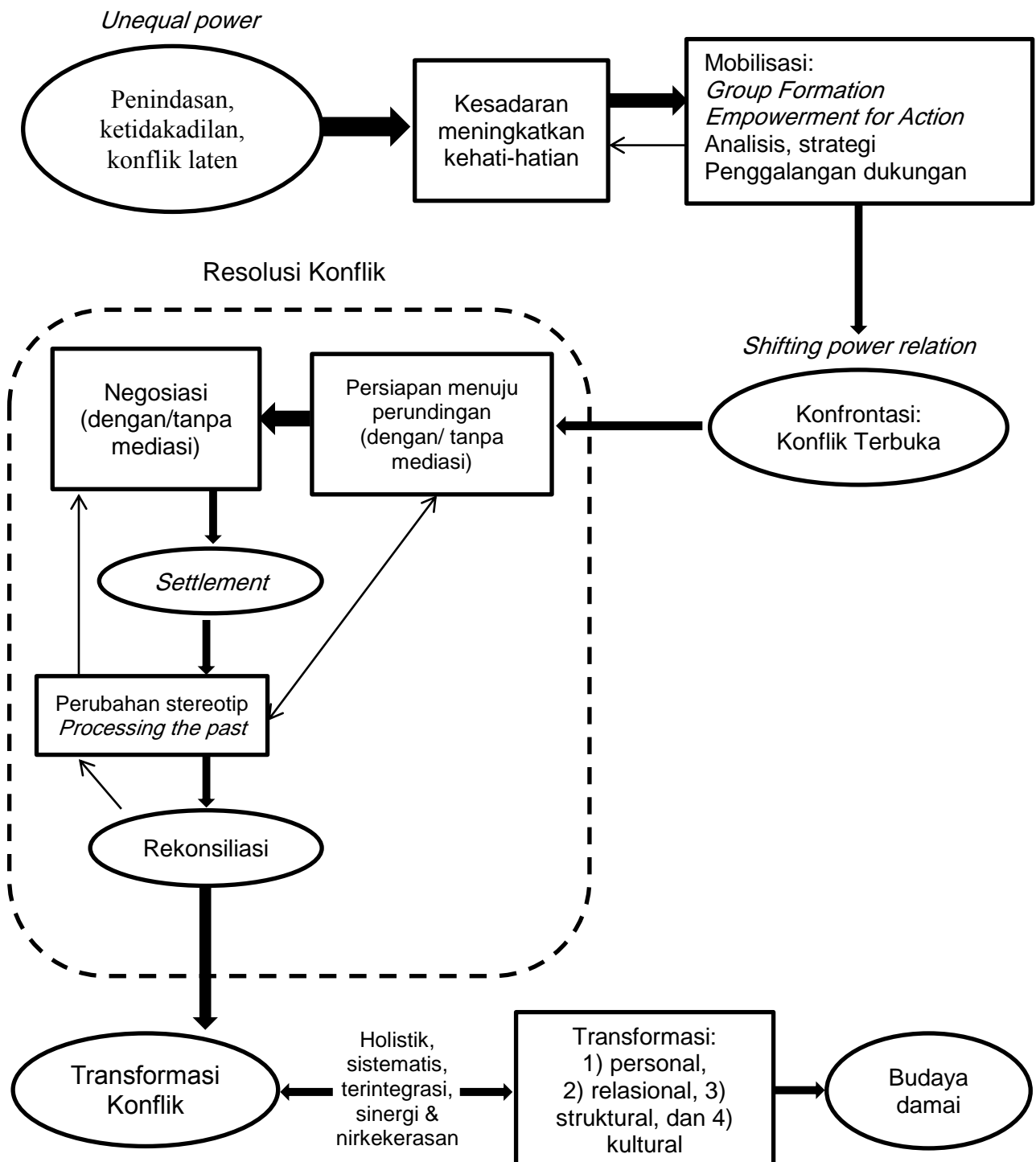
⁵⁸ Lederach, J. P. *The Little Book of Conflict Transformation*, (STL: Distribution North America, 2003), hlm. 24-27, dalam Zainal, Suadi, *op. cit.*, hlm, 85-86.

⁵⁹ Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse, *Resolusi Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, Edisi terjemah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 250-251.

Peneliti dalam hal ini, menggunakan empat elemen transformasi konflik yang dirumuskan oleh Lederach dalam menganalisis upaya transformasi konflik di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan. Keempat pola transformasi tersebut adalah transformasi struktural, relasional, personal, dan kultural. Keempat aspek transformasi di atas, akan memberikan gambaran bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam mengusahakan pembangunan perdamaian dan pemeliharaan hubungan yang konstruktif paska terjadinya konflik kekerasan pada 28-29 Oktober 2012 di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan.

Tabel 2.4 Teori Transformasi Konflik		
Teori	Variabel	Indikator
Transformasi Konflik	Transformasi Personal	1) Perubahan sikap 2) Perubahan perilaku
	Transformasi Relasional	1) Pola komunikasi 2) Kerja sama 3) Pembuatan keputusan 4) Mekanisme penanganan konflik
	Transformasi Struktural	1) Kondisi sosial (Kata kunci: disparitas, ketidaksetaraan, diskriminasi rasial, agama, dan etnik) 2) Pola prosedural (Kata kunci: kurangnya transparansi, kesetaraan, akses, partisipasi, keadilan) 3) Pola institusional (Kata kunci: kurangnya akses, pola sejarah)
	Transformasi Kultural	1) Penggunaan pola dan sumber daya kultural
Sumber: Diolah dari berbagai sumber		

Gambar 2.3 Pola Transformasi Konflik



Sumber: Francis, Diana. 2002. *People, Peace, and Power: Conflict Transformation in Action*, London: Pluto Press.

2.1.3 Teori Identitas Sosial

Identitas memainkan peran yang sangat vital dalam konflik sosial. Identitas juga merupakan basis fundamental bagaimana cara seorang individu atau kelompok melihat dan memahami diri mereka dalam situasi konflik.⁶⁰ Identitas dapat menggambarkan siapa “kita” dan siapa “mereka”, mampu memobilisasi individu dan kelompok, serta memberikan legitimasi dan justifikasi atas aspirasi seseorang atau kelompok.⁶¹

Ho-Won Jeong (2010) dalam bukunya yang berjudul, “*Conflict Management and Resolution*”, memperkuat pendapat di atas bahwa dalam situasi konflik, formasi identitas dibentuk oleh konteks permusuhan antar kelompok. Menguatnya kohesivitas dan soliditas dalam suatu kelompok akan membangun eksklusivitas yang merangsang munculnya rasa keterancaman (*security dilemma*, dalam bahasa peneliti) terhadap kelompok lain sehingga dapat mendorong pada arah permusuhan. Dampaknya adalah identitas kemudian dijadikan sebagai komoditas atau sumber yang paling efektif untuk memobilisasi kelompok karena dirasa adanya ketidakadilan serta perampasan hak dalam sebuah persaingan.⁶²

Tajfel (1981) merumuskan identitas sosial sebagai bagian dari konsep diri yang datang dari keanggotaan dalam sebuah kelompok bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dalam keanggotaan tersebut.⁶³ Secara lebih sistematis Tajfel dan Turner (1979) menetapkan tiga komponen utama pembentuk identitas sosial, (**Lihat tabel 2.5**) yaitu:

Pertama, identifikasi sosial adalah suatu proses dimana individu memasukkan atau mengasosiasikan dirinya dengan kelompok tertentu sebagai hasil dari identifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Identitas

⁶⁰ Celia Cook-Huffman, The role of identity in conflict, lihat *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*, Edited by Dennis J. D. Sandole et.al., (New York: Routledge, 2011), hlm. 19-30.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Identitas biasanya digolongkan berdasarkan etnik, suku, kelas, kasta, jender, dan ras, sering digunakan sebagai legitimasi dan justifikasi terhadap ketidakadilan distribusi sumber daya dan serta penindasan secara politik, hlm. 59, lihat Jeong, Ho-Won, *Conflict Management and Resolution: an Introduction*, (New York: Routledge, 2010), hlm. 60.

⁶³ Turner, H. *Social Stereotypes and Social Groups*, dalam J.C. Turner and H. Giles (eds.) *Inergroup Behaviour*, (Oxford: Basil Blackwell, 1981).

kolektif ini, baik berdasarkan etnis, agama, status sosial, maupun ras, kemudian disebut sebagai “*in-group*”. Sedangkan mereka yang berada di luar golongan dan mengancam identitas kelompoknya disebut sebagai “*out-group*”.⁶⁴

Kedua, Kategorisasi sosial, adalah pembagian individu berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, kelas, pekerjaan dan lainnya.⁶⁵ Sarwono (2007) mengutip Turner (1985) bahwa kategorisasi adalah sebuah proses penyederhanaan dunia sosial yang dilakukan oleh individu dengan cara mengklasifikasikan objek-objek dan peristiwa yang memiliki karakteristik yang sama ke dalam satu golongan kelompok tertentu. Pada umumnya seseorang membagi dunia sosialnya ke dalam dua kategori yaitu, “kita” disebut sebagai *in-group* dan “mereka” sebagai *out-group*.⁶⁶

Ketiga, komparasisasi yaitu suatu tahapan dimana suatu kelompok akan membandingkan antara kelompoknya dengan kelompok lainnya. Dalam proses membandingkan, biasanya terjadi *ingroup favoritism* dan *favourable bias* terhadap kelompoknya sendiri, sementara memandang kelompok lain selalu dalam posisi yang negatif.⁶⁷

Setidaknya terdapat tiga bentuk perilaku sosial menurut Teori Identitas Sosial sebagai dampak dari pembentukan identitas,⁶⁸ yaitu, 1) stereotip, adalah bias persepsi yang menyebabkan suatu penilaian bersifat subjektif, tidak berdasar dan kurang cermat, biasanya cenderung dipukul rata pada setiap anggota kelompok tanpa mengindahkan keunikan

⁶⁴ Sarwono, S.W., *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok, dan Psikologi Terapan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

⁶⁵ Tajfel, H., *Social Identity and Intergroup Relation*, (New York: Cambridge University Press, 1982).

⁶⁶ Sarwono, S.W., *Psikologi Prasangka Orang Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

⁶⁷ Kusumowardhani, Retno Pandan Arum, et.al., “Identitas Sosial, Fundamentalisme, dan Prasangka terhadap Pemeluk Agama yang Berbeda: Perspektif Psikologis,” *Harmoni Jurnal Multikultur & Multireligius*, Vol. 12 (1), 2013, hlm. 22.

⁶⁸ Penjelasan ini disampaikan dalam sesi perkuliahan *Nature of Conflict* di Kelas DRK, Universitas Pertahanan oleh Dr. Ichsan Malik yang merupakan Ketua IM Center untuk Dialog dan Perdamaian, anggota Tim Kerja Dialog dan Media GPPAC jaringan Asia Tenggara, yang juga merupakan Dosen Prodi Damai dan Resolusi Konflik di Universitas Pertahanan.

individu. Akibat adanya bias persepsi (stereotip) yang tidak berdasar tersebut, maka muncullah apa yang disebut sebagai prasangka/*prejudice*;⁶⁹ 2) prasangka, merupakan sikap negatif baik terhadap individu atau kelompok, semata-mata karena keanggotaannya dalam sebuah kelompok, aliran atau golongan tertentu, sehingga terjadi penyimpangan dalam sudut pandang dan nilai dari fakta yang sebenarnya. Dampak dari prasangka akan cenderung bersifat negatif jika sasaran prasangka adalah kelompok minoritas baik dilihat dari segi kuantitas, yaitu jumlah, maupun kualitas, yaitu status. Selanjutnya, prasangka dimanifestasikan secara nyata dalam perilaku atau tindakan diskriminasi; 3) diskriminasi, yaitu perilaku negatif terhadap anggota kelompok *liyan (outgroup)* hanya karena status keanggotaan individu yang bersangkutan dalam kelompok tersebut.

Peneliti akan menggunakan Teori identitas sosial (Tajfel dan Turner) untuk menjelaskan bagaimana identitas menjadi sumber konflik antara pendatang (Bali) dan penduduk lokal Lampung di Balinuraga, Way Panji Lampung Selatan, tanggal 28-29 Oktober 2012. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana teori identitas sosial ini dapat menjelaskan fenomena mobilisasi massa (suku Lampung) dari berbagai kabupaten di Provinsi Lampung yang secara bersama-sama melakukan penyerangan secara sporadis terhadap etnik Bali di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan pada 28-29 Oktober 2012.

Terakhir, peneliti menggunakan teori identitas sosial sebagai alat analisis untuk mengungkapkan bahwa identitas tidak hanya menjadi sumber komoditas konflik tetapi juga menjadi instrumen bagi terwujudnya integrasi sosial, melalui pembangunan identitas bersama yang baru, dan dibentuk baik melalui dimensi budaya, agama, atau nilai-nilai kearifan lokal dari kedua etnik yang bersifat universal dan disepakati bersama.

⁶⁹ Malik, Ichsan, *op. cit.* hlm. 31.

Tabel 2.5 Teori Identitas Sosial		
Teori	Variabel	Indikator
Identitas Sosial	Identifikasi Kategorisasi Komparasi	1) Demografik 2) Komponen Kognitif (kesadaran tentang keanggotaan dirinya dalam suatu kelompok) 3) Komponen Evaluatif (Evaluasi seseorang di dalam kelompok dan keanggotaan seseorang di dalamnya) 4) Komponen Emosional (perasaan memiliki atau tidak atas kelompoknya) 5) <i>Ingroup favoritism</i> 6) <i>Favourable bias</i>
Sumber: Diolah dari berbagai sumber		

2.1.4 Teori Kerja Sama

Peneliti menggunakan teori kerja sama untuk menganalisis bentuk hubungan yang dibangun oleh warga pendatang Bali dan penduduk lokal Lampung di Lampung Selatan dalam proses transformasi relasional, paska konflik kekerasan 27-29 Oktober 2012. Apakah transformasi relasional diwujudkan dalam bentuk kerja sama (kooperatif) atau justru sebaliknya, yaitu persaingan (kompetitif).

Teori kerja sama dan persaingan dipopulerkan oleh Morton Deutsch (1949) dan David W. Johnson.⁷⁰ Teori ini lahir dari rahim psikologi sosial dan dikembangkan oleh Morton Deutch. Ilmuwan evolusi sosial berargumen bahwa sikap *altruisme* dan kerja sama merupakan produk yang dihasilkan melalui sejarah “konflik antar kelompok dan perang”,⁷¹ yang telah membentuk psikologis dan bentuk perilaku manusia.⁷² Tahapan yang terjadi, biasanya manusia akan secara spontan membuat kategorisasi yang mengklasifikasikan antara “*we and others*” atau “*ingroup and outgroup*”. Kategorisasi semacam ini dengan cepat menumbuh-

⁷⁰ Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1989). *Cooperation and competition: Theory and research*. Edina, MN: Interaction Book Co. Johnson, D. W., & Smith, K.A. 1998b.

⁷¹ Alexander, R. D. *The Biology of Moral Systems*. (London: Aldine, 1987).

⁷² Vugt, M. V., Gremer, D. D., & Janssen, S. P. Gender Differences In Cooperation and Competition. Research Report, Association For Psychological Science, 18 (1), 2007, hlm, 19-23.

semikan emosionalitas suatu kelompok terhadap kelompok lain, bahkan saat identitas keanggotaan hanya didasarkan pada kriteria yang sederhana.⁷³ Pada level inilah manusia akan cenderung bersikap diskriminatif terhadap anggota kelompok lain (*outgroup*), dan sebaliknya akan bersikap *altruistik* untuk membela kelompok mereka (*ingroup*).

Kerja sama dalam pandangan Roucek dan Warren, sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi, adalah usaha bersama yang dilakukan oleh dua atau lebih orang dalam menyelesaikan dan mengerjakan tugas guna mencapai tujuan dan kepentingan bersama yang lebih besar (*common goal or interest*).⁷⁴ Sargent (dalam Santosa, 1992) menjelaskan kerja sama sebagai usaha yang terkoordinasi dengan baik antar anggota kelompok atau masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.⁷⁵

Menurut Charles Horton dalam Abdulsyani (2004) bahwa kecenderungan manusia untuk melakukan kerja sama biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa hal,⁷⁶ diantaranya: 1) adanya kesadaran memiliki kesamaan dalam tujuan dan kepentingan. Pada saat yang sama, pihak-pihak tersebut memiliki kecakapan yang baik dalam pengetahuan dan pengendalian terhadap diri (*self control*), sehingga untuk mencapai kepentingan dan tujuan tersebut dilakukan melalui jalan kerja sama; 2) adanya dukungan dari berbagai lembaga, organisasi, atau institusi menjadi unsur dan fakta penting dalam membangun hubungan kerja sama **(Tabel 2.6)**.

Diantara cara membangun kerja sama adalah dengan menentukan tujuan bersama (*superordinate goal*), menghargai perbedaan pendapat,

⁷³ Dudija, Nidya, "Cooperative vs Competitive: Filosofi Keseimbangan "Yin-Yang" dalam Hubungan Interdependency", *Buletin Psikologi*, Vol. 23 (2), 2015, hlm. 65-81.

⁷⁴ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 101.

⁷⁵ Lukita, *et al*, "Teori Kerja sama dan Persaingan Kelompok", dalam [https://imadiklus.com/teori-kerja sama-dan-persaingan-kelompok/](https://imadiklus.com/teori-kerja-sama-dan-persaingan-kelompok/); diakses pada 14 Agustus 2018.

⁷⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 156.

membuat sebuah pesan yang positif, interdependensi, serta keterampilan dalam menangani kemungkinan terjadinya konfrontasi atau konflik.

Tabel 2.6 Teori Kerja Sama		
Teori	Variabel	Indikator
Kerja sama	Kepentingan bersama Tujuan yang lebih besar	1) Kesadaran adanya kepentingan bersama yang lebih besar 2) Motivasi untuk bekerja sama
Sumber: Diolah dari berbagai sumber		

2.1.5 Konsep *Structural, Accelerator and Trigger (SAT)*

- 1) Faktor Struktural (*Structural Factors*) adalah faktor-faktor struktural atau 'latar belakang' yang menciptakan pra-kondisi konflik sosial. Faktor-faktor ini bisa meliputi eksklusi politik secara sistematis, kesenjangan ekonomi yang inheren, ketiadaan institusi yang memadai dan responsif, pergeseran dalam hal keseimbangan demografis, kemerosotan ekonomi, dan kerusakan ekologis terhadap wilayah.⁷⁷ Dalam bukunya yang berjudul, "Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian", Ichsan Malik (2017) menganalogikan faktor struktural sebagai hamparan rumput kering (akar konflik) yang mudah terbakar jika sewaktu-waktu ada "Api" (*trigger*, yaitu elemen pemicu) yang menyambar.⁷⁸
- 2) Pempercepat (*Accelerator*) merupakan kejadian-kejadian di luar parameter-parameter model. Secara esensial akselerator merupakan kejadian-kejadian umpan-balik yang dengan cepat meningkatkan level signifikansi situasi umum yang paling mengandung kekerasan. Tetapi bisa juga Akselerator yang mempengaruhi kegagalan sistem atau perubahan-perubahan mendasar dalam kausalitas politik. Seringkali Akselerator juga dipahami sebagai katalisator dalam proses eskalasi konflik. Definsi akselerator Kejadian-kejadian yang tidak berhubungan

⁷⁷ Migdad, Muhammad *at al*, *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*, CEWERS, (Jakarta: Peace Through Development-BAPPENAS, 2012), hlm. 31-37.

⁷⁸ Malik, Ichsan, *op. cit.*, hlm. 234.

langsung dengan indikator-indikator penyebab konflik, akan tetapi bisa meningkatkan secara cepat proses eskalasi atau *de-eskalasi* konflik.⁷⁹ Dalam terminologi Ichsan Malik (2017) akselerator ini diibaratkan sebagai katalisator atau angin panan yang dapat menyebarkan konflik ke segala arah.⁸⁰ Masih menurut Ichsan (2017) bahwa akselerator merupakan manifestasi suatu reaksi yang muncul sebagai akibat dari terjadinya konflik.

Contoh dari akselerator adalah sebagai berikut: *Pertama*, Kebijakan pemerintah yang diskriminatif. *Kedua*, Konflik bersenjata/kekerasan antar kelompok. *Ketiga*, Peningkatan dukungan eksternal terhadap salah satu kelompok. *Keempat*, Peningkatan ukuran dan kohesi kelompok *vis a vis* kelompok lainnya. *Kelima*, Peningkatan teknik-teknik kekerasan sebagai instrumen konflik. *Keenam*, Peningkatan bentuk-bentuk agresivitas (*Aggressive posturing*). *Ketujuh*, Meningkatnya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap “integritas hidup” manusia (*life integrity violations*).

- 3) Pemicu (*Trigger*) adalah kejadian tiba-tiba yang memicu pecahnya konflik. Dalam bahasa yang mudah dipahami Ichsan Malik (2017) secara sederhana menganalogikan *trigger* sebagai elemen “api” yang dapat menyambar dan menghancurkan “hamparan rumput kering” (elemen struktural). Biasanya *trigger* muncul secara tiba-tiba dalam rangkaian kejadian konflik.⁸¹ Contoh dari Pemicu adalah pembunuhan tokoh penting, kecurangan dalam pemilihan umum, dan skandal politik. Sebagai misal, pembunuhan tokoh atau pemimpin kelompok tertentu, perusakan simbol-simbol identitas dan lain sebagainya. Pemicu bersifat jangka pendek dan sporadis (**Lihat tabel 2.7**).⁸²

Peneliti menggunakan model analisa SAT ini untuk memudahkan dalam melakukan pemetaan konflik di Balinuraga Kecamatan Way

⁷⁹ Migdad, Muhammad *at al*, *loc. cit.*

⁸⁰ Malik, Ichsan, *loc. cit.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Migdad, Muhammad *at al*, *loc. cit.*

Panji Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan faktor konfliknya, yang mencakup tiga elemen utama, yaitu 1) akar konflik atau faktor struktural; 2) akselerator; dan terakhir 3) faktor pemicu. Ketiga elemen ini akan sangat membantu peneliti untuk memahami situasi atau prakondisi yang mendorong eskalasi dan de-eskalasi konflik kekerasan yang terjadi di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan.

Tabel 2.7 Konsep SAT		
Konsep	Variabel	Indikator
SAT	Struktural	1) Disparitas akses dan kontrol sumber daya 2) Kebijakan yang diskriminatif 3) Kesewenangan dalam pengambilan keputusan
	Akselerator	1) Menyebarkan konflik ke segala arah (Konflik bersenjata/kekerasan antar kelompok, Peningkatan dukungan 2) eksternal terhadap salah satu kelompok, kohesi kelompok <i>vis a vis</i> kelompok lainnya dan meningkatnya bentuk-bentuk pelanggaran 3) terhadap “integritas hidup” manusia)
	<i>Trigger</i>	1) kejadian tiba-tiba yang memicu pecahnya konflik (pembunuhan tokoh penting, kecurangan dalam pemilihan umum, dan skandal politik)
Sumber: Diolah dari berbagai sumber		

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan analisis permasalahan yang berkaitan dengan konflik dan kekerasan komunal yang melibatkan komunitas pendatang Bali dan Penduduk lokal Lampung di Balinuraga, Lampung Selatan, ada sejumlah tulisan yang relevan, baik yang didasarkan pada hasil penelitian maupun studi kepustakaan yang digunakan sebagai bahan komparatif terkait dengan penelitian ini. Setidaknya terdapat lima tulisan yang memiliki pertautan erat dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses penelitian tesis ini, yaitu:

Pertama, penelitian Intan Fitri Meutia (2016) dalam thesis-nya yang berjudul, “*The Implementation of Community Policing in Indonesia*,” dengan mengambil studi kasus konflik etnik di Indonesia: Lampung VS Bali, Oktober 2012. Pengambilan data dilakukan secara kualitatif, dalam bentuk studi etnografi dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumenter, yang dilakukan dengan sengaja (*purposive*). Teori yang digunakan adalah teori etnik konflik dan teori pemolisian masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Intan (2016) menekankan pada peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dalam menangani konflik etnik di Lampung Selatan melalui proses pencegahan, mediasi, dan rekonsiliasi yang juga melibatkan seluruh elemen baik, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat untuk mendorong tercapainya kesepakatan atau perjanjian damai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemolisian masyarakat pada akhirnya membutuhkan partisipasi aktif dari kepolisian dan masyarakat. Melalui program pemolisian masyarakat, polisi diharapkan mampu memberikan peringatan dini apabila ada ancaman yang mengganggu kepada masyarakat. Selain itu, dalam pecegahan konflik etnik di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan, Bhabinkamtibamas dan FKPM menggunakan pendekatan kearifan lokal *rembug pekon* untuk meningkatkan kesadaran dan pengembangan masyarakat.⁸³

Kedua, tulisan Eva Achjani Zulfa (2014) yang berjudul “*Balinuraga-Lampung: Identity Conflict Behind the Policy*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kemudian pengumpulan data dilakukan melalui *interview* dan observasi lapangan. Alat analisis konflik yang digunakan adalah teori konflik budaya. Hasil penelitian Zulva (2014) mengungkap bahwa, konflik Balinuraga bukan semata-mata konflik agama, melainkan konflik yang ditimbulkan karena penduduk Bali yang berjuang mempertahankan

⁸³ Meutia, Intan Fitri, “The Implementation of Community Policing in Indonesia”, *Thesis Doktoral*, (Jepang: Kanazawa University, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies, 2016).

identitasnya disana. Isu agama hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang atau oknum yang berniat ingin memperkeruh konflik.⁸⁴

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian terdahulu di atas terletak pada fokus dan teori penelitian yang digunakan. Peneliti dalam penelitiannya fokus pada upaya transformasi konflik yang dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga maupun masyarakat dalam mentransformasikan hubungan yang konflikual berubah menjadi hubungan damai yang berkelanjutan. Sebagai alat analisis, peneliti menggunakan teori transformasi konflik, teori identitas sosial, konsep SAT, konsep Segitiga ABC konflik Galtung dan model eskalasi dan deeskalasi konflik.

Ketiga, referensi berikutnya adalah Bayu Sujadmiko⁸⁵ dan Intan Fitri Meutia⁸⁶ dalam penelitiannya yang berjudul, "*Balinese Vs Lampungnese: Measuring ADR Applicability to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia*". Hasil penelitian Sujadmiko dan Meutia (2015) menemukan fakta bahwa kemunculan konflik Balinuraga hanya dipicu oleh kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pemuda Balinuraga dan dua remaja gadis asli Lampung. Eskalasi konflik yang semakin membesar disebabkan adanya provokasi di tengah-tengah kegeraman penduduk Lampung terhadap warga Bali, yang selanjutnya mendorong ke arah terjadinya perang antar suku Bali dan Lampung pada 29 Oktober 2012 di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan. Upaya resolusi dilakukan melalui jalan mediasi dengan mempertemukan kedua etnik yang terprovokasi. Pemerintah dalam hal ini berusaha mengembangkan konsep keadilan restoratif sebagai doktrin perubahan sosial. Model yang dikembangkan untuk mendukung terciptanya keadilan restoratif adalah *Alternative Dispute Resolution*

⁸⁴ Zulfa, Eva Achjani, "Bali Nuraga-Lampung: Identity Conflict Behind the Policy", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 11, (2014), hlm. 261-279.

⁸⁵ Bayu Sujadmiko, Ph.D, Mahasiswa pada Human, Socio and Environmental Studies, Kanazawa University, Jepang. penelitiannya berfokus pada hukum internasional dan resolusi konflik dan hukum perdata.

⁸⁶ Intan Ftri Meutia adalah Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung, Indonesia. Intan konsern terhadap kebijakan publik, *civilian police management* dan *sociological movement*.

(ADR) sebagai konsep penyelesaian konflik yang simpel tanpa menciderai nilai-nilai keadilan. Konsep ADR ini menuntut partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun kelompok masyarakat untuk secara aktif ikut berperan dalam penyelesaian masalah bersama demi menghasilkan solusi yang “*win-win solution*.” Dalam hal ini, ADR yang dikembangkan di Lampung, misalnya penyelesaian masalah melalui mekanisme *rembug pekon*.⁸⁷

Baik dari segi fokus maupun subfokus serta teori penelitian yang digunakan, penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti fokus pada upaya transformasi konflik, yaitu bagaimana hubungan baru kembali dibangun, baik melalui transformasi kultural maupun struktural.

keempat, penelitian berikutnya dilakukan oleh Bethra Ariestha (2012) yang berjudul “Akar Konflik Kerusakan antar Etnik di Lampung Selatan.”⁸⁸ Desain penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui *indepth interview* secara langsung dengan narasumber dari kedua belah pihak, didukung dengan data tambahan berupa dokumentasi. Ariestha menjelaskan bahwa fenomena konflik Balinuraga, Lampung Selatan, berawal dari konflik antar desa yang bereskalasi menjadi konflik antar suku, Bali dan Lampung. Penelitian ini hanya fokus pada upaya pencarian akar masalah konflik mutietnik di Balinuraga. Hasil penelitian Ariestha (2012) menyimpulkan bahwa faktor utama pemicu terjadinya konflik adalah sikap warga Bali (Balinuraga) dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang dianggap menciderai *pi'il* dan tidak sesuai dengan adat istiadat warga pribumi Lampung, karena keengganan komunitas Bali untuk membaurkan dirinya dengan adat dan budaya penduduk lokal, serta kokoh dalam mempertahankan adat dan budaya tempat asalnya, Bali.

⁸⁷ Sujdmiko, Bayu dan Intan Fitri Meutia, “Balinese Vs Lampungnese: Measuring ADR Applicability to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia”, *12 US-China L. Rev.* 91 (2015).

⁸⁸ Ariestha, Bethra, “Akar Konflik Kerusakan Antar Etnik di Lampung Selatan”, *Journal of Sociological and Industrial Psychology*, Vol. 1 (2), 2012, hlm. 7-13.

Penelitian selanjutnya yang masih relevan dalam membahas konflik Balinuraga antara pendatang Bali dan penduduk lokal Lampung adalah penelitian Abdan Khubban yang berjudul “*Judicial Review Spread Hatred of Race: Case Study Riot Balinuraga-South Lampung.*” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridical normative* dalam kerangka resolusi konflik sosial. Data penelitian berasal dari materi hukum primer, terutama UU no 7 tahun 2012, buku literatur, jurnal dan hasil penelitian. Abdan menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dalam manajemen dan pencegahan konflik harus ditekankan untuk tujuan pencapaian integrasi antar etnik di Indonesia. Dengan demikian, segala bentuk usaha penyebaran kebencian terhadap suku tertentu baik dalam bentuk kata maupun perbuatan dapat dihindari melalui kriminalisasi penyebaran ujaran kebencian.⁸⁹

Dari beberapa penelitian terdahulu yang disajikan di atas, masih sangat minim bahkan bisa dikatakan belum ada peneliti yang membahas tentang upaya transformasi konflik baik oleh pihak pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat pasca terjadinya konflik kekerasan antara pendatang Bali dan penduduk lokal Lampung di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan. Maka dari itu, peneliti merasa penting dan perlu untuk melakukan penelitian ini sebagai upaya menemukan pola resolusi konflik yang baik, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lampung Selatan, untuk memelihara dan membina hubungan yang baru agar terwujud perdamaian positif yang berkelanjutan.

⁸⁹ Khubban, Abdan, “Judicial Review Spread Hatred of Race: Case Study Riot Balinuraga-South Lampung”, *International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER)*, Vol. 2 (4), 2014, hlm. 126-131.

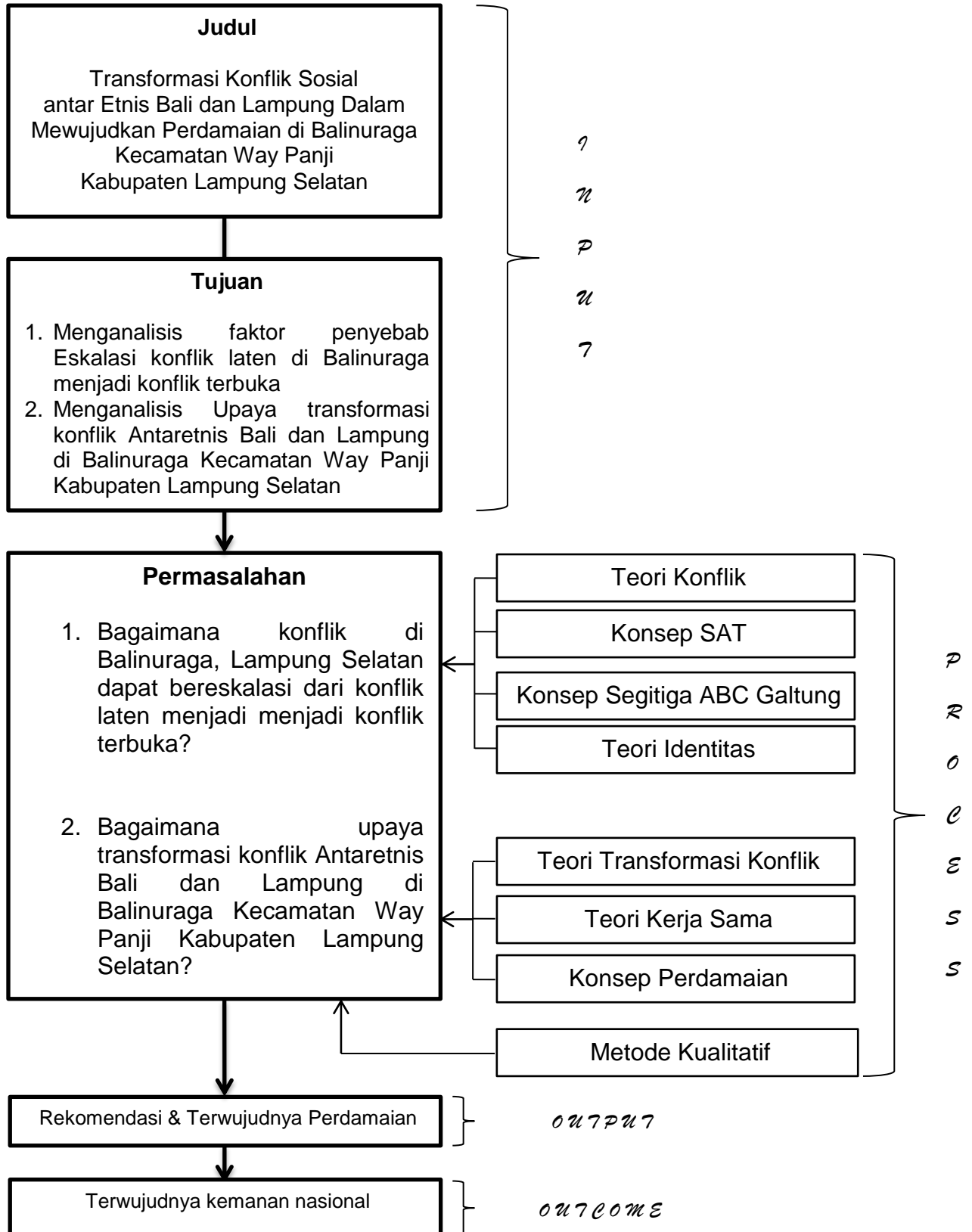
Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu

No.	Tahun dan Jurnal	Nama, Judul dan Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	2016 <i>Thesis Doktoral,</i> (Jepang: Kanazawa University, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies, 2016)	Intan Fitri Meutia, <i>The Implementation of Community Policing in Indonesia</i> (metode: kualitatif)	Penelitian yang dilakukan oleh Intan (2016) menekankan pada peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dalam menangani konflik etnik di Lampung Selatan melalui proses pencegahan, mediasi, dan rekonsiliasi yang juga melibatkan seluruh elemen baik, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat untuk mendorong tercapainya kesepakatan atau perjanjian damai.	Memiliki objek (konflik Balinuraga) dan metode penelitian yang sama.	Fokus penelitian yang berbeda. Meutia lebih menekankan pada peran Bhabinkamtibmas dalam penerapan pemolisian masyarakat di Indonesia, sedangkan peneliti menekankan pada upaya transformasi konflik yang dilakukan pemerintah, lembaga dan masyarakat. Teori yang digunakan juga berbeda.
2	2015 12 US-China L. Rev. 91 (2015)	Bayu Sujadmiko dan Intan Fitri Meutia, <i>Balinese Vs Lampungnese: Measuring ADR Applicability to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia</i> (metode: kualitatif)	Upaya resolusi dilakukan melalui jalan mediasi dengan mempertemukan kedua etnik yang terprovokasi. Pemerintah dalam hal ini berusaha mengembangkan konsep keadilan restoratif sebagai doktrin perubahan sosial. Model yang dikembangkan untuk mendukung terciptanya keadilan restoratif adalah <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i> sebagai konsep penyelesaian konflik yang simpel tanpa mencederai nilai-nilai keadilan. Konsep ADR ini mendorong partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelesaian masalah untuk menghasilkan solusi bersama (<i>win-win solution</i>).	Memiliki objek (konflik Balinuraga) dan metode penelitian yang sama.	Fokus penelitian yang berbeda. Penelitian ini fokus pada upaya resolusi konflik melalui mekanisme ADR, sedangkan penelitian peneliti fokus pada upaya transformasi konflik yang menekankan pada perubahan hubungan personal, relasional, struktural dan kultural. Teori yang digunakan juga berbeda.

3	2014 <i>Jurnal Hukum Internasional</i> , Vol. 11, (2014)	Eva Achjani Zulfa, <i>Balinuraga-Lampung: Identity Conflict Behind the Policy</i> (Metode: Kualitatif)	konflik yang terjadi di Balinuraga, Lampung Selatan bukan semata-mata konflik agama, melainkan konflik yang ditimbulkan karena penduduk Bali yang berjuang mempertahankan identitasnya disana. Isu agama hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang atau oknum yang berniat ingin memperkeruh konflik.	Memiliki objek (konflik Balinuraga) dan metode peneltian yang sama.	Penelitian ini hanya berfokus pada upaya pencarian akar konflik, sedangkan peneliti berfokus pada upaya transformasi konflik. Teori yang digunakan juga berbeda.
4	2014 <i>International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER)</i> , Vol. 2 (4)	Abdan Khubban, Judical Review Spread Hatred of Race: Case Study Riot Balinuraga-South Lampung (pendekatan <i>juridical normative</i>)	Abdan menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dalam manajemen dan pencegahan konflik harus ditekankan untuk tujuan pencapaian integrasi antar etnik di Indonesia. Dengan demikian, segala bentuk usaha penyebaran kebencian terhadap suku tertentu dapat dihindari melalui kriminalisasi penyebaran ujaran kebencian.	Memiliki objek (konflik Balinuraga)	Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sebagai upaya penyelesaian konflik di Balinuraga, Lampung Selatan. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan transformasi konflik yang menekankan perubahan secara personal, relasional, struktural dan kultural.
5	2012 <i>Journal of Sociological and Industrial Psychology</i> , Vol. 1 (2)	Bethra Ariestha, Akar Konflik Kerusuhan antar Etnik di Lampung Selatan (metode: kualitatif)	Penelitian Ariestha di atas hanya berfokus pada upaya pencarian akar masalah konflik mutietnik di Balinuraga. Ariestha menemukan bahwa faktor utama pemicu terjadinya konflik adalah keengganan komunitas Bali untuk membaurkan dirinya dengan adat dan budaya penduduk lokal, serta kokoh dalam mempertahankan adat dan budaya tempat asalnya, Bali.	Memiliki objek (konflik Balinuraga) dan metode peneltian yang sama.	Penelitian ini berfokus pada upaya pencarian akar konflik di Balinuraga, sedangkan peneliti fokus pada upaya transfromasi konflik. Konsep dan teori yang digunakan juga berbeda.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.4 Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Berdasarkan studi kasus yang menjadi pokok pembahasan dalam tesis ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode dalam melakukan penelitian. Penelitian kualitatif, dalam buku “*Social Research Methode*” karya Alan Bryman (2004), dimaknai sebagai sebuah strategi penelitian yang lebih menitikberatkan pada pemakaian kata ketimbang penggunaan data-data kuantifikasi dalam proses analisis dan koleksi data.⁹⁰ Beberapa langkah penting dalam melaksanakan penelitian kualitatif adalah 1) menentukan pertanyaan umum penelitian (*general research questions*); 2) menentukan tempat dan subjek yang relevan dengan penelitian (*selecting relevant site(s) and subject*); 3) proses koleksi data yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian (*collection of relevant data*); 4) proses interpretasi data (*data interpretation*); 5) proses analisis menggunakan teori dan konsep (*conceptual and theoretical work*), selanjutnya memperkuat pertanyaan penelitian, dan melakukan pengumpulan data tambahan jika diperlukan; dan terakhir 6) menarasikan hasil temuan dan mencantumkan kesimpulan penelitian.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang telah ditentukan oleh seorang peneliti, berdasarkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Adapun lokus dan waktu penelitian (termasuk didalamnya tabel rencana jadwal penelitian) peneliti jelaskan pada anak sub bab di bawah ini, sebagai berikut.

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian dengan judul, “Transformasi Konflik Sosial Antar-Etnis Bali dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian di Balinuraga

⁹⁰ Alan Bryman, *Social Research Methods, Second Edition* (New York: Oxford University Press, 2004), hlm. 266-270.

Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan”, dilaksanakan di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan lokus utama terjadinya konflik kekerasan yang melibatkan suku Bali dan Lampung selama 3 hari, mulai dari tanggal 27 hingga 29 Oktober 2012. Kemudian, Desa Agom Kecamatan Kalianda, yang mayoritas penduduknya adalah warga asli Lampung. Penelitian juga dilakukan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, dan Bandar Lampung.

3.1.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan sejak Agustus 2018 hingga Oktober tahun 2018 pada lokus-lokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2018					Tahun 2019
		Bulan					Bulan
		Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pengambilan Data Penelitian						
2	Pengolahan Data penelitian						
3	Analisis Data Penelitian						
4	Pengujian Hasil Penelitian						
5	Sidang Pra Tesis						
6	Sidang Tesis						

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Pada sub bab ini, peneliti menjelaskan secara detail siapa yang menjadi subjek penelitian, berikut dengan alasan mengapa narasumber

tersebut dipilih sebagai informan utama dalam penelitian. Selanjutnya pada sub bab ini, peneliti juga mencantumkan objek apa yang menjadi pusat kajian dalam penelitian.

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber baik berupa informan atau benda yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti oleh seorang peneliti. Untuk memperoleh gambaran dan informasi secara komprehensif, maka peneliti tidak hanya dituntut untuk menggali informasi dari informan utama, tetapi juga melalui kompilasi catatan mengenai beragam kegiatan dan rekam jejak subjek terkait.⁹¹ Arikunto (2006) membahasakan subjek penelitian sebagai populasi.⁹²

Lebih lanjut, Margono (2004) mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan data yang relevan dan terkait dengan fokus penelitian, dalam ruang dan jangka waktu, yang telah ditentukan oleh seorang peneliti.⁹³ Dengan demikian, populasi cenderung berkaitan erat dengan data bukan pada manusianya. Sedangkan Kerlinger (dalam Furchan, 2004) berargumen bahwa populasi adalah bagian dari sekelompok manusia, peristiwa atau objek yang secara jelas sudah ditentukan oleh peneliti.⁹⁴ Dalam menentukan informan yang dijadikan sebagai sumber penggalian data, peneliti menggunakan dua teknik *sampling* yang masuk dalam

⁹¹ Rahardjo, Mudjia, "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya", *UIN Maulana Malik Ibrahim*, Malang, 2017, hlm. 11-12. Dari <file:///D:/Bismillah%20Thesis%20S2/metlit.pdf>; diakses pada 8 Agustus 2018.

⁹² Arikunto, S., *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

⁹³ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

⁹⁴ Furchan, A., *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

kategori *nonprobability sampling*⁹⁵, yaitu *purposive sampling*⁹⁶ dan *snowball sampling*.⁹⁷

Adapun informan yang menjadi subjek penelitian dalam tesis ini, diantaranya adalah:

1. Fajar Isnawan, selaku Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Lampung. Sebagai wakil pemerintah provinsi yang secara khusus bertugas pada lembaga penanganan konflik. Fajar cukup memahami pola karakter suku Bali dan suku Lampung. Sebagai pejabat senior di lingkungan Kesbangpol Provinsi Lampung, saat terjadi konflik Balinuraga, Fajar terjun langsung ikut berperan meredam konflik dengan mendampingi kedua belah pihak yang berkonflik, yaitu suku Bali dan Lampung, dalam sebuah program *tour* bersama ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Lampung demi mendinginkan dan mencairkan suasana pasca Konflik.
2. Kepala Bidang Linmas dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lampung Selatan, Trimujiyanto, S.IP, dianggap sebagai pihak yang kompeten dalam memberikan informasi terkait penanganan konflik sosial sekaligus sebagai lembaga pengumpul, pengolah data dan informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat agar tercipta ketentraman, keselamatan dan ketertiban.

⁹⁵ *Nonprobability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel.

⁹⁶ Teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (dalam, Sugiyono, 2001: 6). Juga merupakan pemilihan sekelompok subjek berdasarkan pada ciri-ciri tertentu dan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 128.

⁹⁷ Secara sederhana teknik ini merupakan cara penentuan subjek penelitian yang mulanya berjumlah kecil dan terbatas, kemudia sampel ini memilih dan merekomendasikan teman dan rekannya untuk dijadikan sebagai sampel. Dalam Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2001).

3. Bhabinkamtibmas Kepolisian Resort Lampung Selatan, Brigadir Polisi (Brigpol) Denni, sebagai aparat keamanan dan penegak hukum yang bertugas di wilayah konflik Way Panji, Lampung Selatan, memiliki kecakapan yang cukup baik dalam pengetahuan terkait kondisi keamanan di wilayah Way Panji, Lampung Selatan. Bhabinkamtibmas memiliki wawasan terkait upaya deteksi dini atas hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, selain itu mereka juga berperan dalam pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah keamanan dan ketertiban akan tercipta perdamaian yang berkelanjutan.
4. Kasi Intel Letkol INF. Edi Yanto, yang bersangkutan memiliki informasi yang cukup terkait upaya resolusi konflik sosial antar etnis di Balinuraga, karena Danrem 043/GATAM Kolonel (Czi) Almsyah Tarmizi (2012) pernah memfasilitasi kedua belah pihak yang terlibat konflik untuk bertemu dan melakukan rekonsiliasi, yaitu saling memaafkan dan membangun hubungan baru yang lebih baik.
5. Kepala Staf Kodim 0421, Mayor Inf. Agus Waluyo. Selaku pejabat militer di lingkungan Markas Komando Distrik Militer yang terletak di Kalianda, Lampung Selatan. Agus memiliki informasi terkait berbagai program serta upaya deteksi dan cegah dini pasca konflik yang dilakukan oleh militer melalui Babinsanya sebagai usaha preventif agar konflik Balinuraga tidak terulang kedua kalinya.
6. Dr. Hartoyo, seorang Sosiolog Universitas Lampung. Saat ini Hartoyo menjabat sebagai Sekertaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung. Hartoyo merupakan salah satu akademisi dan Sosiolog Universitas Lampung yang juga pernah melakukan penelitian dan mengkaji tentang konflik sosial antar etnis di Balinuraga, Lampung Selatan. Hartoyo menjadi salah satu informan dari akademisi, sebagai pembanding dari informasi yang diperoleh peneliti melalui obeservasi dan wawancara di lapangan.

7. Dr. Nina Yuda sebagai Kepala Pusat Studi Kebudayaan Lampung, Universitas Lampung. Nina sebagai doktor di bidang komunikasi antar budaya memiliki pengetahuan dan data yang cukup membantu, dalam menganalisis faktor-faktor penyebab konflik antaretnis yang terjadi di Balinuraga, terutama dalam sudut pandang komunikasi budaya.
8. Ketua Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) Lampung Selatan Dr. KH. A Rafiq Udin, S.Ag.,M.Si. Sebagai ketua FKUB Lampung Selatan, Rafiq Udin cukup berkompeten dalam memberikan informasi tentang sketsa kehidupan sosial keagamaan antar umat beragama di Lampung dan juga berperan dalam upaya transformasi hubungan paska terjadinya konflik di Balinuraga pada 27-29 Oktober 2012.
9. Isra Abdi selaku Camat Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan pihak sekaligus tokoh dari pemerintah kecamatan yang terjun secara langsung di lapangan pasca konflik Balinuraga, karena Isra mulai bertugas sebagai Camat Way Panji pada periode awal tahun 2013 hingga tahun 2018 saat peneliti melakukan *interview* dengan yang bersangkutan. Sebagai pejabat pemerintah setempat, Isra memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi dan karakter masyarakatnya terutama warga Bali di Balinuraga. Selaku pejabat pemerintah setempat, Isra juga memiliki kapasitas dalam menjelaskan berbagai program kecamatan terkait pembauran, rekonstruksi hubungan yang baru, serta upaya deteksi dan cegah dini agar konflik manifes antar suku tidak terulang kembali.
10. Camat Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Erdiansyah, S.IP. Sebagai pejabat publik di wilayah Kecamatan Kalianda, Erdiansyah memiliki kapasitas yang cukup baik dalam menjelaskan dan memberikan informasi terkait warga suku Lampung di Desa Agom. Selain itu, peneliti mengambil banyak

informasi terkait faktor penyebab konflik dan berbagai program yang dijalankan pasca konflik untuk mewujudkan kembali kondisi yang harmonis dan koeksisten antar suku terutama antara suku Bali dan Lampung di Lampung Selatan.

11. Kepala Desa Balinuraga, Made Santre. Saat terjadi konflik Balinuraga 29 Oktober 2012 Made terlibat dalam konflik secara langsung. Made menjadi salah satu tokoh Bali yang juga ikut berperan dalam proses mediasi kedua belah pihak. Sebagai Kepala Desa Balinuraga yang menjabat pada periode saat ini, Made tentu sangat paham dan mengetahui tentang sebab musabab terjadinya konflik, juga perubahan-perubahan hubungan baik sosial, budaya, agama dan ekonomi paska konflik di Balinuraga 28-29 Oktober 2012.
12. Kepala seksi (Kasi) pemerintahan Desa Agom Kecamatan Kalianda. Sebagai pejabat pemerintah desa yang mewakili masyarakat lokal Lampung tentu lebih mengetahui kronologis terjadinya konflik, dan mengetahui perubahan-perubahan hubungan baik sosial, budaya, agama dan ekonomi paska konflik di Balinuraga 28-29 Oktober 2012.

3.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel atau topik permasalahan menjadi pusat perhatian dalam sebuah kegiatan penelitian. objek dalam penelitian ini adalah “Transformasi Konflik Sosial Antar-Etnis Bali dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan”.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah proses dalam kegiatan penelitian untuk memperoleh semua data dan informasi yang dibutuhkan, sesuai dengan variabel atau sampel yang telah ditentukan peneliti demi mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

tiga teknik dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1) Wawancara

Lexy J. Moelong (2012) mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu.⁹⁸ Peneliti hendaknya membawa panduan berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah penelitian (pedoman wawancara), yang dijadikan sebagai acuan atau panduan saat melakukan proses wawancara narasumber, agar data dan informasi yang diperoleh tidak keluar dari pokok pembahasan dalam penelitian. Biasanya *interviewer* menggunakan alat bantu berupa *recorder* untuk memudahkan peneliti dalam proses transkrip wawancara selanjutnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang berkompeten dan memiliki kapasitas dalam memahami dan menjelaskan isu terkait keamanan, damai dan resolusi konflik. Diantara narasumber ada yang berasal dari unit kerja pemerintah yang membidangi penanganan konflik seperti kesbangpol, lembaga penegak hukum dan keamanan seperti polres, korem, dan kodim, serta forum-forum dibawah binaan kesbangpol seperti forum komunikasi antar umat beragama (FKUB).

Pada pelaksanaan wawancara di lapangan, peneliti bertatap muka secara langsung dengan subjek penelitian, sebagai upaya memahami pandangan yang dinarasikan oleh subjek atau informan atas permasalahan yang sedang diteliti.

2) Observasi

Observasi merupakan bagian dari proses pengumpulan data dimana peneliti melakukan sebuah pengamatan terhadap satu bidang

⁹⁸ Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm, 186.

penelitian tertentu.⁹⁹ Biasanya observasi dilakukan melalui pengamatan dan peninjauan secara langsung, di lapangan atau lokus penelitian yang telah ditentukan, terhadap objek yang diteliti untuk meng-*crosscheck* kebenaran dari semua data dan pengetahuan tentang objek penelitian yang ada sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Bali di Balinuraga dan penduduk lokal Lampung di Desa Agom, Lampung Selatan. Selanjutnya melakukan pengamatan terhadap kegiatan pemerintah kabupaten Lampung Selatan melalui lembaga di bawahnya yaitu kesbangpol, kemudian pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam melakukan upaya transformasi konflik di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan.

3) Dokumentasi

Dokumen memiliki makna yang beragam. Dokumen dapat diartikan sebagai kompilasi dari berbagai catatan peristiwa yang telah menjadi bagian dari sejarah masa lampau, dapat berupa gambar (seperti foto dan sketsa), tulisan (dalam bentuk artikel, jurnal, koran, opini, majalah, buku sejarah, biografi dan laporan), atau berwujud dalam sebuah karya seni, seperti lukisan, monumen, dan patung. Sedangkan dokumentasi sendiri merupakan sebuah proses pengumpulan berbagai macam data yang tersedia agar disinkronisasi sesuai kebutuhan penelitian. Dokumentasi ini peneliti jadikan sebagai sumber data koplementer selain melalui wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen berupa foto tentang sketsa kehidupan di Balinuraga, Lampung Selatan. Selain itu, data-data tertulis berupa buku, artikel, jurnal, majalah, koran dan literatur lainnya, baik dalam format digital atau tulisan, yang relevan dengan kajian dalam penelitian, serta data-data

⁹⁹ Melanie Bryant, "Conducting Observational Research," Swinburne Business School. Dari https://www.deakin.edu.au/data/assets/pdf_file/0004/681025/Participant-observation.pdf; diakses pada 15 Agustus 2018.

tertulis dari kesbangpol terkait kebijakan penyelesaian konflik oleh pemerintah, agar penyajian data dalam penelitian lebih valid dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah sebuah proses yang dilakukan agar hasil penelitian yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan sangat berkaitan erat dengan validitas dalam sebuah penelitian. Validitas merupakan salah satu kekuatan dari penelitian kualitatif yang biasanya didasarkan pada sudut pandang peneliti, partisan dan pembaca, yaitu apakah data, informasi dan temuan yang disajikan akurat atau tidak.¹⁰⁰ Peneliti menggunakan triangulasi, *member checking*, dan *prolonged time* sebagai *tool* atau teknik untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini.

1) Triangulasi

Triangulasi merupakan suatu metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, bertujuan untuk meng-*crosscheck* atau sebagai pembanding data dalam rangka menguji validitas dan keabsahan sebuah penelitian. Triangulasi sendiri terbagi kedalam tiga teknik, yaitu:

a) Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data biasanya digunakan untuk menguji derajat kebenaran dan validitas sebuah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, melakukan perbandingan terhadap data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan fakta di lapangan, membandingkan data atau informasi dari dokumen tertulis dengan data hasil wawancara, serta membandingkan data hasil wawancara pemerintah dengan hasil wawancara akademisi.¹⁰¹

¹⁰⁰ Creswell, John W., *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi 4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 269.

¹⁰¹ Moleong, L. J, *Op. Cit.*, hlm. 330.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian keabsahan data penelitian melalui proses perbandingan teknik, misalnya peneliti ingin menguji reliabilitas data A menggunakan teknik A, B, dan C.

c) Triangulasi Waktu

Kredibilitas sebuah data tidak jarang dipengaruhi oleh waktu pengambilan data penelitian. Misalnya saja, data wawancara yang diambil pada waktu pagi, siang atau sore akan berimplikasi pada derajat keabsahan dan validitasnya. Tingkat validitas data wawancara yang dilakukan pada waktu pagi cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan hasil wawancara pada siang atau sore hari. Hal ini dikarenakan pada waktu pagi keadaan informan masih *fresh* dan belum terlalu banyak beban masalah atau pikiran yang menghampiri.

- 2) *Member Checking* merupakan metode atau cara untuk mengetahui akurasi hasil penelitian melalui pengecekan kembali hasil laporan penelitian oleh partisan yang terlibat dalam proses atau kegiatan penelitian dengan memberikan input berupa masukan dan komentar, apakah hasil penelitian sudah cukup valid dan akurat.¹⁰²
- 3) *Prolonged time*, yaitu memperlama waktu penelitian di lapangan untuk keperluan memperdalam pemahaman dan wawasan terhadap berbagai situasi, kondisi subjek serta objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah laporan penelitian dengan derajat validitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁰³

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, maupun hasil dokumentasi dari berbagai sumber seperti jurnal, catatan, artikel, atau laporan penelitian

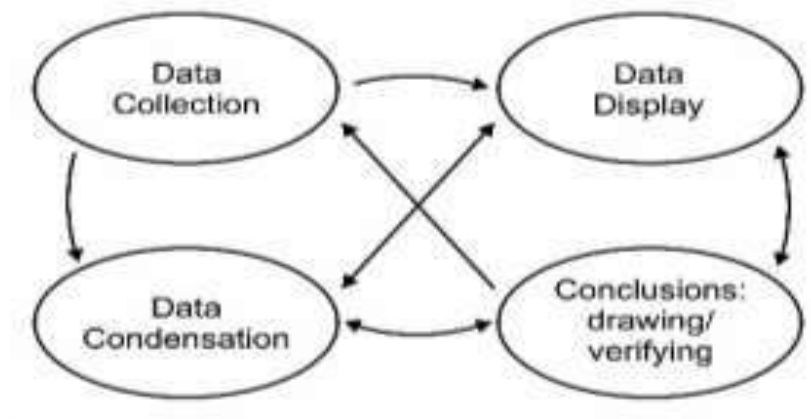
¹⁰² Creswell, John W., *loc. cit.*

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 271.

secara sistematis, untuk mempermudah proses pembuatan hasil penelitian dan pengambilan kesimpulan, sehingga hasil temuan dapat diterima dan dibaca dengan mudah oleh semua kalangan.¹⁰⁴

Miles dan Huberman (2014) membagi proses analisis data kedalam tiga tahapan, yang meliputi *data condensation*, *data display*, dan *conclusions* (lihat gambar 3.1).¹⁰⁵

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles, Mathew B., Huberman, Michael., & Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London: Sage Publication Ltd.

1) Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses analisis data yang melibatkan beberapa tahapan, sebagai berikut: 1) pemilihan (*selecting*), yaitu selektif dalam menentukan data dan informasi yang mendukung penelitian; 2) pengerucutan (*focusing*), yaitu menyaring data-data yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian; 3) penyederhanaan (*simplifying*), yaitu penyajian data dalam tabel misalnya; 4) abstraksi (*abstracting*); dan terakhir 5) mengubah data (*transforming*), biasanya dilakukan

¹⁰⁴ LPM Unkris, "Perwakilan Lembaga Penelitian dan Pengabdian", dalam <http://eprints.ipdn.ac.id/9/2/ISI.pdf>, diakses pada 20 Juli 2018.

¹⁰⁵ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J., *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. (USA: Sage Publications, 2014). Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

melalui beragam metode atau cara, misalnya penyeleksian data dengan seksama dan teliti.¹⁰⁶

2) Penyajian Data

Setelah melalui proses kondensasi data, tahap berikutnya adalah men-*display* data. Data yang telah dikondensasi akan memudahkan peneliti dalam melakukan penyajian data yang biasanya berupa bagan, uraian singkat, dan grafik atau tabel yang disertai dengan narasi sebagai penjelasan.

3) Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui proses kondensasi dan *display* data, maka tahapan terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan bagian akhir dari sebuah penelitian dimana peneliti dituntut untuk membuat interpretasi singkat, yang dapat menjelaskan dan merangkum secara umum keseluruhan data penelitian yang telah dikumpulkan pada ruang dan jangka waktu yang sudah ditentukan.

¹⁰⁶ "Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions". Dalam Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J., *Op. Cit.*, hlm. 14.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Deskripsi umum tentang Provinsi Lampung sangatlah penting untuk dilampirkan sebagai selang pandang dan pengantar pengetahuan terkait berbagai aspek baik geografis, pemerintahan, kependudukan, agama, dan sejarah terbentuknya Provinsi Lampung itu sendiri sebelum beranjak pada lokus utama dimana penelitian dilaksanakan.

4.1.1 Kondisi Geografis dan Iklim Provinsi Lampung

Provinsi Lampung secara astronomis terletak pada $103^{\circ}40'$ - $105^{\circ}50'$ BT dan $6^{\circ}45'$ - $3^{\circ}45'$ LS. Adapun secara geografis, berada di ujung selatan pulau Sumatera, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di bagian utara, serta dikelilingi oleh Samudra Indonesia, Selat Sunda dan Laut Jawa.¹⁰⁷



Gambar 4.1 Peta Provinsi Lampung

Sumber: Provinsi Lampung dalam Angka 2017

<https://lampung.bps.go.id/publication/2017/08/11/9f3e06a09ebc3306f2f013c0/provinsi-lampung-dalam-angka-2017.html>

¹⁰⁷ Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Lampung, *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2018*, (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2018), hlm. 1.

Luas wilayah Provinsi Lampung adalah 34,6 ribu km² (1,84 persen dari wilayah Indonesia). Kabupaten terluas adalah Lampung Timur (5,3 ribu km²), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Metro (61,8 km²). Provinsi Lampung berada pada ketinggian antara 0-900 m di atas permukaan laut. Sebagian besar desa berada di wilayah bukan tepi laut yaitu mencapai 2.391 desa. Sejumlah 2.328 desa termasuk dalam wilayah hamparan, dan sisanya berada di wilayah lereng dan lembah.¹⁰⁸

Tabel 4.1 Statistik Geografi Provinsi Lampung, 2017

No	Kondisi Geografis	Satuan	Nilai
1.	Luas Wilayah	Km ²	34 623,80
2.	Ketinggian	Mdpl	0 – 900
3.	Jumlah Pulau	Buah	145
4.	Desa Tepi Laut	Desa	241
5.	Desa bukan Tepi Laut	Desa	2 391
6.	Desa di Hamparan	Desa	2 328

Sumber: Potensi Desa 2014

Dengan posisi ini, Provinsi Lampung memiliki iklim tropis *humid*. Suhu udara berkisar antara 26,4°C-27,7°C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 74-84 persen. Pada tahun 2017 tercatat kecepatan angin berkisar antara 2,5 sampai 4,0 Knot. Sepanjang tahun 2017, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 294,9 mm³ dengan hari hujan sebanyak 186 hari dalam setahun. Lebih sedikit dari tahun

¹⁰⁸ *Ibid.*

sebelumnya yang mencapai 223 hari. Penyinaran matahari terlama terjadi pada bulan September mencapai 73,3 persen.¹⁰⁹

Tabel 4.2 Statistik Iklim Provinsi Lampung, 2017

No.	Kondisi Iklim	Satuan	Nilai
1.	Kecepatan Angin	Knot	2,5 – 4,0
2.	Kelembaban Udara	%	74 – 84
3.	Suhu Udara	⁰ C	26,4 – 27,7
4.	Hari Hujan	Hari	186
5.	Curah Hujan	Mm ³	23,4 – 294,9
6.	Lama Penyinaran Matahari	%	18,0 – 73,3

Sumber: BMKG Radin Inten II Bandar Lampung

4.1.2 Pemerintahan

Sebagai sebuah provinsi, Lampung dibentuk berdasarkan Perpu No 3 tahun 1964 yang pada perkembangannya diganti menjadi UU No 14 tahun 1964. Pada awal pemebentukannya sebagai sebuah provinsi, Lampung hanya memiliki 4 kabupaten atau kota. Namun sejak tahun 1991, pemerintah mulai melakukan pemekaran wilayah dengan menambah Lampung Barat sebagai kabupaten baru. Program pemekaran terus berjalan hingga tahun 2012, dimana pemerintah telah melakukan pemekaran wilayah yang kelima kalinya melalui UU No 22 tahun 2012. Dengan demikian terjadi penambahan jumlah kabupaten menjadi 13 dan dua kotamadya. Pada tahun 2017, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan masih sama yakni 228 kecamatan dan 2.643 desa/kelurahan.¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 2.

Termasuk Kabupaten Lampung Selatan merupakan bagian dari Provinsi Lampung yang menjadi lokus utama dalam penelitian ini.

4.1.3 Kependudukan

Potret kebijakan kependudukan di Provinsi Lampung dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk (LPP). Di tahun 2000 jumlah penduduk Provinsi Lampung sebanyak 6,74 juta jiwa, naik menjadi 7,63 juta jiwa pada tahun 2010. Setiap tahunnya jumlah penduduk Provinsi Lampung mengalami kenaikan, namun tidak halnya untuk laju pertumbuhan penduduk. LPP pada tahun 2010-2017 yaitu 1,18 persen, turun jika dibandingkan LPP tahun 2000-2010. Turunnya angka LPP ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan kependudukan terkait aspek kuantitas.

Berdasarkan pola fertilitas, mortalitas dan migrasi, proyeksi populasi penduduk Provinsi Lampung di tahun 2017 mencapai 8,29 juta jiwa atau ranking kedua terbanyak di wilayah Sumatera. Banyaknya jumlah penduduk tersebut dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi tergantung dari aspek kualitasnya.¹¹¹ Ini dapat direfleksikan melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan. Ditinjau dari tingkat pendidikan terlihat bahwa komposisi penduduk yang berusia 15 tahun keatas didominasi oleh mereka yang berpendidikan tamat SD yakni sekitar 28,12 persen (Susenas, 2017). Rendahnya kualitas penduduk ini merupakan sinyal kebijakan kependudukan terkait aspek kualitas yang belum berhasil.

4.1.4 Agama

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010, jika penduduk di Provinsi Lampung diklasifikasikan berdasarkan agama yang dianut maka didapatkan data sebagai berikut:

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 4.

Tabel 4.3 Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut
di Provinsi Lampung

Agama								
Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lainnya	Tidak Teriden tifikasi	Jumlah
7.264.783	115.255	69.014	113.512	24.122	596	664	20.459	7.608.405

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Melihat data di atas maka Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Lampung dengan jumlah penganutnya sebesar 7.264.783 atau sekitar 95,48%, setelah itu disusul oleh pemeluk agama Kristen sebesar 1,51 %, Hindu 1,49%, Katolik 0,91%, Budha 0,32%, Khong Hu Chu 0,01% dan pemeluk agama lainnya.

4.1.5 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan

Berpijak pada pokok pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terkait konflik sosial antar etnis Bali dan Lampung di Balinuraga. Maka selanjutnya, peneliti berupaya untuk memberikan gambaran umum lokus utama penelitian di Kabupaten Lampung Selatan.

4.1.6 Kondisi Geografis dan Pemerintahan

Secara astronomis kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105⁰14' sampai dengan 105⁰45' Bujur Timur dan 5⁰15' sampai dengan 6⁰ Lintang Selatan. Tercermin dari potret letak wilayahnya secara astronomis, Lampung Selatan memiliki karakter daerah tropis yang sama dengan banyak daerah di Indonesia.¹¹²

¹¹² Syamsul Bahri, Seksi IPDS BPS Kabupaten Lampung Selatan. *kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2018*, (Lampung Selatan: BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2018), hlm. xxix.

Gambar 4.2 Peta Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: <http://info-kotakita.blogspot.com/2016/11/kota-kota-di-kabupaten-lampung-selatan.html>

Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah daratan 2.007,01 km². Ibu kotanya adalah Kalianda, melalui peresmian Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari 1982. Sampai dengan tahun 2018, program pemekaran wilayah di kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan sebanyak dua kali. *Pertama*, pembentukan Kabupaten Tanggamus melalui UU No 2 tahun 1997 pada tanggal 3 Januari 1997; dan *kedua*, pemerintah melakukan pemekaran kedua kalinya berdasarkan UU No 33 tahun 2008, yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2008, tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran.¹¹³

Secara administratif, Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas wilayah sebagai berikut, yaitu bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah, sedangkan bagian Selatan berbatasan langsung dengan Selat Sunda yang memisahkan antara Pula Jawa dan Sumatera, selanjutnya wilayah Barat kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten hasil pemekaran tahun 2008, yaitu Kabupaten Pesawaran, dan terakhir bagian Timur berbatasan dengan laut

¹¹³ *Ibid.*

Jawa. Jumlah kecamatan dan desa di wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan ada 17 kecamatan dan 260 desa/kelurahan.¹¹⁴

Dari beberapa kecamatan dan desa yang ada di wilayah hukum Kabupaten Lampung Selatan, terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Way Panji dan Kalianda, serta dua desa yaitu desa Balinuraga dan Agom yang menjadi lokus utama penelitian ini. Hal ini dikarenakan, konflik sosial antar etnis yang terjadi di Lampung Selatan melibatkan pihak pendatang etnis Bali di Balinuraga Kecamatan Way Panji dengan penduduk asli Lampung di Desa Agom Kecamatan Kalianda.

4.1.7 Demografi

Menurut hasil Proyeksi Penduduk tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, jumlah penduduk di wilayah ini sebanyak 992.763 jiwa, dengan jumlah mayoritas penduduk laki-laki sebanyak 509.303 jiwa, sedangkan angka penduduk perempuan sebesar 483.450 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa *sex ratio* antara laki-laki dengan perempuan tidak terpaut begitu besar, yaitu pada setiap 100 jiwa perempuan terdapat 105 jiwa laki-laki.¹¹⁵

Berdasarkan komposisinya, penduduk di Lampung Selatan terdiri dari kelompok penduduk asli Lampung dan kelompok pendatang. Penduduk asli Lampung sendiri terbagi kedalam dua kelompok suku adat yaitu Lampung Peminggir atau Adat Saibatin yang secara umum bermukim di sepanjang wilayah pesisir, seperti di pesisir Kecamatan Penengahan, Kalianda dan Katibung; dan Lampung Pepadun yang biasanya tinggal di daerah pedalaman atau kota.

Apabila ditinjau berdasarkan ragam suku, adat dan budayanya, maka Lampung Selatan merupakan daerah dengan tingkat heterogenitas yang cukup tinggi. Terbukti beragam suku menempati wilayah ini, seperti

¹¹⁴ 17 kecamatan di Lampung Selatan adalah Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Katibung, Merbau Mataram, Way Sulan, Sidomulyo, Candipuro, Way Panji, Kalianda, Rajabasa, Palas, Sragi, Penengahan, Ketapang, dan Bakauheni (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan).

¹¹⁵ Syamsul Bahri, *Op. Cit*, hlm. xxxi.

suku Jawa, Bali, Sunda, Minang, Batak, Ogan, Aceh dan kelompok suku lainnya. Dari beragam suku tersebut, Suku Jawa merupakan kelompok penduduk pendatang dengan jumlah terbesar, bahkan menjadi mayoritas penduduk Lampung dengan persentase sebesar 61,02 %. Besarnya penduduk pendatang yang berasal dari Pulau Jawa merupakan produk dari kebijakan transmigrasi yang dijalankan oleh pemerintah Kolonial Belanda dan terus berlanjut hingga masa pasca reformasi tahun 2005.

Melihat heterogenitas yang ada menjadikan Provinsi Lampung dijuluki sebagai “Indonesia Mini”, hal ini membuktikan bahwa tingkat keterbukaan orang Lampung terhadap pendatang sangatlah baik. Sehingga, peneliti merasa perlu untuk menyajikan informasi singkat terkait transmigrasi khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sebelum masuk ke inti pembahasan dan analisis yang lebih mendalam terkait program transmigrasi. Transmigrasi merupakan salah satu faktor pemicu berkembangnya benih-benih konflik sosial antar etnis di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi lokus utama penelitian ini.

Berikut informasi singkat terkait transmigrasi di Kabupaten Lampung Selatan:¹¹⁶

Pertama, program kolonisasi pertama kali ke daerah Lampung dijalankan pada tahun 1905 oleh pemerintah Kolonial Belanda, yang proyeknya dipimpin secara langsung oleh H.G. Heyting. Pemandahan penduduk sebanyak 155 kepala keluarga (KK) dari Desa Bagelen, Jawa Tengah ke Lampung untuk pertama kalinya ditempatkan di Kecamatan Gedong Tataan.

Kedua, program transmigrasi terus berlanjut didukung dengan animo pemerintah Kolonial Belanda untuk melaksanakan politik etisnya. Arus kolonisasi yang kedua kalinya berhasil mengirimkan sebanyak 6021 jiwa pada periode tahun 1921-1922 ke daerah Teluk Semangka dan Kota Agung, di bawah pimpinan W.C. Schalk Wijk.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. xxxv-xxxvi.

Pada tahun *ketiga*, pemerintah Kolonial Belanda mencoba menerapkan program kolonisasi dengan sistem spontan atau swakarsa pada tahun 1923-1927. Pada periode ini, pemerintah berhasil memindahkan 1053 jiwa ke Kota Agung dan Gedong Tataan.

keempat, kolonisasi berikutnya terjadi pada tahun 1934 dengan menerapkan sistem sisipan, yaitu sistem perpindahan penduduk dengan tanpa membuka lahan baru melainkan menyisipkan atau menanggungkan pendatang baru pada penduduk lama hasil kolonisasi yang terdahulu. Penempatan dilakukan di wilayah Kalianda.

Kelima, Pemerintah Kolonial Belanda kembali menerapkan sistem kolonisasi yang baru pada tahun 1935–1939 yaitu sistem bedol desa. Pada periode pemerintah cukup berhasil karena jumlah penduduk yang dipindahkan dari Pulau Jawa cukup besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu 27.816 ditempatkan di daerah Talang Padang;

Keenam, program transmigrasi berikutnya terjadi pada tahun 1942-1945 saat Jepang berkuasa di wilayah Nusantara (Indonesia). Namun, karena Jepang tidak menjadikan transmigrasi sebagai fokus utama kebijakannya saat berkuasa di wilayah Nusantara, maka pada periode ini tidak terdapat catatan yang jelas mengenai program perpindahan penduduk.

Dan terakhir *ketujuh*, berhasilnya program transmigrasi menyebabkan program ini terus dijalankan oleh pemerintahan Kolonial Belanda hingga masa reformasi. Pada tahun 1950 hingga 1974, pemerintah telah berhasil mengirim penduduk dari luar Provinsi Lampung ke wilayah administrasi Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Sidomulyo, Palas, Kedaton, Tanjungan dan Penengahan, sebanyak 11556 kepala keluarga (KK).

4.1.8 Adat Istiadat

Dalam warna suku, adat dan budaya yang mendiami wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan, secara garis besar komposisi

penduduk terbagi kedalam dua kelompok besar, yaitu kelompok penduduk asli Lampung dan kelompok pendatang.¹¹⁷

1. Kelompok Penduduk Asli

Sebagai suatu wilayah dengan karakter unik yang dimiliki oleh penduduknya, Kabupaten Lampung Selatan tentu memiliki struktur hukum adatnya sendiri. Suatu hukum adat dan tradisi kelompok yang tidak dimiliki oleh kelompok atau suku bangsa lainnya. Ditinjau berdasarkan adatnya, penduduk asli Lampung di Lampung Selatan diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar, yaitu Lampung Peminggir atau yang lebih dikenal dengan nama adat Saibatin dan adat Pepadun.

Apabila ditinjau berdasarkan tempat tinggal dan tradisi yang dipegang, masyarakat Lampung dengan adat Saibatin dan Pepadun memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Penduduk Lampung Saibatin biasanya memilih untuk tinggal di sepanjang pesisir pantai, sedangkan kelompok Pepadun cenderung memilih untuk bermukim di daerah pedalaman seperti Lampung Utara, Menggala di Tulang Bawang, dan Sungkai di Way Kanan. Selain itu secara tradisi, keduanya memiliki cara-cara yang berbeda, misalnya dalam upacara adat pernikahan, atau mekanisme pemberian gelar adat.

2. Kelompok Penduduk Pendatang

Kelompok pendatang menjadi mayoritas dalam jumlah, sebagian besar penduduknya berasal dari Pulau Jawa yang bertransmigrasi ke Lampung sejak tahun 1905. Selain itu, kelompok pendatang membawa sistem adat dan tradisi dari daerah asalnya ke daerah tujuan transmigrasi di wilayah Lampung Selatan khususnya. Namun begitu, meski beragam suku dan adat berbeda, tetap tercipta situasi yang harmonis dan kondusif antara penduduk asli dan kelompok pendatang di Provinsi Lampung, terutama di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. xxxvi-xxxvii.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Faktor-faktor Penyebab Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga Menjadi Konflik Terbuka

Pasca Orde Baru sifat konflik di Indonesia mengalami perubahan serta tidak lagi terbatas pada negara dan subordinatnya, tetapi bersifat horizontal dan sering sekali dengan tingkat kerumitan yang luar biasa, seperti konflik komunal yang melibatkan identitas etnis dan agama, misalnya banturan antara Muslim dan Kristen di Maluku, konflik antara Etnis Dayak dan Madura di Sampit, diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di Jakarta tahun 1998, kekerasan terhadap Ahmadiyah di Mataram, dan Konflik multi-etnik pendatang Bali dan Pribumi di Lampung Selatan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Setelah runtuhnya rezim Soeharto, konflik sektarian dan kekerasan di dalam negeri yang berbasis etnisitas, agama maupun identitas kolektif subnasional atau yang lebih populer disebut sebagai isu SARA, yaitu suku, agama, ras dan antargolongan mulai menjadi semacam patologi sosial yang mewabah dan sulit diatasi karena sifatnya yang laten. Sebagian besar konflik bernuansa SARA bersifat horizontal dan kerap kali diakhiri dengan jatuhnya korban jiwa, adanya kerugian materil baik dari pihak pelaku maupun korban, serta kerusakan sarana dan prasarana umum yang dapat menyebabkan stabilitas kehidupan sosial bermasyarakat, perekonomian bahkan pemerintahan menjadi goyah.

Dalam hal ini, konflik horizontal yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Lampung, yaitu konflik sosial antar etnis yang melibatkan warga Lampung asal Bali dan penduduk asli Lampung (pribumi) di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, telah menjadi perhatian baik pemerintah daerah maupun Pusat, kerana dampak konflik yang ditimbulkan cukup besar.

Terulangnya bentrok antar warga pendatang dan pribumi di Balinuraga, Lampung Selatan, yang mengakibatkan kerugian jiwa dan materil merupakan barometer lemahnya aparat pemerintah daerah dalam

menyikapi suatu permasalahan yang mengarah terhadap konflik SARA, dan tidak adanya ketegasan atas tindakan secara hukum terhadap pelaku-pelaku kerusuhan dan bentrok antar warga yang menjadi dalang atau aktor utama dalam kerusuhan tersebut.

Melihat fakta yang demikian, maka dirasa perlu melakukan suatu kajian atau riset khusus yang melibatkan beberapa elemen baik pemerintahan, aparat keamanan, akademisi dan elemen masyarakat untuk membahas upaya-upaya penyelesaian, serta penciptaan mekanisme pencegahan dan deteksi dini atas benih-benih konflik yang menjurus pada isu SARA yang dapat memecah belah bangsa, khususnya rasa persatuan dan kesatuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, bagaimana cara pemerintah, lembaga, dan masyarakat merekonstruksi hubungan baru antar pihak yang berkonflik, baik di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, dari yang destruktif menjadi konstruktif, konflikktual menjadi harmoni, sangat berpengaruh besar terhadap penciptaan kondisi damai positif yang berkelanjutan. Inilah yang oleh John Paul Lederach disebut sebagai “Transformasi Konflik”.

Berdasarkan data yang dihimpun dan dirilis oleh BPS Provinsi Lampung memperlihatkan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi di wilayah ini baik dari segi keberagaman suku yang menetap maupun berdasarkan agama yang dipeluknya. Terjadinya benturan antar kelompok etnik di Lampung Selatan menjadi indikator lemahnya pengelolaan keberagaman yang ada sehingga bukan efek konstruktif yang ditimbulkan tetapi justru efek destruktif yang muncul kepermukaan.

4.2.1.1 Kronologi Terjadinya Konflik

Sebelum beranjak pada sub bab hasil penelitian terkait faktor konflik, peneliti terlebih dahulu akan menyajikan gambaran umum tentang kronologis terjadinya konflik di Balinuraga, agar pembaca dapat memiliki pemahaman yang baik tentang konflik antar etnis Bali dan Lampung di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan yang terjadi pada akhir tahun 2012 silam. Berikut ini peneliti lampirkan data

yang diperoleh dari Kasi Intel Letkol Inf. Edi Yanto Komando Resort Militer 043/Garuda Hitam pada 24 September 2018 dan Tri Mujiyanto S.IP, selaku Kabid Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) Lampung Selatan pada 2 Oktober 2018.

Tabel 4.4 Kronologi Terjadinya Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan

No	Waktu	Peristiwa
1	27 Oktober 2012	<p>Pada hari ini tepatnya Sabtu pukul 18.00 WIB, terjadi sebuah keributan dipicu oleh sekelompok anak muda warga Desa Balinuraga yang menggoda dua remaja gadis suku Lampung dipersimpangan jalan Desa Waringin Harjo. Kedua gadis tersebut bernama Nurdiana Dewi (17 Tahun) warga Desa Negeri Pandan dan Emilia (17 Tahun) warga Desa Agom Kecamatan Kalianda sedang melintas di persimpangan jalan Waringin Harjo menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba rombongan pemuda Balinuraga menggoda keduanya dengan memegang stang motornya dan ada yang meraba pahanya. Karena kehilangan konsentrasi akibat digoda, kedua gadis tersebut terjatuh dari sepeda motornya dan mengakibatkan luka memar dan lecet.</p> <p>Setelah insiden tersebut, dua remaja asal Lampung itu mengadakan perihal peristiwa yang dialaminya kepada keluarga. Di luar dugaan, kabar tentang insiden kecelakaan tersebut cepat beredar bahkan hingga ke desa tetangga seperti Desa Raja Basa, Way Panji, Candipuro dan Sidoharjo. Berita yang tersebar dan berkembang di kalangan masyarakat bahwa gadis tersebut mengalami penganiayaan dan pelecehan seksual, sehingga para pemuda Desa Agom yang berasal dari Suku Lampung dan sebagian suku Jawa bersenjata</p>

		<p>golok, celurit, dan bambu runcing berkumpul di Pasar Patok Kecamatan Way Panji guna merencanakan penyerangan ke Desa Balinuraga.</p> <p>Pada pukul 22.30 WIB Unsur Pimpinan Kecamatan (Uspika) Way Panji dibantu 30 Personel aparat kepolisian dari Polsek Sidomulyo dan Polres Lampung Selatan berusaha untuk melakukan pencegahan, namun massa yang berjumlah kurang lebih 500 orang tetap memaksa bergerak menuju Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam.</p> <p>Pukul 23.00 WIB warga Desa Agom tiba di perbatasan Desa Balinuraga dan langsung melakukan pengrusakan dan pembakaran rumah warga Bali yang ada di perbatasan desa, akibatnya 1 (satu) unit warung milik bapak Made Sudarye terbakar dan 7 (tujuh) unit rumah mengalami kerusakan akibat lemparan batu. Sementara warga Desa Balinuraga melakukan perlawanan dengan menghadang massa dari Desa Agom yang hendak masuk ke dalam desa dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan, sehingga mengakibatkan 1 (satu) orang dari pihak Lampung terluka dan 1 (unit) sepeda motor dirusak dan dibakar. Selain itu, beberapa rumah warga Bali di luar Kecamatan Way Panji juga menjadi sasaran amuk massa warga Lampung, seperti rumah Wayan Biase di simpang Lubuk Kamal Kecamatan Kalianda, rumah Ketut Maradona di Desa Taman Agung, dan rumah Wayan Alit di Kecamatan Sidomulyo.</p>
2	28 Oktober 2012	<p>Pada hari Minggu 28 Oktober 2012 pukul 03.00 WIB 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Pasukan Dalmas Polda Lampung tiba di lokasi kejadian. Pada pukul 06.00 WIB dua orang warga Balinuraga Kecamatan Way Panji sebagai tersangka diamankan ke Polda Lampung.</p>

		<p>Pada pukul 07.30 WIB ratusan massa suku Lampung sudah berkumpul di Pasar Patok Kecamatan Way Panji serta beredar SMS diantara warga Lampung dengan isi SMS antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diberitahukan pada semua suku Lampung yang ada di daerah Lampung mulai saat ini mari kita bergabung dan bersatu untuk memerangi suku Bali yang telah melecehkan atau menzolimi kita, kita suku Lampung adalah asli pribumi dan punya hak untuk melawan. Alloh hu'akbar, kita membela harga diri kita dan kita punya harga diri. Mari kita lawan dan usir suku Bali yang ada di daerah Lampung ini dan tidak ada kata damai dengan suku Bali. Tolong teruskan SMS ini sebarkan <i>mit puakhi kham Lampung</i>. Atas nama Batin Putra Gangsa Marga Legun. 2. Pengumuman para saudara-saudaraku, yang merasa suku Lampung mari kita habiskan orang Bali, karena sering membuat kekacauan di masyarakat Lampung, sebarkan lewat sms kepada masyarakat kita. <p>Pukul 07.50 WIB 1 SSK Brimob ditempatkan di perbatasan antara Desa Sidoharjo dan Desa Sidoreno. Pada pukul 09.17 WIB massa suku Lampung kurang lebih 1000 orang yang ada di Pasar Patok bergerak ke Desa Balinuraga dengan bersenjata golok, clurit, pedang, tombak dan bambu runcing. Pukul 09.50 Wib terjadi bentrok susulan, yang mengakibatkan 3 (tiga) unit rumah warga Bali di Bakar, 2 (dua) orang dari pihak Lampung meninggal karena luka senjata tajam, 2 (dua) orang luka karena tertembak dan kena senjata tajam.</p> <p>Pukul 11.45 WIB massa suku Lampung yang berjumlah kurang lebih 5000 orang berkumpul di Desa Sidoreno dan</p>
--	--	---

		<p>membakar 3 (tiga) unit rumah selanjutnya bentrok dengan warga Balinuraga yang mengakibatkan 1 (satu) orang warga Lampung meninggal dan 2 (dua) terluka tembak senapan.</p> <p>Pukul 20.00 WIB Danrem 043/Gatam dan Wakil Bupati Lampung Selatan menjenguk korban di RSUD Kalianda, sementara upaya penyelesaian yang dijadwalkan malam hari dengan mempertemukan tokoh kedua pihak batal karena situasi yang tidak kondusif.</p>
3	29 Oktober 2012	<p>Pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 pukul 09.00 WIB Danrem melaksanakan Rakor di Pemda Kabupaten Lampung Selatan dengan Kapolda, Wakil Bupati, Camat Sidomulyo, Way Panji, Candi Puro dan Raja Basa, dan Tomas. Dalam pertemuan tersebut Danrem menghimbau agar Kepala Desa tidak ikut menggerakkan warganya namun harus meredam konflik dengan melakukan operasi terpadu bersama-sama Pemerintah daerah, dan meminta media untuk tidak menyebarkan berita yang bernuansa provokatif. Selain itu Wakil Bupati berharap warga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang meyesatkan serta memberikan tali asih terhadap korban terdampak.</p> <p>Pukul 09.54 WIB massa Lampung berdatangan dan berkumpul di lapangan Desa Waringin Harjo Kecamatan kalianda dengan mengendarai sepeda motor, truk dan mobil pick up berjumlah sekitar 15000 orang dan masih terus berdatangan dari Kecamatan Penengahan, Sidomulyo, Katibung dan Jabung, Lampung Timur. Personel pengaman sudah di lokasi berjumlah 2.930 personel. Terjadi ketegangan antara massa dan aparat sehingga aparat menembakkan gas air mata. Namun pada pukul 15.20 WIB massa kembali berusaha menembus barikade dan tidak bisa menembus kemudia massa mencari jalan lain melewati sawah-sawah dan</p>

		mulai membakar rumah warga suku Bali di Desa Sidoreno dan Balinuraga. Bentrokan ini mengakibatkan 6 (enam) orang warga suku Bali meninggal, 2 (dua) orang warga Lampung luka tembak dan senjata tajam, serta 85 unit rusak dan dibakar. Setelah pukul 17.00 WIB seluruh warga Lampung meninggalkan Balinuraga, kemudian TNI/Polri melakukan evakuasi dan membantu pengungsian warga Balinuraga ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling Bandar Lampung.
--	--	--

Sumber: Data *hardcopy* dan hasil wawancara dengan Kasi Intel Letkol Inf. Edi Yanto Komando Resort Militer 043/Garuda Hitam pada tanggal 24 September 2018 dan Kabid Penanganan Konflik Tri Mujiyanto S.IP Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) Lampung Selatan pada 2 Oktober 2018.

Rentetan kronologis peristiwa konflik Balinuraga di atas menunjukkan fakta bahwa konflik yang terjadi antar warga suku Bali dan suku Lampung di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, dipicu oleh kenakalan remaja atas isu “pelecehan seksual” yang dilakukan oleh pemuda Balinuraga terhadap dua gadis remaja suku Lampung. Namun jika dilihat dari segi kerugian materil yang dimunculkan atas kenakalan remaja tersebut, sungguh tidak sebanding dengan dampak konflik kekerasan yang muncul setelahnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana suatu konflik laten dapat bereskalasi menjadi konflik manifes yang menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateri (jatuhnya korban jiwa, gangguan psikologis dan trauma) yang begitu besar? tentu penyebab atau akar konfliknya tidaklah sesederhana itu. Maka pada sub bab berikutnya peneliti akan memaparkan data tentang faktor-faktor yang menyebabkan eskalasi konflik laten menjadi manifes.

4.2.1.2 Faktor-faktor Konflik

Dari beberapa hasil wawancara dan pengumpulan data sekunder maka peneliti merangkum faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya konflik terbuka antara warga suku Bali dan pribumi (Lampung)

di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut:

Diantara faktor-faktor yang dapat memperluas ruang lingkup konflik kekerasan di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, yaitu:

Pertama, faktor sosial budaya, munculnya solidaritas mekanik *ingroup* yang kokoh dan rasa dendam yang mengakar, serta tumbuh dan kembangnya stereotip negatif di tengah kelompok masyarakat terhadap suatu kelompok tertentu; senada dengan analisis yang dilakukan oleh Korem 043/Gatam dalam laporan khusus tahun 2012 terkait bentrokan antar warga di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan berbentuk *file hardcopy* yang diserahkan kepada peneliti oleh Kasi Intel Letkol Inf. Edi Yanto saat sesi wawancara pada tanggal 24 September 2018, yaitu:

*“Terjadinya bentrok antar warga yaitu antara warga Desa Balinuraga (suku Bali) Kecamatan Way Panji dengan Desa Agom (suku Lampung) Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan selain dipicu dari awal kejadian atas issue pelecehan sexual ... tidak menutup kemungkinan bentuk solidaritas kedaerahan yang terlalu dalam dari masyarakat Ds. Agom Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan dan sekitarnya (suku Lampung)”*¹¹⁸

Dalam hal ini kelompok Jaringan Masyarakat Lampung Selatan menyatakan secara tegas dalam surat Pernyataan Sikap Warga Masyarakat Lampung Selatan, November 2012, bahwa,

*“... permasalahan tragedi Balinuraga yang telah terjadi, adalah murni permasalahan emosional/PHI'IL yang sudah bertumpuk pada masyarakat suku Lampung dan bukan menyangkut permasalahan kesenjangan sosial”*¹¹⁹

¹¹⁸ Laporan Khusus Nomor:R/Lapsus/XI/2012 Bidang Hankam, Perihal: Terjadinya bentrok antar warga yang mengakibatkan korban jiwa antara warga Desa Agom Kec. Kalianda dengan warga Desa Balinuraga Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan.

¹¹⁹ Pernyataan Sikap Warga Masyarakat Lampung yang dibuat oleh Jaringan Masyarakat Lampung dalam bentuk *file hardcopy* yang diserahkan oleh Kabid Penanganan Konflik Tri Mujiyanto S.IP Kesabngpol Lampung Selatan kepada peneliti saat melakukan sesi wawancara di Kantor Kesbangpol Lampung Selatan pada tanggal 2 Oktober 2018.

Fakta terkait berkembangnya stereotip negatif, Dr. Hartoyo seorang Sosiolog Universitas Lampung menegaskan bahwa,

“Setiap kelompok untuk mempertahankan kelompoknya dia harus punya musuh diluarkannya?, zaman Soekarno juga dulu begitu, Indonesia ini kuat musuhnya Malaysia, ganyang Malaysia kan, gitukan!. Amerika supaya kuat maka musuhnya adalah Timur Tengah. Yahudi kuat musuhnya muslim. Jadi untuk kuat itu memang harus punya musuh, musuhnya itu sebagian kompak kuat. Artinya apa? Dalam upaya untuk memperkuat tali ikatan ke dalam itu, maka dia harus menumbangkan musuh keluar, dan yang namanya musuh itu kan harus dijelek-jelekin, gitu kan!, nah ini kemudian stereotip-stereotip etnik itu berkembang dan sengaja dipelihara, ya bukan hanya mereka aja, dari masyarakat etnik lainpun begitu. Ya karena memang bukan hanya dalam pengertian stereotip etnik yang tidak rentan terhadap konflik, termasuk juga yang rentan terhadap konflik itu dikembangkan. Dan itu bukan berdasarkan ciri perilaku-perilaku individual dalam kolektif mereka yang mewarnai tetapi juga termasuk pengalaman-pengalaman konflik di antara mereka sehingga suku lainpun mengembangkan stereotip itu. Misal, orang Lampung itu pemalas, Bali itu jorok, karena fakta di lapangan itu kalo kita pergi ke desa Balinuraga babi berkeliaran iya kan!. Kemudian di situ ada semacam pos-pos ronda, itu kan untuk gable dan judi, orangnya pake tato dan sebagainya, anting-anting. Ini sebenarnya kan itu menandakan bahwa kehidupan mereka itu kehidupan yang kekinian yang menyimpang dari dunia sosial yang umum. Nah, jadi pada pengalaman-pengalaman itu muncul akumulasi. Jadi setiap pemicu yang sekecil apapun jika tidak dikendalikan akan cepat berkembang untuk menjadi konflik komunal ... Menyimpang itu kan ukuran orang lain, tetapi menurut mereka ya biasa-biasa saja, seperti penjarahan gitukan, rentenir menurut mereka sah-sah saja. Sehingga hal ini memperkuat eksklusivisme kelompok antar etnik dan juga akhirnya memperkuat stereotip juga”¹²⁰

Selain itu, sikap “arogansi” pemuda Bali juga dianggap sebagai faktor pemicu terjadinya konflik sosial antar etnis di Balinuraga, misalnya kenakalan remaja yang diwarnai dengan minum-minuman keras, kemudian mereka cenderung mendominasi karena bentuknya yang selalu bergerombolan.¹²¹ Sikap “arogansi” ini tumbuh dan dimiliki anak-anak

¹²⁰ Wawancara dengan Dr. Hartoyo seorang Sosiolog Universitas Lampung di Gedung Rektorat Universitas Lampung Lt. 3 pada tanggal 25 September 2018.

¹²¹ Wawancara dengan Kepala Staf Kodim 0421 Mayor Inf. Agus Waluyo di Markas Kodim 0421 Lampung Selatan 2 Oktober 2018.

muda di Balinuraga, sementara generasi tua tidak bisa mengendalikan meskipun tokoh-tokoh adat sudah turut mencoba menasehati kelompok mudanya. Ironis bahwa sikap yang demikian dibawa keluar dalam hubungan sosial kemasyarakatan antar suku di lingkungannya. Kemudian dalam acara-acara hajatan yang biasanya ada semacam hiburan seperti organ tunggal, kelompok anak muda suku Bali ini sering menguasai panggung dan minta “diperlakukan lebih”. Siapa yang berani akan berurusan dengan mereka (anak muda Bali) sehingga akhirnya muncul konflik, pertumpahan darah dan saling serang. Titik kulminasinya adalah konflik Balinuraga.¹²² Hal ini diamini oleh beberapa narasumber yang peneliti wawancarai diantaranya, pernyataan yang diungkapkan oleh Kabid Penanganan Konflik Kesbangpol Lampung Selatan Tri Mujiyanto S.IP. Mujiyanto mengatakan bahwa,

“Arogansi itu memang ada di orang Bali itu, itulah yang menyebabkan mereka dengan arogansinya itu menganggap orang lain kecil dan lemah sehingga mereka berbuat semena-mena. Timbullah perlawanan itu ... mungkin awalnya memang arogansi sehingga sifat kebencian orang suku lain karena melihat Bali ini kok lebih hebat sih mereka ini, inilah awalnya akhirnya orang Lampung timbul gejolaknya dengan orang Bali. Arogansi itulah yang menimbulkannya orang sebelah mempunyai antipati, ini begini sekali, nanti lain kali mereka berperilaku begitu lagi. Di tempat umum mungkin dominan arogansi mereka itu, jadi menganggap orang lain itu beda, karena selama ini belum pernah orang Lampung atau Jawa bentrok langsung dianggapnya mungkin hal itu sepele. Pada saat itu mungkin timbul keberanian kekompakkan. Selain itu, mereka itu disini pendatang kenapa berperilaku seperti itu. Orang Jawa datang di Lampung tidak pakai gaya-gaya begitu juga, orang Sunda juga enggak. Artinya apakah toleransi orang Jawa dan Sunda itu lebih besar terhadap orang Bali, sehingga orang Lampung ini sama kerasnya dengan Bali?. Enggak bisa dianggap sebelah mata gitu, sehingga ketika tersinggung sedikit gua juga berani, pribumi kok. Kalau orang Jawakan pendatang juga, artinya ketersinggungan itu arogansi

¹²² Wawancara dengan Hartoyo, *Op. Cit.*

yang menyebabkan konflik itu. Saya rasa itu kalo faktor-faktor lain tidak.”¹²³

Senada dengan pernyataan di atas, Isro Abdi selaku Camat Way Panji menegaskan bahwa,

“Sebenarnya kalo kita lihat, karakternya hampir sama sih (antara Bali dan Lampung), cuman ya karena warga Bali itu kan sudah terlalu banyak lawan bukan hanya orang Lampung aja, Jawa termasuk suku yang lain lah ya itu sering tersakiti. Itu yang pokok masalah, jadi orang sudah jengkel. Saya juga waktu itu pernah ketika menjabat kepala desa di Palas, cuman ada sedikit masalah saja, waktu itu saya tinggal di pasar, diserbu dengan anak-anak Bali itu, ada kalo 20 an ke pasar itu jadi ngamuk dia, rumah-rumah dilemparin, anak gak tau apa-apa dipukulin. Inikan seolah-olah sudah paling kuasa.”¹²⁴

Sebelum terjadinya konflik terbuka yang melibatkan identitas antar etnis di Balinuraga, memang kondisi sosial kemsyarakatan yang terbangun antara suku Bali dan pribumi terlihat kurang harmonis, cenderung eksklusif sehingga rentan terhadap konflik. Dengan demikian Balinuraga bukanlah konflik yang muncul tiba-tiba tetapi merupakan hasil dari serangkaian konflik yang terjadi sebelumnya.¹²⁵ Hal ini tercermin dalam data berikut terkait dinamika hubungan dan rentetan konflik menahun yang melibatkan warga suku Bali dan suku Lampung di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 4.5 *Timeline* Dinamika Konflik di Lampung Selatan 1982-2012

No	Tahun	Peristiwa
1	1982	Telah terjadi pembakaran dua rumah warga Desa Sandaran oleh oknum warga Desa Balinuraga, karena perselisihan yang terjadi antar warga dari kedua desa.

¹²³ Wawancara dengan Tri Mujiyanto S.IP selaku Kabid Penanganan Konflik Kesabngpol Lampung Selatan di Kantor Kesbangpol Lampung Selatan pada tanggal 2 Oktober 2018.

¹²⁴ Wawancara dengan Isro Abdi selaku Camat Kecamatan Way Panji Lampung Selatan di Kantor Kecamatan Way Panji Lampung Selatan pada tanggal 2 Oktober 2018.

¹²⁵ Wawancara dengan Hartoyo, *Op. Cit.*

2	2005	Insiden pembakaran rumah kembali terjadi di Desa Palas Pasemah yang melibatkan warga Bali Agung dari Kecamatan Ketapang.
3	2009	Kali ini masyarakat Bali di Kecamatan Ketapang terlibat dalam tindakan anarkis berbau SARA, yaitu melakukan aksi pelemparan terhadap rumah ibadah kaum muslim di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang.
4	2010	Kerusuhan antar warga Bali Agung dan warga Desa Palas Pasemah kembali terjadi. Insiden ini mengakibatkan beberapa rumah warga terbakar dan satu orang warga Palas Pasemah meninggal dunia.
5	2010	Aksi premanisme yang melibatkan warga Bali seringkali terjadi. Ketegangan kali ini disebabkan oleh warga Bali dari Kecamatan Ketapang yang melakukan aksi pengrusakan terhadap pangkalan ojek dan gardu ronda yang terletak di perempatan Gayam Kecamatan Penengahan.
6	November 2011	Pada tahun ini aksi penyerangan oleh warga Bali kembali terjadi. Kali ini melibatkan warga Desa Balinuraga yang melakukan penyerangan terhadap warga Desa Marga Catur. Intensitas penyerangan bisa dikatakan cukup besar karena menyebabkan 27 rumah rusak berat, 10 rumah terbakar si jago merah, dan kerugian materil lainnya. Pada aksi penyerangan kali ini, warga Bali menggunakan ornamen yang menjadi ciri khusus adat dan istiadat Bali.
7	Januari 2012	Intensitas dan eskalasi konflik antar warga Bali dan suku Lampung semakin tahun terus meningkat. Pada awal tahun 2012 ini, kembali terjadi bentrokan yang disertai kekerasan warga Napal bersuku Bali bersengketa dengan warga Lampung asal Kota Dalam akibat perebutan lahan parkir. Persoalan yang tidak terpecahkan mengakibatkan bentrokan antar warga tidak terhindarkan. Insiden

		kekerasan ini mengakibatkan dua orang cedera, 60 rumah hancur total, 17 rumah, empat gudang, tujuh warung rusak, enam motor hangus dibakar, dan empat traktor rusak.
8	2012	Kelompok pemuda Balinuraga kembali melakukan kerusuhan di depan masjid Sidoharjo Kecamatan Way Panji. Hal ini tentu mengganggu proses ibadah dan takbiran umat muslim karena bertepatan dengan malam takbir.
9	Oktober 2012	Pada bulan Oktober konflik bernuansa primordial terjadi di Balinuraga Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan. Peristiwa ini mengakibatkan 16 orang tewas, 12 orang terluka, beberapa mengalami gangguan kejiwaan, pengungsi sebanyak 1.781, 11 unit kendaraan roda dua dan 3 unit kendaraan roda empat terbakar ludes, dan 402 rumah ludes terbakar, 1 sekolah SMP Dharma Bhakti rusak (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, informasi@menkokesra.go.id , 2012).
10		Ini belum termasuk insiden-insiden kecil lainnya dalam setiap hajatan suku Jawa, Palembang, maupun suku Lampung, para pemuda suku Bali selalu melakukan kerusuhan dengan cara bergerombolan.
Sumber: diolah dari berbagai sumber		

Data tersebut di atas memberikan gambaran bahwa konflik yang kerap kali terjadi di Lampung Selatan hampir selalu melibatkan kelompok pemuda warga Bali. Penyerangan dan aksi premanisme yang sering dilakukan terutama oleh pemuda Bali melahirkan stigma negatif tidak hanya di kalangan masyarakat pribumi Lampung tetapi juga kelompok etnis lain yang merasakan hal yang sama terhadap suku Bali. Kondisi yang demikian memperkuat stigma negatif tentang identitas warga Bali di

Balinuraga yang “arogan” sehingga berujung pada pecahnya konflik komunal sebagai titik kulminasi kebencian pada Senin, 29 Oktober 2012. Kurang lebih lima belas ribu massa dari berbagai daerah di Lampung melakukan penyerangan ke Desa Balinuraga menyebabkan jatuhnya puluhan korban jiwa dan ratusan rumah warga Bali dirusak dan dibakar.

Berdasarkan deskripsi di atas terlihat bahwa setidaknya konflik Balinuraga terjadi karena berkembangnya stereotip penduduk lokal Lampung terhadap penduduk Bali yang didukung dengan fakta lapangan bahwa, 1) sikap dan perilaku pemuda Desa Balinuraga cenderung arogan; 2) pemuda Balinuraga sering melakukan kerusuhan dan memancing timbulnya masalah, sehingga penduduk Bali dianggap telah mencederai harga diri dan martabat penduduk Lampung; 3) bersatunya kelompok suku Lampung dari seluruh Provinsi Lampung untuk melakukan penyerangan terhadap warga Bali di Balinuraga.

Selain itu, siklus konflik dan damai yang terus menerus terulang hingga menahun menjadi bukti bahwa upaya perdamaian tidak secara efektif menyentuh dan melibatkan masyarakat bawah (*grassroot*).¹²⁶ Hal ini menegaskan adanya pola penanganan konflik yang lamban, seperti lambannya aparat pemerintah dalam merespon dan mengupayakan perdamaian.¹²⁷ Dikutip dari Laporan Penelitian LPM Unkris, bahwa terulangnya konflik Lampung menjadi indikator kegagalan pemerintah khususnya aparat keamanan yang tidak mampu melakukan tindakan preventif atau deteksi dan cegah dini terhadap kemungkinan munculnya konflik kekerasan yang melibatkan etnis Bali dan penduduk lokal tersebut. Aparat keamanan gagal dalam mende-eskalasi ketegangan dan mencegah

¹²⁶ “Oleh karena itu, lanjut Rizani, seorang tokoh masyarakat Lampung, pimpinan dan aparat keamanan untuk tidak hanya menyelesaikan setiap kasus di level permukaan. Terlebih hanya dengan tekan menekan di level pimpinan. “Saya sangat *concern* dengan kasus Balinuraga,” tandasnya.” Dikutip dari Eva Nila Sari, “Komnas HAM Dorong Penyelesaian Konflik Horizontal Lampung”, *Wacana HAM* Edisi IV/Tahun XIII/2015, hlm. 3-6.

¹²⁷ Kajian Perdamaian dan Kebijakan, “Peta Kekerasan Indonesia”, hlm. 15-22.

konflik kekerasan karena intervensi dilakukan setelah konflik mulai meluas dan melebar.¹²⁸

kedua, faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dianggap diskriminatif, seperti halnya persaingan atas akses terhadap sumberdaya, dan tingginya disparitas ekonomi antar anggota masyarakat yaitu suku Bali dan penduduk lokal baik dari segi pendapatan maupun penguasaan dan kepemilikan tanah.

Syarief Makhya, ahli kebijakan publik Universitas Lampung berpendapat bahwa salah satu akar persoalan mendasar yang sering melatarbelakangi terjadinya sebuah konflik antara kelompok pribumi dan pendatang adalah kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Kebijakan pemerintah Lampung dianggap mencederai nilai keadilan karena menguntungkan salah satu pihak yaitu kelompok pendatang, misalnya gencarnya animo pemerintah dalam mengembangkan daerah transmigran berdampak pada munculnya disparitas yang cukup signifikan antara kelompok pendatang dengan pribumi. Hal ini terlihat dengan lebih majunya perkampungan di daerah transmigran dibanding dengan perkampungan suku asli Lampung, baik dari segi kehidupan ekonomi maupun sarana dan infrastruktur, seperti jalan, fasilitas kesehatan dan unit pelayanan sosial lainnya.¹²⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh Rizani Puspa Jaya selaku Dewan Pakar Majelis Penyeimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung bahwa konflik Balinuraga merupakan dampak dari kecemburuan sosial yang sudah lama dirasakan sejak program transmigrasi dimulai. Terjadi perbedaan yang timpang antara kelompok pribumi dan pendatang dari segi sarana prasarana sekolah, bahkan program-program pemerintah daerah menurutnya tidak menjangkau kampung asli pribumi. Hal ini

¹²⁸ Laporan Penelitian LPM Unkris, dalam <http://eprints.ipdn.ac.id/9/2/ISI.pdf>, diakses pada 20 Juli 2018.

¹²⁹ Syarief Makhya, *Kerusuhan Antaretnis dan Problem Integrasi di Lampung*, dalam Merajut Jurnalisme Damai di Lampung, (Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung, 2012), hlm. 55-56.

menyebabkan stigma negatif bahwa orang Lampung suka “memalak” di jalanan karena memang sarana dan prasarana di kampungnya tidak ada selama bertahun-tahun, sehingga mereka (suku Lampung) duduk-duduk di pos, lalu saat orang luar datang dimintai dana “retribusi” (pungutan liar).¹³⁰

Namun, jika dilihat dari data BPS Kabupaten Lampung Selatan terkait jumlah sekolah SD, SMP, SMA di kedua desa, yaitu Agom dan Balinuraga, dapat dilihat bahwa kesenjangan sarana prasarana pendidikan tidak begitu nampak signifikan bahkan cenderung seimbang. Sebagai catatan penting bahwa Kecamatan Kalianda terdiri dari 29 Desa termasuk Desa Agom, sementara Desa Balinuraga merupakan bagian dari Kecamatan Way Panji yang hanya terdiri dari 4 Desa.

Tabel 4.6 Banyaknya SD, SMP dan SMA Menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Lampung Selatan, 2017

Wilayah		SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
Desa	Agom	5	2	2	9
	Balinuraga	3	1	-	4
Kecamatan	Kalianda	58	23	16	97
	Way Panji	11	5	1	17

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan 2018

Berbeda halnya saat melihat data BPS terkait jumlah sarana dan tenaga kesehatan di masing-masing desa, yaitu Agom dan Balinuraga, serta masing-masing kecamatan, baik Kalianda maupun Way Panji. Apabila ditinjau berdasarkan jumlah sarana kesehatan yang ada, Desa Balinuraga memiliki kuantitas yang lebih banyak dibandingkan sarana kesehatan di Desa Agom, yaitu 1 : 5. Begitupun dengan jumlah tenaga

¹³⁰ Hasil wawancara penelitian sebelumnya mahasiswa Universitas Lampung dengan Rizani Puspa Wijaya, S.H selaku Dewan Pakar MPAL Provinsi Lampung; dalam <http://digilib.unila.ac.id/2253/14/LAMPIRAN.pdf>; diakses pada 20 November 2018.

kesehatan yang ada, jumlahnya 1 berbanding 7, 1 Desa Agom dan 7 Desa Balinuraga. Tidak jauh berbeda pada level kecamatan, Kecamatan Kalianda dengan 29 Desa memiliki jumlah sarana dan tenaga kesehatan yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan Kecamatan Way Panji yang hanya terdiri dari 4 desa.

Tabel 4.7 Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan, 2017

Kategori	Tipe	Desa		Kecamatan	
		Agom	Balinuraga	Kalianda	Way Panji
Sarana Kesehatan	Puskesmas Induk	-	-	2	1
	Puskesmas Pembantu	1	1	11	1
	Poskesdes	1	7	7	7
	Posyandu	4	23	105	23
	Rumah Bersalin	-	-	4	-
	Praktek Dokter	-	-	10	4
	Balai Pengobatan	-	-	16	1
Jumlah		6	31	155	37
Tenaga Kesehatan	Dokter	-	-	5	4
	Bidan	1	5	57	13
	Dukun Bayi	-	2	24	4
Jumlah		1	7	86	21

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan 2018

Persoalan kesenjangan ini oleh para penganut kulturalis sering dipahami sebagai fenomena ketertinggalan suku asli Lampung yang tidak memiliki resistensi untuk bersaing seiring dengan derasnya arus masuk pendatang dari Pulau Jawa ke Lampung dengan berbagai kecanggihannya. Misalnya, kelompok pendatang cenderung memiliki etos kerja yang tinggi dibandingkan kelompok suku asli Lampung. Namun landasan tesis ini tidak cukup kuat, karena jika ditinjau secara historis sebelum kedatangan para transmigran di tanah Lampung, penduduk asli sudah memiliki tradisi pertanian lahan kering yang mapan dan kuat, tercermin dari kemasyhuran tanah Lampung di berbagai negara Eropa waktu itu sebagai daerah penghasil lada, kopi dan rempah-rempah yang

menjadi komoditas utama dan berharga. Tradisi pertanian ini secara tidak langsung memansuhkan argumen bahwa orang Lampung tidak memiliki etos kerja yang tinggi.

Berdasarkan analisis demikian, Makhya menegaskan bahwa keterbelakangan suku pribumi sebenarnya banyak disebabkan oleh persoalan struktural yang menjadikan suku asli Lampung tertinggal. Realitas ketertinggalan ini selanjutnya menciptakan ruang kecemburuan sosial yang mengakibatkan munculnya benih-benih konflik. Pribumi tidak mampu bertahan dalam tradisi kehidupan pertanian mereka yang khas karena sistem pertanian kelompok pendatang jauh lebih maju dan berkembang.¹³¹ Fakta ini menyebabkan sebagian besar generasi mendatang beralih profesi di luar sektor pertanian, seperti buruh pabrik, dan sopir. Namun demikian, upaya yang dilakukan belum mampu menciptakan kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan ekonomi antara pribumi dan pendatang. Sedangkan penduduk kelas menengah dan elit asli Lampung yang cukup sejahtera secara ekonomi, dan mampu mengenyam pendidikan hingga level sarjana. Sebagian besar berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di sektor pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil pengamatan Makhya selama ini, mereka yang duduk di kursi pemerintahan dapat dikatakan cukup berhasil.

Singkat kata, jika faktor sosial ekonomi tidak segera ditangani oleh pemerintah, maka potensi konflik laten di Lampung dapat berkembang menjadi konflik terbuka. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat pribumi merasa didiskriminasi dimana pemerintah dianggap memberikan sarana dan fasilitas kehidupan yang layak bagi penduduk pendatang, sementara penduduk asli tidak berkembang. Meskipun dalam hal ini peneliti tidak menafikan bahwa faktor lain seperti agama, etnik dan lokalitas dapat menambah kerasnya intensitas konflik.

¹³¹ Syarief Makhya, *Op. Cit.*

Ketiga, transmigrasi.¹³² Lampung sebagai salah satu wilayah tujuan transmigrasi dapat dikatakan cukup berhasil. Migrasi yang terjadi sejak beberapa abad lalu telah mewarnai sejarah masyarakat Lampung. Sejarah membuktikan bahwa etnis Jawa menjadi penduduk mayoritas di tanah Lampung, sedangkan penduduk pribumi asli Lampung menjadi minoritas dari segi kuantitas karena posisinya yang terus terhimpit oleh para transmigran dari Pulau Jawa dan daerah lainnya.

Transmigrasi dalam kurun waktu satu abad terakhir dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode, yaitu (1) masa kekuasaan kolonial Belanda, tahun 1905-1941, (2) periode pendudukan tentara Jepang antara tahun 1942-1945, dan terakhir (3) masa kemerdekaan Indonesia hingga reformasi, sejak tahun 1945 hingga tahun 2005. Jika dirinci lagi menjadi perodesasi yang lebih kecil maka transmigrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa masa, yaitu zaman pemerintahan kolonial Belanda sebagai tahap awal percobaan dijalankannya program kolonisasi antara tahun 1905-1911, selanjutnya periode *Lampongsche volksbanks* tahun 1911-1929, kemudian zaman depresi ekonomi dunia periode tahun 1930-1941, dan terakhir pasca kemerdekaan Indonesia yang diklasifikasikan lagi menjadi masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi.¹³³

1. Periode kolonisasi (1905-1942)

Kebijakan kolonisasi pada tahun 1905 oleh pemerintah kolonial Belanda dilatarbelakangi, 1) melaksanakan salah satu program politik etis yaitu emigrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan memperbaiki taraf kehidupan yang masih rendah, 2) pemilikan lahan di tanah Jawa yang semakin sempit, 3) kebutuhan terhadap tenaga kerja di daerah perkebunan dan pertambangan di luar Jawa.

¹³² Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk horizontal atas inisiatif pemerintah yang khas Indonesia dan telah menjadi program yang sudah diimplementasikan sejak lama. Secara lebih spesifik transmigrasi adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang berpenduduk padat ke wilayah lain yang berpenduduk jarang di luar Pulau Jawa, dalam Buchori Asyik & Trisnaningsih, *Provinsi Lampung dari Daerah Penerima menjadi Potensi Daerah Pengirim Transmigran*, (Yogyakarta: Histokultura, 2015), hlm. 13.

¹³³ *Ibid*, hlm. 13-14.

Tahun 1905, sebanyak 155 kepala keluarga (KK) petani dari Kedu, Jawa Tengah dipindahkan ke desa baru yang didirikan dekan Gedong Tataan, Lampung Selatan. Daerah ini kemudian dikenal dengan sebutan Begelen karena mereka berasal dari Begelen, Jawa Tengah. Yang memilih lokasi tersebut adalah HG Heyting, asisten Residen Kedu. Inilah yang menghendaki agar calon-calon kolonis itu dipilih secara selektif, yaitu harus terdiri dari petani-petani yang sehat dan kuat. Kebijakan ini merupakan program yang mahal karena semua biaya termasuk seluruh alat kebutuhan untuk membangun hidup ditanggung negara.

Tabel 4.8 Jumlah Transmigran Masuk Lampung Periode Kolonisasi

Tahun Penempatan	Daerah Asal	Lokasi	Jumlah			Rata-rata ART
			KK	%	Jiwa	
I. 1905-1911	Kedu, Banyumas	Gedong Tataan	705	1,38	3.610	5,12
II. 1912-1922	Kedu, Banyumas, Tulung Agung, Kediri	Gedong Tataan, kota Agung	4.596	9,01	20.379	4,43
III. 1932-1942	Eks Buruh Kontrak, Madura	Gedong Tataan, Sukadana	45.705	89,96	182.370	3,99
Jumlah			51.006	100,00	206.359	4,59

Sumber: Buku Data Ketransmigrasian dan Kependudukan (2005).

Data pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah kolonis yang masuk pada periode kolonisasi sebanyak 51.006 KK atau 206.359 jiwa dengan masing-masing Anggota Rumah Tangga (ART) terdiri dari 4,59 jiwa. Jumlah koloni terbanyak pada periode ketiga (1932-1942) yaitu sebanyak 45.705 KK (182.370 jiwa). Sementara pada periode I (1905-1911) jumlah kolonis yang masuk ke Lampung paling sedikit yaitu sebanyak 705 KK atau sejumlah 3.610 jiwa, namun rata-rata jumlah ART nya sebesar 5,12

jiwa lebih tinggi dari dua periode lainnya yaitu periode II (4,43 jiwa) dan periode III (3,99 jiwa).

2. Periode Pra Pelita (1950-1969)

Sejak tahun 1950 istilah pemindahan penduduk tidak lagi disebut kolonisasi melainkan transmigrasi. Penempatan penduduk dilaksanakan di Sukadana Kabupaten Lampung Tengah sejumlah 23 KK (77 jiwa) asal Kedu Jawa Tengah. Pada periode ini (Pra Pelita) penduduk yang dipindahkan sebanyak 53.263 KK, 221.035 jiwa dengan rata-rata ART 4,15 jiwa.

Masih pada periode ini, tepatnya saat gunung Merapi meletus pada awal tahun 1960-1962 yang mengakibatkan satu desa tertutup lahar. Peristiwa meletusnya Gunung Merapi memakan banyak korban jiwa. Akibat dari bencana tersebut masyarakat Kelurahan Kali Gesik, Kecamatan Srumbung, bedol desa ke Pulau Sumatera. Setiap keluarga yang transmigrasi mendapatkan jatah lahan tanah seluas 50 Ha dengan jaminan dari pemerintah yang belum berpenghasilan berupa kupon dan dibuatkan gubuk.¹³⁴ Dari kejadian inilah muncul istilah *transmigrasi bedol desa*¹³⁵.

3. Periode Pelita (Pelita I sampai dengan Pelita VI)

Pada periode ini mulai dari tahun 1969 sampai dengan tahun 2005, jumlah penduduk yang berhasil dipindahkan ke Provinsi Lampung sebanyak 184.570 KK (704.307 jiwa) dan penduduk yang keluar Provinsi Lampung dengan rincian pada tabel berikut.

¹³⁴ Budi Susanto, S.J. (editor), *Penyam(b)un(g) Suara Lidah Rakyat*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), hlm. 51.

¹³⁵ Transmigrasi bedol desa berarti pemindahan penduduk beserta pemerintahannya ke suatu wilayah yang baru tanpa merubah ataupun menghilangkan hak dan kewajiban pemerintah desa dan masyarakat desa.

Tabel 4.9 Jumlah Transmigran Masuk/Keluar Lampung Pelita I/VI

Periode Pelita	Masuk			Keluar		
	KK	%	Jiwa	KK	%	Jiwa
I (1969/1970-1973/1974)	15.539	8,42	69.058	-	-	-
II (1974/1975-1978/1979)	6.500	3,52	28.999	-	-	-
III (1979/1980-1983/1984)	64.035	34,69	259.208	-	-	-
IV (1984/1985-1988/1989)	62.892	34,07	242.383	887	41,12	3.899
V (1989/1990-1993/1994)	21.736	11,78	87.087	300	13,91	1.194
VI (1994/1995-1998/1999)	13.868	7,51	53.635	970	44,97	3.291
Jumlah	184.570	100,00	704.371	2.157	100,00	8.384

Sumber: Buku Data Ketrasmigrasian dan Kependudukan (2005)

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa jumlah transmigran terbanyak yang ke Provinsi Lampung pada periode Pelita III (34,69%) dan Pelita IV (34,07%). Sementara itu, mulai pada Pelita IV Provinsi Lampung mengawali program pengiriman transmigran ke luar Lampung dan dilanjutkan pada periode seterusnya.

4. Periode Pasca Pelita (1999/2000-2005)

Pada periode ini selain melaksanakan penempatan TPS (Transmigrasi Penduduk Setempat) juga dilaksanakan penataan TSM, yaitu transmigrasi swakarsa mandiri. Jumlah penduduk yang masuk sebanyak 2.250 KK (3.924 jiwa), sedangkan penduduk yang keluar sejumlah 75 KK (276 jiwa).

Tabel 4.10 Rekapitulasi Transmigran Masuk dan Keluar Povinsi Lampung

Periode	Masuk			Keluar		
	KK	%	Jiwa	KK	%	Jiwa
Kolonisasi	51.006	17,52	206.359	-	-	-
Pra Pelita	53.263	18,29	221.035	-	-	-
Periode Pelita	184.570	63,41	704.371	2.157	96,64	8.384
Sesudah Pelita	2.250	0,77	3.924	75	3,37	276
Jumlah	291.089	100	1.135.689	2.232	100	8.660

Sumber: Buku Data Ketransmigrasian dan Kependudukan (2005)

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa transmigrasi masuk Lampung terbanyak pada periode Pelita sebesar 63,41%. Sesudah masa Pelita, arus masuk transmigran ke Lampung cenderung menurun. Jenis transmigrasi yang pernah diselenggarakan oleh pemerintah adalah transmigrasi umum, lokal dan swakarsa (spontan).

Menurut hasil sensus BPS tahun 2010 (sensus kekesukubangsaan), dari sekitar tujuh juta jiwa penduduk Lampung, jumlah etnik Lampung hanya 11,92% hampir seimbang dengan etnik Sunda (termasuk Banten) yang jumlahnya 11,27%, sementara suku Jawa menjadi mayoritas penduduk di tanah Lampung dengan prosentase sebesar 61,88%. Sisanya adalah etnik Semendo dan Palembang sebesar 3,55% dan suku bangsa lainnya berjumlah 11,35%.¹³⁶

Melihat data dan sejarah transmigrasi Provinsi Lampung di atas semakin menegaskan bahwa etnik Lampung berada dalam posisinya yang minoritas di tengah himpitan penduduk pendatang dan kemajemukan suku bangsa di tanahnya sendiri. Faktor ini tidak dapat diabaikan karena dapat berkontribusi terhadap “marginalisasi” etnik pribumi dan berpotensi menjadi konflik laten yang sewaktu-waktu ada pemicu dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

¹³⁶ Risma Margaretha Sinaga, *Revitalisasi Budaya: Strategi Identitas Etnik Lampung*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hlm. 48.

Keempat, Syarief Makhya dalam tulisannya yang berjudul, “Kerusuhan Antaretnis dan Problem Integrasi di Lampung”, menambahkan bahwa faktor politik atau kontestasi politik juga menjadi salah satu pemicu meluasnya konflik di Lampung.¹³⁷ Pasca tumbang rezim Orde Baru, politik identitas menjadi komoditi seksi dalam ajang perebutan jabatan politis. Isu terkait etnisitas diangkat dan dikemas dalam produk berlabel putra daerah. Umumnya penduduk asli Lampung sangat menghendaki agar “putra daerah” dijadikan sebagai kriteria persyaratan utama dalam pemilihan pejabat publik seperti bupati, walikota dan gubernur. Hampir sebagian besar atau bahkan seluruh daerah di Indonesia memproduksi isu putra daerah sebagai wacana politik yang layak dijual demi mendulang suara dalam pemilihan jabat politis.

Hanya saja di Provinsi Lampung muncul pendefinisian “putra daerah” yang beragam sehingga kriteria putra daerah tidak dijadikan sebagai persyaratan formal dalam pencalonan diri sebagai pejabat publik. Meski secara *de jure* tidak memiliki implikasi politik dalam kontestasi pemilihan umum, tetapi isu putra daerah tetap menyisakan potensi konflik tersembunyi (laten) antara pribumi dan penduduk pendatang. Misalnya saja, secara *de facto*, politik identitas tetap berkembang menjadi komoditas pencari dukungan atau *vote getter*, bentuknya dalam kontestasi politik dimunculkan dalam bahasa-bahasa sinisme yang menyudutkan salah satu pihak, seperti “bukan orang kita” atau “tidak memprioritaskan orang impor”.

Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan keragaman secara politis belum bisa diselesaikan. Apabila dibiarkan, dampaknya dapat menciptakan disintegrasi bangsa, meskipun isu politik identitas ini lebih kentara dan kental di kalangan elit daripada masyarakat bawah. Bagaimanapun hal ini tidak dapat dipelihara atau diabaikan, sehingga

¹³⁷ Lihat Makhya, Syarief, *Kerusuhan Antaretnis dan Problem Integrasi di Lampung*, dalam buku *Merajut Jurnalisme Damai di Lampung*, (Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung, 2012), hlm. 57.

suatu saat terjadi konflik tidak akan memberikan ruang bagi terciptanya konflik yang lebih keras.

Terlepas dari berbagai faktor di atas, peneliti berkesempatan mewawancarai Erdiansyah selaku Camat Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang menegaskan bahwa tidak ada variabel tunggal yang menyebabkan meletusnya konflik Balinuraga. Semua bisa dijadikan sebagai variabel penyebab, bahwa penyebabnya adalah faktor ekonomi, benturan nilai dan budaya, suku, semuanya saling mendukung namun awal pemicunya hanya sebatas perselisihan dan kenakalan remaja.¹³⁸ Peneliti berada pada posisi yang sama dalam hal ini, yaitu melihat setiap faktor sebagai elemen yang saling mendukung, hanya pada tingkat mana dan pada level mana faktor tersebut berkontribusi pada intensitas kerasnya konflik akan dikaji dalam bab pembahasan terkait tiga faktor penyebab konflik laten menjadi konflik terbuka yaitu, faktor struktural, akselerator, dan triger.

4.2.2 Upaya Transformasi Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga

Bagian ini merupakan inti dan jiwa dalam penelitian. Namun dalam proses melakukan transformasi konflik, peneliti harus mengerti dan memahami terlebih dahulu berbagai upaya resolusi konflik yang telah dilakukan sebelumnya, karena resolusi konflik merupakan bagian dari tahapan pembangunan perdamaian yang dilakukan sebelum menuju kepada proses transformasi konflik.

4.2.2.1 Upaya Penanganan Konflik yang Pernah Dilakukan

Beberapa upaya resolusi dan mempertemukan kedua belah pihak sudah dilakukan baik oleh pemerintah ataupun lembaga terkait. Diantara upaya pencapaian solusi bersama, adalah sebagai berikut:

¹³⁸ Wawancara dengan Erdiasyah selaku Camat Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan di Kantor Kecamatan Kalinada, pada 4 Oktober 2018.

1. 30 oktober tahun 2012

Pada tanggal 30 Oktober 2012, pukul 10.00 s.d 13.30 WIB di ruang rapat Asisten Sekprov Lampung diadakan pertemuan antara perwakilan masyarakat Lampung dengan perwakilan masyarakat Balinuraga. pertemuan tersebut dipimpin oleh Ir. Arinal Djunaidi (Asisten 2 Bidang Ekonomi) dan dihadiri oleh: 1) Joko Umar Said (Wagub Lampung); 2) Ir. Fahrizal Darminto (Asisten 1 Bidang Pemerintahan); 3) Sutan Syahrir Oelangi (Ketua FOKMAL); 3) Drs. Hamzah AS (Ketua MPAL); 4) I Made Suwetja (PHDI Lampung); 5) 11 orang pengurus PHDI (Prov. Lampung dan Kemenag); 6) Temanggung Arifin Mangkunegara (Legun/paman Nurdiana Dewi/Gadis Lampung Korban); 7) Temanggung Niti Jaman (Kalianda); 8) Muchsin Gelar Batin (Desa Kasugihan Lamsel); 9) Rusman Effendi (Mantan Ketua Golkar Lamsel); 10) warga Kalianda dan 50 orang undangan.¹³⁹

Hasil dari rapat tersebut adalah:

1. Temanggung Arifin Mangkunegara mewakili warga Lampung menuntut ditegakkannya perjanjian damai tanggal 27 Januari 2012 antara warga Bali dengan warga Lampung di Dusun Napal Kecamatan Sidomulyo, dimana salah satu butir kesepakatan damai adalah "Warga Bali bersedia pindah atau meninggalkan Lampung Selatan jika kembali terjadi kerusuhan". Selama klausul itu belum ditegakkan, warga adat Lampung Kalianda akan menolak semua proses damai yang difasilitasi oleh siapapun.¹⁴⁰
2. I Made Suwetja (Ketua PHDI Lampung) menyesalkan terjadinya kembali kerusuhan warga Bali dengan warga Lampung. Parisade telah berulang kali mengingatkan warga Bali agar membaur dan tidak eksklusif. PHDI mempersilahkan dan membantu aparaturnya keamanan memproses dua pemuda Bali yang menjadi pemicu kerusuhan. Parisade juga akan memberlakukan hukum adat yakni

¹³⁹ Lapsus Komando Resort Militer 043/Gatam Lampung Selatan Tahun 2012 (Dokumen Rahasia).

¹⁴⁰ *Ibid.*

pengusiran kepada para pelaku kerusuhan dari kampung Balinuraga, pengusiran juga akan dilakukan kepada pemicu kerusuhan di Napal Sidomulyo.¹⁴¹

2. 6 November 2012

Kunjungan kerja Menko Kesra ke Lampung Selatan pada Tanggal 6 November 2012 didampingi oleh Mendagri, Mensos, Menpera, Wamenkes, Sekjen Menag dan pejabat dari K/L terkait serta perwakilan dari Mabes POLRI. Maksud dan tujuan Kuncker adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan secara langsung di daerah tentang akar permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat.¹⁴²

Bantuan Pemerintah Pusat yang diserahkan yaitu: (a) Bantuan Kemosos untuk program keserasian sosial, sebesar: Rp. 2.834.000.000, dan Buffer stock (berupa sandang, pangan, tenda dan peralatan dapur) senilai Rp. 255.810.000,- ; (b) Biaya rehabilitasi rumah dengan besaran Rp. 11.000.000,- per 1 Unit rumah, dikalikan 411 = Rp. 4.521.000.000,- dari Kemenpera.¹⁴³

3. 14 November 2012

Telah dilakukan Perjanjian perdamaian antara warga masyarakat Lampung Selatan yang berasal dari suku lampung dan Suku Bali pada tanggal 14 November 2012. Ada 10 butir isi perdamaian (baca lampiran) yang disepakati oleh kedua belah pihak dan harus ditaati. Perjanjian tersebut terbukti cukup efektif mencegah terulangnya kembali konflik serupa.

4. 21 November 2012

Berdasarkan pada tuntutan kedua belah pihak (suku Lampung dan Bali) untuk melibatkan masyarakat bawah (*grassroot*) dalam upaya kesepakatan perjanjian damai maka keluar Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/685/B.II/HK/2012 tentang deklarasi dan sosialisasi perdamaian masyarakat Lampung Selatan yang dilaksanakan pada

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2012.

¹⁴³ *Ibid.*

tanggal 21 November 2012, bertempat di Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Kegiatan deklarasi berjalan dengan tertib dan lancar dan dihadiri oleh undangan berjumlah lebih dari 5000 orang yang terdiri dari: Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), Kelompok Masyarakat Lampung (POKMAL), Tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta tokoh pemuda dari kedua belah pihak, Perwakilan dari 17 Kecamatan di Lampung Selatan, Utusan kementerian Sosial, dan Anggota FORKOMINDA Lampung Selatan.¹⁴⁴

Beberapa upaya penanganan konflik Balinuraga di atas, dianggap cukup efektif melihat tidak adanya lagi konflik terbuka yang muncul ke permukaan pasca kerusuhan Balinuraga tahun 2012 silam. Kepala Desa Balinuraga, Made Santre, ikut menegaskan bahwa penyelesaian konflik telah menyentuh hingga ke akar-akarnya sebab pemerintah dan pihak kepolisian telah melakukan beberapa kali *islah* antar kedua belah pihak bahkan membuat acara perdamaian yang besar sebanyak dua kali, pertama di Agom Kecamatan kalianda, dan kedua di Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo.¹⁴⁵ Menurutnya (Made Santre) peristiwa tersebut memberikan hikmah bahwa anak-anak muda saat ini lebih mudah diarahkan, kedua belah pihak saling berhati-hati dalam membina hubungan sehingga kondisi aman dan damai tetap terjaga.¹⁴⁶

Selain itu dalam prosesi perdamaian juga digunakan upacara adat Lampung, *angkon muwakhi atau angken muari* (angkat saudara), yang dalam tradisi adat Lampung dijadikan sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Maka warga Lampung mengangkat warga Bali sebagai saudara, sehingga sesama saudara tidak boleh saling menyakiti dan harus sama-sama membina hidup yang harmoni.

¹⁴⁴ Kemenkokesra, *Op.Cit.*

¹⁴⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Balinuraga, Made Santre, di Kantor Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, pukul 09.00-10.11 tanggal 5 Oktober 2018.

¹⁴⁶ *Ibid.*

Dari data di atas dapat dirangkum berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam lembaga terkait dalam menangani konflik sosial antar-etnis di Balinuraga, yaitu 1) Aparat keamanan segera mengambil langkah pengamanan dan meredakan kerusuhan; 2) Pemda telah mengambil langkah mempertemukan kedua pemuka masyarakat yang bertikai untuk menandatangani perjanjian damai. Pemda provinsi merencanakan untuk mensosialisasikan perjanjian damai tersebut kepada semua warga yang terlibat konflik; 3) *Assessment* dan verifikasi kerusakan dan perencanaan rehabilitasi bangunan yang rusak masih sedang dalam proses.

4.2.2.2 Upaya Transformasi Konflik

Kesepakatan damai dalam beberapa kasus konflik kekerasan masih belum cukup, sehingga probabilitas kemunculan konflik susulan masih tinggi jika akar persoalannya tidak secara tuntas diselesaikan. Sebuah konflik kekerasan yang terjadi akan menimbulkan dampak kerugian baik secara materi maupun imateri serta meninggalkan efek traumatis baik pada pihak korban maupun pelaku. Kondisi yang demikian, menuntut adanya upaya *peacebuilding* untuk memulihkan situasi dan kondisi fisik, psikologis dan sosiokultural yang terganggu akibat konflik.

Thania Paffenholz dalam tulisannya "*Understanding Peacebuilding Theory: Management, resolution and transformation*" menjelaskan bahwa *peacebuilding* merupakan bagian dari tahap penanganan konflik yang fokus pada proses untuk mencapai perdamaian jangka panjang. Paffenholz membagi pendekatan *peacebuilding* kedalam tiga aliran pemikiran utama yaitu, manajemen, resolusi dan transformasi konflik.¹⁴⁷ Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam upaya transformasi konflik yang dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga terkait maupun masyarakat, sehingga substansi penelitian tidak menyinggung banyak kedua aliran pemikiran sebelumnya, yaitu manajemen dan resolusi.

¹⁴⁷Thania Paffenholz, "Understanding Peacebuilding Theory: Management, resolution and transformation", *New Routes A Journal of Peace Research and Action*, Vol. 14 (2), 2009, hlm. 3.

Peneliti membuat garis pembedaan antara manajemen, resolusi dan transformasi konflik. Bahwa manajemen konflik bertumpu pada upaya bagaimana mencegah konflik laten tidak pecah menjadi konflik terbuka. Namun saat konflik laten berubah menjadi manifes, maka upaya pencarian solusi untuk menghentikan kekerasan itu disebut sebagai resolusi.¹⁴⁸ Sementara transformasi konflik merupakan proses perdamaian jangka panjang yang di dalamnya mencakup berbagai usaha untuk merekonstruksi hubungan baru, membangun *trust*, empati dan kerjasama melalui rekonsiliasi dan penguatan ketahanan sosial baik pada level personal, relasional, struktural maupun kultural.

Pasca terjadinya konflik sosial antaretnik Bali dan Lampung di Balinuraga terdapat banyak perubahan baik dalam pola hubungan personal, interpersonal, intrakomunal dan interkomunal, mulai ada penguatan budaya, revitalisasi identitas, dan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan keserasian sosial¹⁴⁹ guna memperkokoh ketahanan sosial.

1. Transformasi Personal

Pasca berakhirnya konflik kekerasan di Balinuraga pada tanggal 29 Oktober 2012, berbagai pihak mengakui telah banyak perubahan sikap dan perilaku baik secara personal maupun komunal di antara kedua belah pihak yang berkonflik. Hal ini tergambar dalam penjelasan yang dituturkan oleh Kasi Pemerintahan Desa Agom saat peneliti temui di Kantor Desa Agom bahwa:

¹⁴⁸ John Paul Lederach, *et al. Reflective Peacebuilding: A Planning, Monitoring, and Learning Toolkit*, (Notre Dame: The Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, 2007), hlm. 17.

¹⁴⁹ Keserasian sosial (social harmony) diartikan sebagai: "suatu kondisi kehidupan bersama antar kelompok sosial yang guyub (tampak selaras), rukun (dirasa serasi) dan saling menguntungkan (hasil seimbang)". Ketiga unsur tersebut bekerja secara sinergis dan 'dinamis' karena dalam realitasnya tidak ada suatu masyarakat yang ekstrim serasi. Makna konsep "keserasian sosial" yang peneliti maksudkan adalah yang murni diinginkan dalam tatanan kehidupan bersama masyarakat manusia, bukan lekat dengan kekuasaan (power) yang secara historis sudah menyimpang dari makna esensinya, seperti tatanan masyarakat yang berlaku di Jawa dan tata kenegaraan Indonesia masa lalu. lihat Hartoyo, *Memutus Mata Rantai Konflik di Lampung*, dalam buku *Merajut Jurnalisme Damai di Lampung*, (Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung, 2012), hlm. 34.

*“... menurut informasi, setelah ditetapkan perjanjian kalau terjadi misalnya seperti ini lagi, maka hanya yang bersangkutan yang dikenakan sanksi itu. Oknumnya lah, jangan sampai membawa kelompok suku atau etnis tertentu. Kalo untuk hubungan selama ini ya masih baik ya, istilahnya ketika ada acara nyepi ogoh-ogoh kita diundang kesana gak apa-apa. Tapi sekarang memang sudah agak berkurang, kalo misal hiburan organ tunggal sekarang orang Balinya udah gak kaya dulu lah istilahnya, menguasai panggung. Bahkan sekarang kliatannya udah gak ada lagi. Jadi betul-betul ada perubahan hubungan yang signifikan pasca terjadinya konflik. Setelah konflik ini jelas betul perubahannya, kalau seperti dulu misalnya mereka (orang Bali) kalo ke pasar aja udah kaya seenaknya sendiri geber-geber itu. Sekarang setau saya udah jarang orang Bali yang mau kesini. Tapi walaupun kita lewat kesanapun gak ada masalah orang Jawa, Lampung asal kita memang sudah tau mereka, sekarang gak terjadi konflik lagi lah. Gak saling ngeliatin gitu itu, gak sekarang! kalo dulu memang pernah seperti itu. Kalo misal kita lewat dia ngeliat aja udah marah bawaannya. Kalo sekarang, semenjak konflik itu hingga sekarang belum pernah kejadian. Jadi bisa membatasi diri sekarang”.*¹⁵⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh beberapa narasumber baik dari pemerintahan desa, kecamatan, kesbangpol, warga dan akademisi. Perubahan sikap dan perilaku ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa konflik tidak akan meninggalkan efek positif, melainkan justru menimbulkan dampak kerugian bagi kedua belah pihak, baik kerugian materil maupun korban jiwa.

2. Transformasi Relasional: Menjalin Hubungan Kerja Sama

Sedangkan pada tataran hubungan personal dan interpersonal, menurut pengakuan semua narasumber telah tercipta hubungan yang baik seperti sedia kala. Terjalin hubungan kerjasama dan sosialiasi seperti biasanya. Bahwa dulu orang Bali memesan kebutuhan janur untuk kegiatan ibadah sehari-hari mereka dari desa Agom, begitupun saat ini. Terkadang mereka (suku Bali) yang mengambil sendiri janurnya, di lain

¹⁵⁰ Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Agom Kecamatan Kalianda di Kantor Desa Agom pada tanggal 5 Oktober 2018.

waktu juga sering diantarkan oleh suku Lampung ke Balinuraga.¹⁵¹ Kegiatan kerjasama ekonomi berjalan lagi seperti biasa, lalu lalang transportasi keluar masuk antar desa juga terasa biasa. Hal ini menunjukkan bahwa sudah mulai terbangun keserasian sosial, dan kesadaran bahwa ada kepentingan bersama yang lebih besar melampaui kepentingan personal dan kelompok yaitu menciptakan harmoni dalam hidup berdampingan sesama warga Lampung.

3. Transformasi Kultural: Penguatan Budaya dan Lembaga Adat

Penguatan budaya sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, institusionalisasi budaya *rembug pekon* melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung. Menurut Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Lampung Fajar Isnawan mengatakan,

“... FKDM ini lahir dari Lampung, etnis Lampung punya kebiasaan membiicarakan atau penyelesaian masalah dengan musyawarah bersama disebut rembug pekon, sehingga kemudian diangkat oleh Kapolda dan dikuatkan secara legal menjadi produk pemerintah terus kemudian kesbang melihatnya, wah ini cocok sekali ini untuk mendukung kinerja dan tupoksi kesbang, yaitu upaya deteksi dini. Sekalipun sekilas seperti tidak kerja tetapi itukan kebiasaan dan mengakar di kehidupan masyarakat, misal ada masalah tidak langsung ke pimpinan tetapi diselesaikan dulu di level keluarga, marga, karena peran tokoh tokoh adat itu lebih efektif daripada seorang kepala dinas menghimbau ini dan itu, agak sulit.”¹⁵²

Selanjutnya, perubahan juga terjadi pada *level individu as part of community*, artinya mulai muncul kesadaran komunal bahwa salah satu pemicu munculnya konflik Balinuraga adalah tumbuh kembangnya stereotip baik terhadap suku Bali maupun suku Lampung. Stereotip adalah *“pictures in our head”* kata Walter Lippman, yaitu persepsi yang dilekatkan kepada individu-individu dan kelompok-kelompok secara

¹⁵¹ Wawancara dengan Kades Balinuraga, *Op. Cit.*

¹⁵² Wawancara dengan Fajar Isnawan selaku Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Lampung di Kantor Kesbangpol Provinsi Lampung pada tanggal 27 September 2018.

gegabah dengan tanpa memperhitungkan keunikan-keunikan individual. Hal inilah yang kemudian memunculkan kesadaran untuk memperbaiki citra diri dan kelompok melalui revitalisasi budaya *pi'il pesenggiri* oleh suku Lampung dan kegiatan *pasraman* sebagai lembaga sosial keagamaan oleh suku Bali.

Selain melakukan institusionalisasi dan revitalisasi budaya, jejaring antara tokoh-tokoh adat dalam penguatan struktur adat Bali dan non-Bali (adat Lampung) juga semakin baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pecahnya konflik Balinuraga. Menurutnya, masih Hartoyo bahwa organisasi-organisasi adat selain sebagai alat bagi elit untuk mencapai kekuasaan juga berfungsi untuk penguatan adat.¹⁵³

4. Transformasi Struktural: Penguatan TNI/POLRI dan Kesbangpol

Selanjutnya, upaya-upaya penyelesaian konflik juga dilakukan dengan penguatan peran TNI/POLRI melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas.¹⁵⁴ Adanya peningkatan kesejahteraan bagi anggota TNI dan Polri serta pengurangan jumlah wilayah kontrol yang tadinya satu Babinsa atau Bhabinkamtibmas bisa mengawasi lebih dari tiga desa, saat ini menjadi tiga atau dua desa. Sehingga cukup signifikan untuk mengontrol masyarakat, serta memperkuat deteksi dan respon dini, misalnya tahun 2016 aparat keamanan mampu meredam potensi-potensi konflik itu yang mungkin bisa lebih besar dampaknya dari konflik di Balinuraga.

Lebih lanjut Sosiolog Universitas Lampung Hartoyo menandakan, bahwa telah banyak upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga terkait tetapi masih belum terkoordinir dengan baik. Pemerintah telah mencoba untuk memulihkan kembali kondisi pasca konflik dengan melakukan penguatan peran-peran institusi daerah seperti kesbangpol, FKUB hanya saja tingkat kordinasi diantara mereka belum nampak kuat. Artinya upaya yang dilakukan hanya sebatas konsekuensi logis dari jalur

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

fungsional sebagai bagian dari tanggung jawab, sehingga untuk melakukan penyelesaian dan pemulihan pasca konflik dimana rakyat benar-benar berada pada suatu kesadaran bahwa keselarasan sosial perlu dijaga, itu yang masih belum mampu direalisasikan.¹⁵⁵

Sehingga dalam mewujudkan transformasi konflik sebagai bagian dari proses panjang menciptakan perdamaian yang positif, dibutuhkan peran aktif dari multipemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga terkait dan masyarakat itu sendiri.

4.3 Pembahasan

Fokus penelitian dalam Thesis ini adalah “Transformasi Konflik Sosial Antar-Etnis Bali dan Lampung Dalam Rangka Mewujudkan Perdamaian Positif di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan”. Secara lebih spesifik, pembahasan dalam penelitian dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi subfokus penelitian, yaitu faktor-faktor penyebab eskalasi konflik laten menjadi konflik terbuka di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan; dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat dalam men-transformasi konflik di Balinuraga, Lampung Selatan untuk mewujudkan damai positif yang berkelanjutan

4.3.1 Faktor-faktor Penyebab Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga Menjadi Konflik Terbuka

Kemajemukan masyarakat Lampung yang terdiri atas beragam kelompok sosial vertikal dan horizontal perlu dikelola dengan baik secara berkelanjutan demi terciptanya *social harmony* yang diharapkan. Realitas historis menunjukkan bahwa konflik sosial menjadi unsur yang ikut mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Lampung. Hal ini merupakan konsekuensi dari dinamika hubungan dalam suatu komposisi masyarakat yang majemuk. Konflik merupakan bagian dari hukum alam yang tidak

¹⁵⁵ Wawancara dengan Dr. Hartoyo. *Op. Cit.*

tidak bisa dihindari, namun hal yang perlu dihindari adalah konflik destruktif yang memiliki tendensi terhadap timbulnya tindak kekerasan dan merusak. Kehidupan sosial yang ada mungkin saja tampak tenang, namun ternyata bersifat “semu” seperti yang digambarkan oleh Johan Galtung sebagai keadaan damai negatif. Sebuah kondisi tanpa perang tetapi menyimpan perolakan yang sewaktu-waktu ada pemicu terdapat kemungkinan beresklasi menjadi konflik terbuka.

Berbagai persoalan seperti ketidakadilan, diskriminasi, alienasi, dan eksploitasi seolah menjadi endemi yang berkembang di lahan subur yang rentan terhadap munculnya berbagai konflik kekerasan. Situasi yang demikian akan semakin berkembang ke arah konflik kekerasan apabila diperkuat dengan berkembangnya stereotip, *prejudice*, sentimen dan ego kelompok. Masyarakat Lampung yang majemuk memiliki karakter dasar yang khas seperti yang diteliti oleh Brunner (1974) di Medan Sumatera Utara, Aloysius (1994) di Kupang Nusa Tenggara Timur, Koentjaraningrat (1986), dan Berge (Dalam Nasikun, 1991). Karakter dasarnya adalah tersegmentasi, struktur sosial beragam, kurang dapat mengembangkan pikiran bersama, konflik laten sering berkembang menjadi konflik manifes, terintegrasi secara paksa, saling mendominasi, dan tidak terdapat referensi nilai budaya dominan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵⁶

Konflik kekerasan antar etnik Bali dan Lampung di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan memberikan indikasi bahwa ketahanan sosial yang terbentuk belum cukup kuat menopang keragaman yang ada sehingga konflik laten berkembang menjadi konflik terbuka. Ditinjau berdasarkan faktornya, konflik laten dapat bereskalasi menjadi konflik terbuka karena disebabkan oleh tiga hal, yaitu faktor struktural, faktor akselerator, dan faktor *trigger* atau pemicu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mulai dari bulan September hingga November 2018, ditemukan berbagai

¹⁵⁶ Hartoyo, *Memutus Mata Rantai Konflik di Bumi Lampung*, dalam buku *Merajut Jurnalisme Damai di Lampung*, (Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung, 2012), hlm. 34-35.

dimensi kehidupan yang menjadi ruang konflikual dan berkontribusi terhadap pecahnya konflik sosial antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga, yakni faktor sosial budaya, migrasi penduduk, ekonomi, dan kontestasi politik. Jika diklasifikasikan berdasarkan faktornya maka didapatkan gambaran umum sebagai berikut:

1. Faktor Struktural

Faktor struktural merupakan latar belakang yang menciptakan pra-kondisi konflik sosial. Faktor struktural biasanya berkaitan dengan disparitas akses dan kontrol sumber daya, kebijakan yang diskriminatif, kesewenangan dalam pengambilan keputusan serta adanya kesenjangan ekonomi yang inheren. Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor konflik, dan ditinjau dari aspek sosio historis provinsi Lampung, peneliti menemukan bahwa migrasi penduduk sebagai latar belakang yang menciptakan pra-kondisi konflik sosial di Provinsi Lampung terutama konflik di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

Lampung sebagai daerah tujuan transmigrasi yang dijalankan mulai dari masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1905 hingga masa reformasi, ternyata meninggalkan persoalan besar yang harus dihadapi pemerintah saat ini. Kondisi semacam ini secara signifikan berpengaruh terhadap dominasi pendatang, yang secara statistik, populasinya lebih besar dibandingkan penduduk lokal Lampung yang hanya sekitar 11,92% dari jumlah total penduduk Provinsi Lampung saat ini. Implikasi migrasi dan pergeseran dominasi adalah bentuk kemunduran etnik lokal.

Ketidakseimbangan proporsi tersebut membuat etnik Lampung terdesak oleh pendatang yang berkembang dan menguasai sumber-sumber strategis seperti ekonomi, lahan, dan dunia pendidikan. Senada dengan pernyataan di atas, Kepala Pusat Studi Kebudayaan Lampung Universitas Lampung, Nina Yuda mengatakan bahwa dalam kultur kehidupan orang Lampung memiliki gelar adat merupakan bagian dari keistimewaan dan harga diri yang disebut sebagai *Pi'il Pesenggir*. Semakin tinggi gelar adat yang dimiliki, maka akan semakin diakui dan

dihargai eksistensinya dalam lingkungan kehidupan sosial. Dalam adat Pepadun misalnya, gelar adat dapat dicapai berdasarkan *achievement* (kemampuan secara materi menggelar upacara adat yang disebut cakak pepadun). Contohnya, seseorang ingin mendapatkan gelar adat maka harus mengadakan pesta selama tujuh hari tujuh malam dan memotong kerbau sebanyak tujuh ekor. Hal semacam ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga saat kondisi ekonomi tidak memungkinkan, maka terjadi penjualan aset dari suku Lampung kepada etnik lain. Terjadilah peralihan aset-aset ekonomi dari suku Lampung terhadap penduduk pendatang, seperti Bali.¹⁵⁷

Dalam struktur masyarakat adat Lampung, tinggi rendahnya *pi'il pesenggiri* seseorang sedikitnya ditunjukkan pada tiga hal yang saling berelasi, yaitu *adok* (gelar), perempuan dan harta. Bagi sebagian orang, kuatnya keinginan mendapatkan *adok* membuat mereka rela berkorban harta benda. *Ber-adok*, dinilai salah satu pencapaian *pi'il pesenggiri*. Ironisnya, dibalik gemerlapnya *begawi adok* ternyata berpotensi menimbulkan perseteruan keluarga, bahkan dapat membuat keluarga jatuh miskin. Mahalnya biaya *begawi adok* bahkan menelan hingga ratusan juta. Akibatnya setelah pesta usai, *adok* didapat, konsekuensinya jatuh miskin. Tanah-tanah pusaka, warisan banyak yang dijual demi melaksanakan ritual tersebut.

Pengalihan aset juga dapat terjadi karena suku Lampung terlilit hutang dengan suku Bali yang menjalankan sistem simpan pinjam dengan bunga, yang disebut sebagai "rentenir" atau "lintah darat". Sosiolog Universitas Lampung Hartoyo memperkuat argumen tersebut bahwa, Bali dalam kapasitasnya sebagai lembaga-lembaga sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan, juga mengapresiasi ekonomi kapital dengan membuat simpan pinjam sebagai penguatan lembaga ekonomi orang-orang Bali. Namun saat nasabahnya orang luar, fakta yang ditemukan

¹⁵⁷ Wawancara dengan Dr. Nina Yuda selaku Kepala Pusat Studi Kebudayaan Lampung Universitas Lampung pada tanggal 24 September 2018 di Gedung Rektorat Universitas Lampung Lantai 3.

adalah tidak lebih dari semacam “rentenir”. Sehingga ada unsur pemerasan dan eksploitasi disitu, sampai ada yang tanahnya hilang, rumah dan motornya dijual, sebagai akibat tidak mampu melunasi hutang.¹⁵⁸ Fakta yang demikian memperkuat tesis yang dikemukakan oleh Fisher (2001), bahwa konflik dapat bersumber dari faktor objektif seperti kesenjangan sosial, yang ditunjukkan oleh perilaku diskriminatif, kemiskinan, penindasan dan tindak kejahatan.

Selain itu migrasi juga menciptakan eksklusifitas antara penduduk pendatang dan penduduk asli. Faktanya bahwa para pendatang itu hidup persis seperti di Jawa, di bawah pamong desa sendiri dan dalam susunan masyarakat sendiri. Struktur sosial yang berbentuk enklaf-enklaf kedaerahan tersebut menimbulkan pertentangan antara pendatang dan pribumi, sehingga menimbulkan friksi diantara keduanya. Ketegangan mulai muncul pada 20 Desember 1956, ketika penduduk asli Sukadana di dekat Way Jepara Lampung Tengah, mengirim resolusi dan mosi ke pemerintah pusat dimana mereka (pribumi) menginginkan perangkat adatnya dipertahankan, namun justru pada 1959 pemerintah tidak mengakui kepemimpinan adat.

Di antara sistem transmigrasi ada yang disebut sebagai *transmigrasi bedol desa* yang mulai dikenal dan dijalankan pasca meletusnya Gunung Merapi pada tahun 1960-1962. Seperti halnya perkampungan Bali di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, adalah merupakan produk *transmigrasi bedol desa* yang dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat Bali, yang berasal dari Bali Nusa Penida, atas inisiatif sendiri untuk bertransmigrasi ke Lampung pasca letusan Gunung Agung kedua pada 16 Mei 1963. Orang Bali dari Bali Nusa Penida digolongkan sebagai *jabawangsa* yaitu orang-orang non-bangsawan atau mereka yang berada di luar kerajaan induk Bali.

Kedudukan Desa Balinuraga sebagai sebuah desa adat Bali Nusa sangat persis seperti desa adat yang ada di Bali. Desa Balinuraga

¹⁵⁸ Wawancara dengan Hartoyo, *Op. Cit.*

memiliki perangkat-perangkat desa adat dan infrastruktur sosial keagamaan penyanggah desa adat serta memenuhi syarat dan prasyarat menjadi desa adat. Diantara syarat mutlak berdirinya sebuah desa adat Hindu meskipun sudah bertransmigran di luar wilayah Pulau Bali, yaitu desa adat harus memiliki Pura Kahyangan Tiga yang meliputi *Pura Baleagung (Pura Desa)*, *Pura Puseh* dan *Pura Dalem* (Geertz, Clifford, 1959).

Kedudukan Balinuraga sebagai desa adat adalah untuk mempertegas posisi dan identitas sebagai “negara satelit” komunitas Bali Hindu di luar “negara induk Bali”. Upaya menjadikan Balinuraga sebagai desa adat adalah untuk menunjukkan eksistensi sekaligus sebagai bentuk “perlawanan identitas” golongan *jaba* untuk mendapatkan status kewargaan yang jelas terkait dengan kedudukan Pulau Nusa Penida sebagai tempat pembuangan tahanan di masa kerajaan.¹⁵⁹ Hal ini karena identitas warga yang menjadi basis ke-Balian masih harus mendapat legitimasi dari pusat (Bali). Hal inilah yang kemudian menjadikan hubungan antar suku semakin eksklusif dan juga berkontribusi menyumbang benih-benih terjadinya konflik dikemudian hari.

Kemudian, ini diperparah lagi dengan kebijakan pemerintah yang cenderung diskriminatif atau bahkan sewenang-sewenang terhadap penduduk asli Lampung. Pemerintah memberikan alokasi-alokasi tanah kepada para agro-bisnis raksasa sehingga seluruh “*hinterland*”, daerah penyangga kediaman suku bangsa Lampung yang secara tradisional merupakan lahan tempat mereka mencari nafkah, praktis tidak ada yang tersisa. Akibatnya sebagian besar suku asli Lampung terjepit dari segala arah. Sejalan dengan dalil demografis yang menyatakan, bahwa “suatu puak atau suku bangsa yang kemudian menjadi minoritas (mutlak) di dalam habitatnya sendiri, lambat atau cepat berkecenderungan akan

¹⁵⁹ David Stuart-Fox, *Pura Besakih: Temple, Religion, and Society in Bali*, (Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal, Land-en Volkenkunde, 2002).

menuju kepada kepunahannya”.¹⁶⁰ Misalnya saja suku bangsa *Indian* di benua Amerika, *Aborigin* di Australia dan *Maori* di Selandia Baru adalah contoh sebagian kecil suku bangsa yang menjadi minoritas di tanahnya sendiri, tergempur oleh dinamika deras arus masuk para transmigran yang kemudian menjadi mayoritas dengan segala kemajuan yang dimilikinya.

2. Faktor Akselerator

Akselerator dalam analogi Ichsan Malik (2017) diibaratkan sebagai katalisator atau angin panan yang dapat menyebarkan konflik ke segala arah. Bentuk akselerator dapat berupa konflik kekerasan antar kelompok seperti halnya yang terjadi di Balinuraga. Sebelum pecahnya konflik di Balinuraga sebagai titik kulminasi perpecahan antar etnik Bali dan Lampung, dalam kurun waktu 2009 hingga 2012, telah terjadi serangkaian konflik disertai kekerasan yang melibatkan suku Lampung dan Bali. Beberapa diantaranya adalah pembakaran pasar Porbolingo Lampung Timur oleh suku Bali; tahun 2009 warga Bali menyerang masjid di Kecamatan Ketapang; perang suku Jawa/Bali dengan Lampung berawal dari pencurian ayam pada 29 Desember 2010; 2011 suku Bali membakar belasan rumah suku Lampung; Januari 2012, konflik Bali dan Suku Lampung di Sidomulyo.

Rentetan konflik tersebut menjadi katalisator yang menyebabkan intensitas konflik semakin membesar karena dendam yang sudah mengakar. Akibatnya, sentimen dan ego kelompok dikedepankan, solidaritas sosial internal (*ingroup*) menguat melebihi batas-batas wilayah komunitas inti konflik, dimana semua suku Lampung dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung ikut berkumpul dan membantu penyerangan terhadap warga Bali di Desa Balinuraga.

Pada tahap ini, identitas kesukuan menjadi momok yang menakutkan. Amartya Sen dalam bukunya yang berjudul, “*Kekerasan dan*

¹⁶⁰ Jusuf Badri, *Raden Intan: Jatidiri Kepahlawanan Orang Lampung*, (Jakarta: Pustaka Ilmu Abadi, 2002), hlm. 17.

Ilusi tentang Identitas” menjelaskan bahwa suku dan agama merupakan bagian dari identitas sosial,

“...memiliki suatu identitas tidak hanya menjadi sumber lahirnya kebanggaan dan kebahagiaan, melainkan pula sumber tumbuhnya kekuatan dan kepercayaan diri. Namun demikian, identitas juga dapat memicu pembunuhan dan membuat orang mati sia-sia”.¹⁶¹

Hampir sebagian besar struktur sosial yang terbangun di Provinsi Lampung berbentuk enklaf-enklaf kesukuan, baik perkampungan Jawa, Sunda, Lampung, maupun perkampungan Bali, yang merupakan hasil dari kebijakan transmigrasi bedol desa sejak masa kolonisasi tahun 1905 hingga masa reformasi. Dalam kasus konflik Balinuraga misalnya, perkampungan adat Bali di Balinuraga dibentuk sebagai enklaf atau wilayah pemukiman yang didasarkan atas persamaan agama, adat ritual dan budaya. Pada tahap ini proses identifikasi sosial mulai berjalan, yaitu individu mencoba untuk mengasosiasikan dirinya dengan kelompok tertentu yang didasarkan atas kesamaan identitas baik berupa agama, suku bangsa, status sosial, maupun ras.

Struktur sosial semacam ini menyebabkan minimnya interaksi dan terbatasnya pergaulan antar kelompok suku bangsa di Balinuraga, sehingga proses pembauran serta akulturasi budaya antara kelompok pendatang Bali dan pribumi Lampung dianggap mengalami sebuah kegagalan, yang selanjutnya menciptakan jarak sosial (*social distance*) antar kelompok semakin meluas dan komunikasi antar budaya menjadi buntu. Merujuk pada teori identitas sosial Tajfel dan Turner (1982), dalam situasi dimana eksklusivitas kelompok semakin tinggi begitupun jurang perbedaan akan semakin tajam, sehingga dunia seolah terbagi hanya

¹⁶¹ Amrtya Sen, *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas* (penerjemah: Arif Susanto), (Serpong: Marjin Kiri, 2007), hlm. 3-4.

kedalam dua kategori kelompok besar yaitu, *in group* dan *out group*, atau dalam kasus Balinuraga menjadi Bali dan non-Bali.

Ketika segregasi antar kelompok semakin nampak, kelompok suku Bali berkembang dalam wilayah adat berdasarkan tradisi dan agama yang mereka anut begitupun suku Lampung, sementara hubungan hanya terbatas pada sektor ekonomi yang berbasis keuntungan semata. Orang Bali menjalankan sistem ekonomi rente yang faktanya menyakiti perasaan warga non-Bali, ibarat “nila setitik, rusak susu sebelanga”. Sempitnya saluran interaksi antara warga Bali dengan suku Lampung menjadikan masing-masing kelompok semakin eksklusif. Hal ini menyebabkan kebencian warga non-Bali khususnya Lampung terhadap warga Bali di Balinuraga semakin mendalam. Eksklusifitas dan kebencian yang tumbuh, menjadikan penilaian antar kelompok tidak objektif. Warga Bali sebagai kelompok pendatang melihat *ulun* Lampung sebagai karakter yang kasar dan senang kekerasan akibat pembelaan yang berlebihan terhadap *pi'il* atau harga diri, sebaliknya warga Bali di Balinuraga dilihat sebagai karakter yang arogan, rentenir dan pencari kerusuhan. Stereotip negatif yang berkembang terproyeksi kedalam sikap pergaulan sehari-hari antara kedua belah pihak, misalnya menurut penuturan Kasi Pemerintahan Desa Agom Kecamatan Kalianda, Heriyanto (wawancara, 5 Oktober 2018) saat warga Bali berpapasan dengan warga suku Lampung atau sebaliknya mereka akan saling beradu pandangan.

Fenomena ini menguatkan tesis Amartya Sen (2007) bahwa permusuhan yang timbul dari eksklusivitas bisa berjalan bergandengan tangan dengan manfaat yang timbul dari sikap eksklusif.¹⁶² Eksklusivitas dalam sebuah kelompok dapat melahirkan kohesi sosial *ingroup* yang semakin kuat dan sikap *altruistik* untuk membela kelompoknya, tetapi sebaliknya memperlebar *social distance* dan jurang perbedaan dengan kelompok lain (*outgroups*) yang bertendensi menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap orang di luar kelompoknya. Kondisi serupa terjadi di

¹⁶² Amartya Sen, *Op. Cit.*

perkampungan Balinuraga yang dibentuk sebagai desa adat untuk mempertegas identitas dan memperoleh legitimasi atas status ke-Bali-annya dari pusat atau induk pulau Bali, yang direpresentasikan melalui lembaga formal di bawah PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia). Sementara warga suku Lampung di Desa Agom menumbuhkan “politik identitas” untuk menampakkan jati diri di wilayahnya sendiri. Kepentingan setiap pihak untuk menampakkan identitasnya menciptakan eksklusivitas antar kelompok semakin kentara.

Selanjutnya, akibat dari tidak adanya upaya bersama untuk saling memahami karakter, budaya, adat serta tradisi masing-masing pihak, sehingga konflik sosial antar etnis Bali dan Lampung pada Oktober 2012 tidak terhindarkan dan upaya penyelesaian sulit ditemukan. Saat konflik laten meletup menjadi konflik terbuka dan komunikasi budaya tertutup rapat, maka muncul altruisme dan *ingroup favoritism* yang menyebabkan identitas menjadi komoditi penggerak massa paling efektif dalam benturan yang terjadi antara kelompok pendatang Bali dan suku asli Lampung di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

Selain bentuk kekerasan antar kelompok dan identitas, faktor akselerator yang teridentifikasi dapat memperluas wilayah konflik sosial antar etnis Bali dan Lampung di Balinuraga adalah, peningkatan bentuk agresivitas kelompok baik warga Bali di Balinuraga maupun suku asli Lampung di Desa Agom ketika menghadapi berbagai persoalan sosial antar kelompok dalam pergaulan sehari-hari. Bentuk-bentuk sikap arogansi pemuda Bali mulai dari kebiasaan hidup yang dianggap menyimpang dari norma-norma kehidupan yang umum masyarakat Lampung, seperti perjudian dan minum-minuman. Kemudian, bentuknya yang selalu berkelompok, serta cenderung mendominasi panggung saat acara hiburan (organ tunggal), memperkuat rasa kebencian dan stigma negatif terhadap ulun Lampung warga Bali yang sudah lama terpendam. Sehingga sewaktu-waktu ada pemicu sekecil apapun konflik laten dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

3. Faktor Pemicu

Dilihat dari faktor pemicunya juga sangat beragam, dapat datang dari berbagai penjurur dan masing-masing berpeluang untuk saling terkait, dan dapat berkembang dalam konflik yang lebih luas dan mendalam. Pemicu biasanya berupa kejadian yang terjadi secara tiba-tiba mulai dari persoalan yang sederhana sampai pada persoalan mendasar dan kompleks, serta berada di luar konteks substansi permasalahan konflik yang sebenarnya. Jika dilihat berdasarkan dimensi aktornya, awal sebab munculnya konflik sosial dapat dimulai dari konflik antar individu, tindakan kriminal, maupun keributan antar pemuda.¹⁶³

Pecahnya konflik kekerasan di Balinuraga Kecamatan Way Panji kabupaten Lampung Selatan sebenarnya hanya dipicu oleh permasalahan kenakalan remaja yang dilakukan oleh pemuda Balinuraga terhadap dua gadis suku Lampung. Yang berdasarkan olah data lapangan didapati fakta bahwa terjadi isu pelecehan oleh pemuda Bali terhadap gadis Lampung. Nurdiana Dewi (korban 17 Tahun) warga Desa Agom dalam wawancara eksklusif yang dilakukan oleh reporter ANTV mengatakan bahwa, saat mengendarai sepeda motor, mereka dihadang oleh sekelompok pemuda Bali dan pahanya dicolek oleh salah seorang darinya. Hal itu menyebabkan ketidakseimbangan saat mengendarai sepeda motor sehingga akibatnya terjatuh dan mengalami luka lecet. Peristiwa kenakalan remaja inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya konflik berdarah Balinuraga pada 27-29 Oktober 2012. Bahkan derasnya arus ribuan massa yang memaksa masuk ke Desa Balinuraga tidak bisa ditahan oleh personel aparat keamanan yang diterjunkan ke lapangan.

Mengapa hal yang sepele demikian dapat memicu terjadinya konflik yang lebih besar?. Jika ditinjau lebih dalam tentang pandangan hidup kemasyarakatan suku Lampung, antara lain terhadap kaum wanitanya yang sangat digarisbawahi. Bukan dalam arti emansipatoris modern, tetapi dalam arti tradisional dimana kehormatan serta kedudukan seorang

¹⁶³ Hartoyo, *Memutus Mata Rantai Konflik di Lampung, Op. Cit.* Hlm. 40.

wanita sangat dinjunjung tinggi. Ini antara lain dilambangkan dalam tarian adat Lampung yang disebut NIGEL atau Tigel-Tari: wanita dalam pakaian adat lengkap berdiri tegak dan tidak bergerak di atas sebuah talam kuningan, *brass salvers*, kecuali jari jemarinya yang bertanggai yang bergerak-gerak lambat mengikuti irama gamelan Lampung yang sedang ditabuh, sedangkan beberapa orang prianya, juga dengan pakaian adat lengkap, termasuk penyandangan keris yang hulunya dihadapkan kedepan, berputar-putar lincah bersemangat mengitari sang gadis. Ini mencitrakan tekad bulat tanpa kompromi dalam bentuk apapun juga, siap sedia mempertahankan kesucian serta kehormatan sang gadis.

Falsafat pandangan hidup suku Lampung yang demikian menjadikan peristiwa pelecehan terhadap gadis Lampung tidak dapat ditolerir. Selain karena rangkaian konflik yang terjadi sebelumnya, peristiwa pelecehan ini juga dianggap telah mencederai *pi'il* atau harga diri orang Lampung. Saat friksi atau pertentangan antar kelompok sudah terbentuk seperti ini, maka komunikasi antar budaya menjadi buntu, yang timbul kemudian adalah stereotip negatif dari setiap etnik yang pada gilirannya melahirkan kesalahpahaman, tindakan diskriminatif, amuk massa hingga munculnya konflik kekerasan.

Sebagaimana halnya yang terjadi di Balinuraga, pasca terjadinya insiden kenakalan remaja. Malam harinya tanggal 27 Oktober 2012 pukul 21.00 WIB, berita tentang kejadian tersebut telah tersebar, SMS yang bernada provokatif tidak dapat dibendung. Karena upaya penyelesaian di level keluarga dan kepala desa tidak berhasil, maka situasi menjadi memanas, komunikasi antar pihak terputus. Akibatnya ratusan massa hadir pada hari tersebut dan puncaknya tanggal 29 Oktober 2012, kurang lebih 15.000 massa suku Lampung dari berbagai penjuru datang dan bersama-sama melakukan penyerangan secara sporadis ke Desa Balinuraga.

Eskalasi Konflik Laten Menjadi Konflik Terbuka

Konflik dapat mengalami eskalasi dapat pula sebaliknya, mengalami deeskalasi, selanjutnya menjadi konflik laten (tersembunyi). Terjadinya eskalasi maupun deeskalasi tergantung dari berbagai faktor yang melatarinya. Johan Galtung membaginya ke dalam tiga faktor utama yaitu, Pertama, sikap dan persepsi pihak-pihak yang bersengketa yaitu *Attitude* (A). Kedua, perilaku masing-masing pihak yang berkonflik dinamakan *Behaviour* (B). Dan ketiga, kondisi objektif penyebab konflik di sebut *Context* (C).

Pertama, sikap dan persepsi. Bagaimana seseorang berperilaku sangat dipengaruhi oleh persepsi dan sikap mereka terhadap orang lain. Mislanya, bentuk persepsi dan sikap negatif seperti ketidakpercayaan serta merasa superior dibandingkan orang atau kelompok lain, atau percaya dan percaya diri (dalam bentuknya yang positif).

Kedua, sikap dalam situasi konflik tidak hanya mempengaruhi perilaku orang tertentu, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perilaku atau tindakan pihak lawan. Misal, dalam situasi saling menista dan menyebarkan provokasi akan sulit melihat solusi yang menguntungkan untuk mengakhiri sebuah konflik.

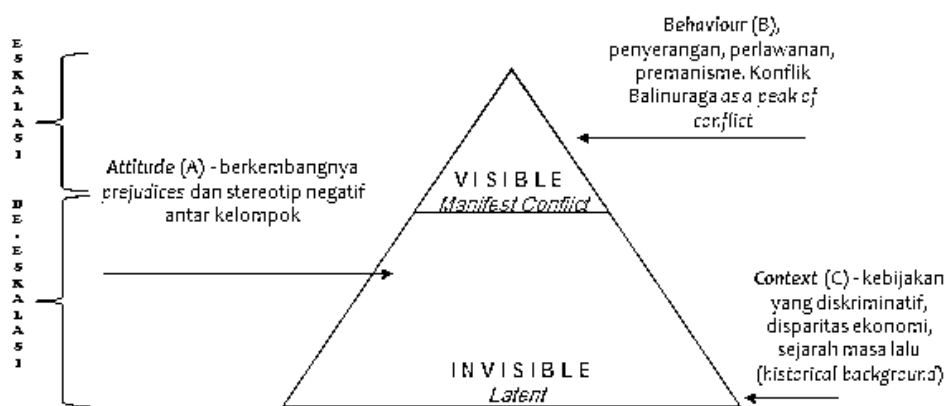
Ketiga, fokus pada keadaan objektif dimana pihak yang berkonflik hidup. Misalnya, apakah mereka mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan umum, apakah mereka memiliki peluang ekonomi yang berkeadilan, dan apakah mereka dapat ikut berpartisipasi dalam sistem politik yang ada. Kontes atau kondisi objektif dimana orang tinggal akan dapat mempengaruhi persepsi, sikap dan perilaku mereka.

Pada serangkaian konflik kekerasan yang terjadi di Lampung, mulai dari tahun 2005 hingga konflik Balinuraga bulan Oktober 2012, dalam bahasa Gundykunst (2003) dapat dikatakan sebagai konflik ekspresif.¹⁶⁴ Konflik ini berwujud berupa amuk massa, terjadi secara spontan, tidak

¹⁶⁴ Gundykunst, William B., and Kim, Young Yun, *Communicating with Strangers – 4th Edition*, (New York, NY: McGraw-Hill, 2003).

terorganisir dengan baik, sangat emosional (tidak rasional dan non realistis), konflik sebagai tujuan bukan *tools* untuk mencapai tujuan. Stereotip dan *prejudice* terhadap pihak lawan (warga Bali) semakin tumbuh subur dalam kondisi yang emosional dan konflikual, sehingga amuk massa mudah terjadi hanya karena pemicu yang sederhana. Disinilah persepsi dan sikap warga Lampung dipengaruhi oleh tindakan-tindakan agresif lawannya (warga Bali).

Gambar 4.3 Analisis Eskalasi Konflik Balinuraga Dengan ABC Triangle J. Galtung



Sumber: Diolah oleh peneliti merujuk pada panduan Scottish Centre for Conflict Resolution, *Improving Relationships, Improving Lives*.

Situasi ini terjadi, karena mereka (suku Lampung) merasa adanya urgensi terhadap penyelesaian suatu masalah yang dianggap begitu serius, namun pemerintah cenderung bersikap abai dan lamban. Akibatnya penyelesaian selalu tertunda dan tidak pernah menyentuh hingga ke akar-akarnya, terjadilah akumulasi kekecewaan. Maka suatu ketika muncul pemicunya, akan ada luapan kemarahan dan perlawanan (agresi) yang diperkeruh dengan kondisi objektif (konteks) yang melatarinya, yaitu berupa kesenjangan ekonomi, kebijakan pemerintah yang diskriminatif, serta kondisi yang menyebabkan mereka (suku Lampung) teralienasi dari tanahnya sendiri. Kondisi yang demikian menjadi sebab munculnya frustrasi, dan frustrasi muncul karena perasaan

tidak puas (*deprivasi relative*), yaitu adanya kontradiksi antara *das sollen* (yang diharapkan, *attitude* (A)) dengan *das sein* (kenyataan yang dialami, konteks (C)). Jika *deprivasi relative* suatu kelompok tidak ditanggapi, maka akan meningkatkan rasa frustrasi. Semakin frustrasi akan semakin marah, dan dalam keadaan marah konflik laten bertendensi besar mencuat menjadi konflik terbuka (*Behaviour* (B)) yang biasanya disertai dengan tindak kekerasan disebut *desctructive conflict*.

Gambar 4.4 Konflik Balinuraga Tahun 2012



Sumber: Lintas Berita, dalam <http://www.lintasberita.web.id/kumpulan-foto-perang-suku-lampung-vs-bali/>; diakses pada 9 Januari 2019

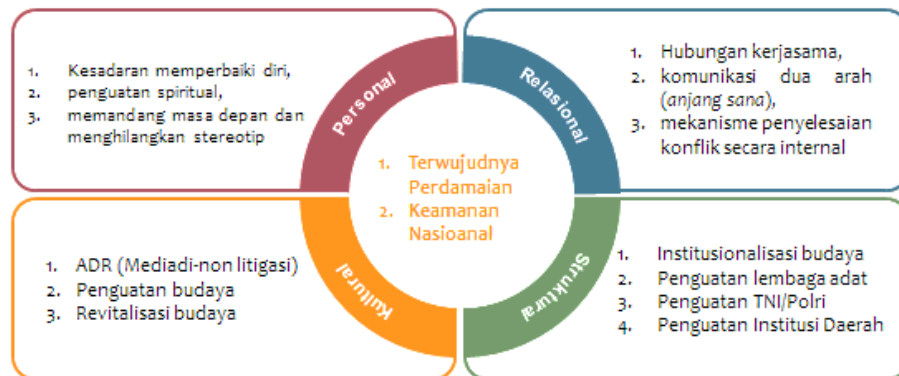
Gambar 4.5 Dampak Kerugian Akibat Konflik Balinuraga



Sumber: Internet sources dari <https://cdns.klimng.com/merdeka.com/i/w/news/2012/11/05/111159/670x335/pemerintah-segera-perbaiki-rumah-warga-di-balinuraga.jpg>; dan <https://i0.wp.com/www.BaleBengong.net/wp-content/uploads/2013/01/foto-balinuraga.jpg?resize=600%2C398>; diakses pada 9 Januari 2019.

4.3.2 Upaya Transformasi Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga

Gambar 4.6 Transformasi Konflik Sosial Antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga, Way Panji, Lampung Selatan



Sumber: Diolah oleh peneliti merujuk pada panduan transformasi konflik dalam John Paul Lederach, *et al. Reflective Peacebuilding: A Planning, Monitoring, and Learning Toolkit*, (Notre Dame: The Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame, 2007)

Umumnya konflik sosial menyebabkan perubahan terhadap empat dimensi, yaitu personal, relasional, struktural dan kultural (lihat **Gambar 4.6**). Maka dalam penelitian ini, upaya transformasi konflik difokuskan pada keempat elemen di atas. Selanjutnya, dalam sub bab ini peneliti akan secara komprehensif menggali upaya transformasi yang dilakukan pada setiap dimensi, baik personal, relasional, kultural, maupun struktural. Sebagai satu tahapan proses transformasi konflik, masing-masing elemen tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan lainnya.

1. Transformasi Personal

Pada level personal misalnya, konflik mengubah individu baik secara personal, emosional maupun spiritual. Perubahan personal secara umum terjadi pada dua kategori yang saling berkaitan, yaitu sikap dan perilaku. Keduanya merupakan pola karakter yang terlihat dalam diri seorang individu. Beberapa diantara sikap yang mempengaruhi konflik secara

negatif, misalnya merasa superior, kurangnya penghargaan, ketakutan untuk berhubungan dengan orang diluar kelompoknya, takut mengemukakan pandangannya, *prejudice* atau bias, kaku dan persepsi yang sempit.

Kemudian perilaku, perilaku adalah cara bagaimana seseorang bertindak, merespon, mengekspresikan dirinya dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Contoh perilaku yang dapat berpengaruh positif terhadap situasi konflik, misalnya berbaur dengan kelompok lain, mendengarkan dengan baik, menghindari stereotip negatif dalam bahasa, terbuka dan transparansi tentang apa yang dirasa, mengungkapkan pendapat tanpa menghakimi, mempertimbangkan kembali sebuah persepsi.

Bercermin dari konflik Balinuraga, struktur sosial yang terbentuk di Provinsi Lampung berupa enklaf-enklaf etnik, seolah eksklusifitas menjadi semacam komoditi yang sengaja dipelihara sejak jaman kolonisasi hingga saat ini. Eksklusifitas etnik menyimpan seribu satu benih konflik yang disebabkan karena tidak terjadi pembauran antar etnik, komunikasi antar individu dan kelompok budaya mampat, maka muncullah stereotip negatif terhadap individu yang cenderung digeneralisir sehingga muncul kesalahpahaman budaya yang selanjutnya muncul dalam sikap diskriminatif dan kekerasan terhadap anggota kelompok lain di luar kelompoknya.

Awal terjadinya kolonisasi, Lampung sebagai wilayah tujuan transmigran bisa dikatakan sukses. Para transmigran dan penduduk asli Lampung hidup harmoni secara berdampingan. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, namun tingkat toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Integrasi antar pemeluk agama baik dan tidak terjadi bentrokan-bentrokan antara penganut berbagai agama. Namun, saat ini nilai-nilai mulai memudar, ketika interaksi sosial masyarakat mulai berubah. Kearifan lokal dan modal sosial juga memudar. Terjadinya perubahan generasi aktor dimana generasi muda pada beberapa

dasawarsa lalu sekarang menjadi generasi tua. Generasi muda mendominasi keberadaan beragam kelompok sosial saat ini yang berada dalam situasi perubahan sosial yang cepat dan mengglobal, sehingga terjadi krisis ketokohan dan kepemimpinan dimasyarakat. Dalam situasi yang demikian pergaulan, sikap dan perilaku kaum muda makin tidak terkontrol. Timbullah sikap arogansi pada pemuda Bali yang cenderung berkelompok kemana-mana serta menimbulkan berbagai permasalahan. Kondisi semacam ini menimbulkan stigma negatif etnik lain terhadap Bali. Sebaliknya etnik Lampung yang terlalu over mengatasnamakan segala tindakannya atas dasar mempertahankan *pi'il pesenggiri* untuk kepentingan komunal maupun pribadi, membenarkan bahwa orang Lampung memang keras dan rigid dalam bertindak.

Saat ini mulai muncul kesadaran baik secara personal maupun komunal untuk melakukan perbaikan dalam internal kelompok masing-masing. Hubungan semakin cair, tidak lagi saling melirik saat berpapasan, orang tua ikut andil mengontrol anak-anak remajanya. Bahkan Made Santre selaku Kepala Desa Balinuraga menegaskan bahwa mereka mengambil sisi positif dan hikmah dari kejadian tersebut, "kita juga gak mungkin mengungkit-ngungkit masa lalu juga ya, mudah-mudahan cuma sekali itu aja ... prinsip saya pak, yang penting kita menjaga situasi remaja kita, gitu aja dulu, membenahi diri sendiri. kalau di luar terserah nanti, yang penting kita benahin dulu di dalem, diri kita sendiri", tukasnya saat diwawancarai oleh peneliti di kantor desa tempatnya bertugas.

Pendekatan pada level personal atau masyarakat bawah yang menjadi mayoritas dalam struktur kehidupan sosial dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, *workshop* dan lokakarya yang didalamnya terdapat materi tentang potensi konflik, dan bagaimana menjaga keserasian sosial. upaya demikian tentu harus mendapatkan dukungan berbagai pihak baik pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Kesadaran secara personal yang membawa pada perubahan sikap

dan perilaku, selanjutnya diharapkan mampu menjadi elemen penguat bagi terciptanya perdamaian positif yang berkelanjutan.

2. Transformasi Relasional

Transformasi relasional dalam kerangka berfikir Lederach adalah individu-individu atau kelompok yang memiliki hubungan secara langsung, saling bertemu, berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain dalam ruang kehidupan bersama baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, tetangga, dan komunitas lokal. Dalam situasi konflik, hubungan ini juga mencakup pertemuan penting antara pemimpin nasional, atau perwakilan komunitas, agama dan kelompok etnik yang berkonflik. Beberapa hal penting yang harus dibangun pada tahap ini yaitu pola komunikasi, hubungan kerjasama, pemecahan masalah atau pembuatan keputusan bersama, dan mekanisme penanganan konflik. Tujuan utama dari transformasi relasional adalah menciptakan hubungan antara kelompok yang berbeda dalam suatu lingkungan kemsayarakatan.

Ilmuwan evolusi sosial, Alexander (1987) mengungkapkan bahwa *altruisme* dan kerjasama merupakan produk yang dihasilkan dari sejarah konflik antar kelompok dan perang, yang kemudian secara alami membentuk psikologi dan perilaku manusia. Hal ini sejalan dengan penganut aliran pemikiran Strukturalis Marxist yang mengatakan, bahwa untuk mencapai suatu perubahan yang besar (*radical change*) dalam sistem kehidupan membutuhkan pendekatan revolusioner, yaitu untuk menghentikan konflik dibuat konflik yang lebih besar.

Charles Horton dalam Abdulsyani (2004) mengatakan bahwa kerjasama terjadi karena ada kesadaran bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama, ada interdependensi dan motivasi.

Maka pasca terjadi konflik kekerasan yang menyebabkan kerugian besar baik secara materi maupun imateri dari kedua pihak, mulai tumbuh kesadaran bahwa damai itu penting. Muncullah kerjasama sebagai bentuk kesadaran bahwa ada kepentingan bersama yang lebih besar melampaui

kepentingan personal dan kelompok yaitu menciptakan harmoni dalam hidup berdampingan sesama warga Lampung.

Tingkat komunikasi yang terjalin baik pada level individu atau kelompok, antara warga Bali di Balinuraga dan warga suku Lampung di Desa Agom, sudah cukup baik. Berdasarkan pada data lapangan dan hasil penelitian, telah tercipta hubungan kerjasama terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kepala Desa Agom, Muchsin Syukur (2012) menuturkan bahwa warga dua desa sebenarnya saling membutuhkan. Pohon kelapa yang banyak tumbuh di lingkungan Desa Agom tidak akan bernilai ekonomis tanpa keberadaan masyarakat Bali. Made Santre, Kepala Desa Balinuraga, mengungkapkan bahwa Kerjasama yang sebelum terjadi konflik sudah baik, pasca terjadinya konflik hubungan sosial kerjasama dan kemasyarakatan juga sudah normal kembali (wawancara, 5 Oktober 2018).

Gambar 4.7 Acara Ngaben Massal Desa Balinuraga



Sumber: Akun instagram iambadut_ (Wynas); https://www.instagram.com/p/BK-vSP0jWjD/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1nga9xoc5n7x2; diakses pada 9 Januari 2019

Kerjasama warga Bali dengan pihak Lampung juga terjalin saat acara ngaben. Berdasarkan penuturan, Isro Abdi selaku Camat Way Panji (wawancara, 4 Oktober 2018) bahwa pembuangan abu saat acara ngaben biasanya dilakukan di laut, yang terdekat adalah Merak Belatung. Sehingga untuk dapat mengakses tempat tersebut, warga Bali bekerjasama dengan kepala desa dan tokoh-tokoh adat disana. Saat iring-iringan warga Bali menuju Merak Belatung, dibantu pengamanannya oleh aparat Pemerintah Kecamatan Way Panji dan polsek, koramil setempat.

Pada level komunal, hubungan dirajut kembali melalui sistem *anjang sana* yaitu saling bersilaturahmi antara tokoh adat Bali, Lampung dan suku lainnya, tokoh pemuda, tokoh agama, dan juga aparatur pemerintahan desa. Misalnya saja di Kecamatan Way Panji, pemerintah telah berupaya menciptakan kegiatan di masing-masing adat, seperti mengundang tokoh adat, baik dari suku Lampung, Bali, Jawa atau suku lainnya, saat ada acara hajatan dan acara adat suku tertentu.

Berdasarkan hasil konsensus perdamaian yang telah disepakati bersama muncul suatu mekanisme penyelesaian konflik yang harus dijalani bersama, apabila suatu saat terbukti salah satu warga dari kedua belah pihak melakukan tindakan yang memicu munculnya kerusuhan, maka oknum tersebut yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri tanpa membawa nama suku, agama, dan ras. Artinya mekanisme penyelesaian secara internal dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah setempat, lebih diutamakan ketimbang penyelesaian konflik secara hukum.

Kondisi ini, menjadikan warga Bali khususnya Balinuraga mulai berbenah diri. Misalnya saja, ada penguatan lembaga-lembaga keagamaan Hindu yaitu Pasraman untuk melakukan pembinaan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan terutama ke generasi muda. Kegiatan keagamaan ini secara signifikan mengubah pola tingkah dan sikap pemuda Bali baik di dalam lingkungan Bali maupun keluar. Terbukti

dengan tidak adanya konflik yang mencuat pasca kerusuhan Balinuraga, 2012 silam.

Selain penguatan program sosial keagamaan Hindu untuk menciptakan sosial harmoni antar etnik baik kedalam maupun keluar, pemerintah Kecamatan Way Panji membuat suatu kegiatan kelompok lintas agama yang dinamakan PERTAMA (Persatuan Umat Antar Agama), tugasnya adalah saling menjaga keamanan apabila salah satu dari pemeluk agama lain, merayakan hari besarnya. Misalnya ada kegiatan di gereja, maka anggota Banser dan Pecalang dengan pemuda gereja bersama-sama melakukan pengamanan di lingkungan gereja. Begitu sebaliknya jika umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya, atau umat Hindu Bali melaksanakan acara ngaben.

Dalam mengantisipasi terjadinya konflik dimasa depan, sekaligus sebagai upaya cegah dan deteksi dini, Pemerintah Kecamatan Way Panji juga membuat sebuah program yang disebut FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) dibentuk oleh Bhabinkamtibmas, beranggotakan delapan orang tokoh pemuda dari empat desa yang ada di Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan. Tugasnya adalah membantu peran kepolisian di lapangan dengan memberi laporan apabila terjadi hal-hal yang memicu terjadinya konflik. Sehingga masalah kecil cukup diselesaikan melalui *rembug pekon* di desa atau kecamatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menunjukkan bahwa perubahan-perubahan pasca konflik begitu signifikan terjadi pada warga Bali. Hal ini memperlihatkan adanya upaya perubahan pada level personal dan relasional meskipun membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk benar-benar dapat menciptakan harmoni sosial yang memperkuat ketahanan sosial.

3. Transformasi Kultural

Setiap budaya baik dalam ruang lingkup organisasi, kelompok kecil, nasional maupun lokal terdiri atas aspek-aspek yang dapat berkontribusi baik secara destruktif maupun konstruktif dalam upaya transformasi

konflik. Pada tahapan ini yang menjadi fokus utama yaitu menghilangkan stereotip dan batasan-batasan budaya yang menggiring ke arah terjadinya konflik, serta penggunaan mekanisme tradisional dalam penyelesaian konflik.

Di Lampung terdapat beragam alternatif penyelesaian konflik (*alternative dispute resolution/ ADR*) yang mengedepankan jalan penyelesaian non-litigasi. Mediasi melalui serangkaian musyawarah untuk mencapai mufakat masih menjadi cara yang paling efisien dan terus dikembangkan. Kecenderungan menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik, selain dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar hubungan sosial yang bersifat konsensus, juga karena dipandang lebih dekat dengan lingkungan sosio kultural setempat. Dalam hal ini peran tokoh adat, tokoh masyarakat, tradisi, kepercayaan, struktur kelembagaan yang dimiliki dan diakui bersama pada tingkat desa dan kecamatan masih sangat diperlukan, karena masih kuat pengaruhnya serta menjadi elemen utama penyelesaian konflik.

Maka ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menginstitutionalisasi budaya Lampung, yang disebut *rembug pekon*, sebagai mekanisme pencegahan potensi konflik di masyarakat. Maka kemudian Gubernur Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 1 Tahun 2016, tentang pedoman rembug desa agar menjadi acuan bagi pelaksana pemerintah baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota maupun provinsi dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat. Bahkan menurut penuturan Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Lampung Fajar Isnawan, bahwa *rembug pekon* telah diadaptasi oleh pemerintah nasional yang melahirkan produk pencegahan konflik yang disebut Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Dengan begitu, secara tidak langsung ada pengakuan dan apresiasi terhadap budaya Lampung sehingga tidak berlebihan jika pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

mendapatkan penghargaan sebagai juara I dalam upaya penanganan konflik sosial.

Berdasarkan BAB II Pasal 2 Perda Provinsi Lampung No 1 Tahun 2016, bahwa *rembug pekon* dilaksanakan atas asas pengayoman, kemanusiaan, kekeluargaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, keterbukaan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, serta keamanan dan ketertiban. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa *rembug pekon* merupakan upaya untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang penyelesaiannya dilakukan bersama-sama antara unsur pemerintah desa, kelurahan, unsur pemerintah, stake holder terkait dan unsur masyarakat. Adapun pembiayaan pelaksanaan *rembug pekon* dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tingkat wilayahnya masing-masing.

Rembug pekon dianggap sebagai budaya yang telah melekat dan mengakar hingga ke masyarakat bawah, karena merupakan tradisi *ulun* Lampung yang memegang kuat sistem kekerabatan sejak masa pra kemerdekaan. Mengacu pada Perda di atas, maka pelaksanaan *rembug pekon* dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu ada permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka. Mekanisme pelaksanaan ini menuai kritik berbagai pihak seperti Ketua FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) Kabupaten Lampung Selatan Dr. K.H. Ahmad Rafiq Udin, bahwa seharusnya *rembug pekon* itu terus dilaksanakan minimal sebulan sekali ada atau tidak ada konflik. *Rembug pekon* sangat signifikan pengaruhnya untuk meminimalisir konflik di bawah, yaitu upaya *islah* internal sebelum konflik melebar. Rafiq menegaskan, bahwa rukun itu mahal, maka pemerintah buatlah anggaran. Siapapun pemerintahnya nanti, diharapkan dapat merumuskan rancangan undang-undang terkait anggaran, supaya forum-forum seperti FKUB,

lembaga-lembaga adat seperti MPAL dapat berjalan dan berfungsi dengan baik (wawancara, 5 Oktober 2018).

Hartoyo (wawancara, 25 September 2018), Sosiolog Universitas Lampung, mengungkapkan bahwa *rembug pekon* dalam pengertiannya yang *genuine* adalah musyawarah desa dalam rangka menyelesaikan persoalan yang diinisiasi oleh masyarakat desa. Sampai saat ini belum nampak bagaimana memfungsikan lembaga rembug untuk memperkuat sistem deteksi dan respon dini. Bahkan rumah *rembug pekon* yang dibangun di Desa Sidoharjo saat ini tidak lagi berfungsi, maka tidak dapat direkayasa demikian.

Maka *rembug pekon* sebagai upaya untuk memperkuat lembaga adat, seharusnya ditopang melalui proses pemberdayaan terhadap sumber daya manusia yang ada, sehingga hasil dari *rembug pekon* yang diharapkan dapat memperkuat deteksi dan cegah dini tercapai dengan maksimal. Alhasil, bukan hanya *rembug pekon* yang dibangun sebagai “simbol” semata, tetapi benar-benar memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan (Perda Provinsi Lampung No 1 Tahun 2016 Bab II Pasal 2 Poin D).

Selain mengangkat budaya *rembug pekon* sebagai mekanisme penyelesaian konflik, kesadaran secara komunal atau kelompok adat timbul untuk melakukan pembenah internal, yaitu melalui revitalisasi budaya, sebagai perbaikan citra diri dan menghilangkan streatip negatif terhadap budaya masing-masing kelompok (suku Lampung dan Bali) yang memiliki nilai-nilai luhur. Meskipun kedua etnik, Lampung dan Bali, memiliki kultur yang berbeda tetapi ada nilai universal yang dapat ditarik dari kearifan lokal masing-masing pihak. Masyarakat Lampung memiliki Piil Pesengiri, yaitu kehormatan dalam berpikir dan berperilaku, sementara masyarakat Bali memiliki konsep *Tri Hita Karana*, yaitu berupa harmonisasi hubungan antara Tuhan, manusia dan alam.

Revitalisasi Budaya *Pi'il Pesenggiri*

Pi'il Pesenggiri merupakan filsafat hidup orang Lampung yang meliputi unsur-unsur *pi'il pesenggiri*, *bejuluk beadog*, *nemoi nyimah*, *nengah nyappor*, dan *sakai sambayan*. Dalam realitas kehidupan sosial masyarakat Lampung, apabila suatu persoalan sudah menyangkut *pi'il pesenggiri* yang menjadi ranah sensitif bagi etnik Lampung. Maka tindakan apapun dapat dibenarkan untuk mempertahankannya. Pola yang demikian selalu berulang, bahkan tidak jarang pembelaan atas nama *pi'il* (harga diri dan martabat) selalu disertai dengan tindak kekerasan. Fakta inilah yang kemudian meperkuat stigma negatif suku lain terhadap *Ulu* Lampung, bahwa mereka kasar dan senang kekerasan.

Penampilan etnik Lampung yang terkesan senang memegahkan diri, terkadang mengambil jalan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, merupakan cerminan sebagian *Ulu* Lampung yang keliru dalam memahami kelima konsep luhur *pi'il pesenggiri*. Bukanlah hal yang mudah untuk meloloskan diri dari stigma kultural yang terjadi, sehingga perlu mengubah citra diri dengan nilai *pi'il pesenggiri* yang disegani.

Bertahannya nilai-nilai *Pi'il pesenggiri*, sebagai karakter utama *Ulu* Lampung, menjadi modal utama kontestasi untuk memperkuat identitas ke-Lampungian yang mulai luntur di tengah keragaman budaya masyarakat yang ada. Maka *pi'il pesenggiri* saat ini dimaknai secara kontekstual dan tidak lagi dipahami secara jumud, sehingga *pi'il* tidak lagi terkesan “menakutkan”.

Pi'il pesenggiri pada intinya adalah menjunjung tinggi martabat dengan melakukan perbuatan baik. Namun bagi masyarakat pendatang, realita yang mereka lihat adalah pengatasnamaan *pi'il pesenggiri* yang terlalu berlebihan dan keluar dari konteks luhurnya, sehingga tindakan atas nama *pi'il* menimbulkan stereotip negatif yang justru merendahkan *Ulu* Lampung sendiri. Maka saat ini, *pi'il pesenggiri* dikembalikan kepada makna asalnya yang tetap relevan, yaitu keharusan hidup bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu hak dan kewajiban.

Bejuluk beadog yaitu julukan. Julukan (gelar) menjaga dan mendisiplinkan agar setiap tindak tanduk seseorang sesuai dengan gelar yang disandangnya. Namun fakta di lapangan, pelaksanaan dari prinsip *juluk adok* sering menimbulkan korban. Demi mendapat gelar, seorang rela menjual semua aset yang dimiliki. Gelar diperoleh tetapi kemudian jatuh miskin, sehingga tertinggal secara ekonomi dan diremehkan di lingkungannya. Dalam konteks saat ini, *bejuluk beadog* lebih sering digunakan sebagai pemberian gelar terhadap pendatang. Jika dilihat dari sisi relasional, maka pemberian gelar terhadap penduduk pendatang oleh suku Lampung akan memperkuat ikatan persaudaraan dan meminimalisir terjadinya konflik. Tetapi apabila dilihat dalam konteks kekuasaan simbolik, seorang pemilik *adok* (gelar) akan dipandang lebih tinggi statusnya dari si penerima *adok*. Sehingga dalam proses tersebut *pi'il* dan martabat ke-Lampung *ulun* Lampung terangkat karena masuknya pendatang ke dalam sistem simbolik dan kultural etnik Lampung.

Nemoi nyimah adalah upaya menghargai serta menyenangkan tamu dan memberikan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Nilai ini menciptakan kesan bahwa *ulun* Lampung terlalu royal melebihi kemampuan, bahkan rela berhutang untuk menyambut tamu saat ekonomi keluarga terpuruk. Dalam konteks perkembangannya saat ini, *nemoi nyimah* diadaptasi sebagai nilai keharusan untuk menghargai kedatangan tamu.

Negah nyappor berarti keharusan untuk bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan mengemukakan pikiran dan pendapat, serta mampu berkompetisi dengan siapapun. Stigma negatif yang berkembang bahwa *ulun* Lampung terlalu kebablasan dalam berbaur sehingga lupa kepribadiannya. Lebih suka menggunakan atribut kelompok lain agar dianggap ber*pi'il* karena mampu beradaptasi. Nilai kemudian dikembangkan dalam bentuknya yang lebih umum yakni mampu tampil dan berkompetisi secara sehat sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bersaing dalam pergaulan nasional dan internasional.

Sakai sambayan bermakna gotong royong dan tolong menolong. Dalam konteks saat ini, *sakai sambayan* direproduksi sebagai musyawarah mufakat untuk memecahkan masalah secara bersama-sama, wujudnya bisa berupa pembentukan asosiasi budaya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dan keberlangsungan adat, serta pemecahan masalah baik dengan pihak internal kelompok adat Lampung atau eksternal (penduduk pendatang) melalui mekanisme adat.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa, suku Lampung merekonstruksi kembali identitasnya yang mulai luntur dalam derasnya pendatang dan keragaman yang ada melalui dua strategi utama, yaitu legitimasi identitas melalui institusi-institusi yang dominan di masyarakat (perlu peran pemerintah) dan membangun resistensi identitas (penguatan kultural).

Revitalisasi Identitas Warga Bali melalui Penguatan Konsep *Tri Hita Karana*

Pasca terjadinya konflik Balinuraga, warga Bali juga mencoba melakukan perbaikan citra dan mengembalikan identitas budaya luhur yang dimilikinya. Identitas etnik yang sarat dengan nilai-nilai kebaikan dan kedamaian hidup sering kali memudar dan direduksi dalam dinamika perubahan sosial yang terjadi. Dalam kehidupan sosial yang dijalani, warga Hindu Bali sebenarnya memiliki nilai-nilai adiluhung seperti *paras-paros sarpanaya* (se-iya sekata), *salulung sebayantaka* (musyawarah mufakat), dan ikatan *menyama braya* (persaudaraan) serta *mulatsarira* (perenungan). Namun dalam dinamika kehidupan yang terus berkembang saat ini, nilai-nilai tersebut sering kali direduksi dan mengalami distorsi dari makna sesungguhnya. Contohnya, *suryak siu* (berteriak bersama) yang berarti pengambilan keputusan secara bulat, biasanya digunakan sebagai mekanisme pencapaian konsensus bersama dalam pertemuan *bale banjar* (tempat pertemuan antar *banjar* atau dusun) untuk

kepentingan bersama yang bersifat positif. Kesepakatan biasanya diakhiri dengan berteriak bersama sebagai tanda persetujuan.

Tradisi ini kemudian berubah menjadi tradisi “mengikuti” tanpa berpikir secara logis terurama di kalangan pemuda Bali. *Suryak siu* kemudian menjadi identik dengan tata laku negatif komunal pemuda Bali yang dilakukan secara bersama-sama. *Suryak siu* tidak lagi didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran, melainkan suara mayoritas. Sehingga lebih baik salah bersama-sama daripada benar sendiri tetapi dikucilkan oleh lingkungan. Budaya ini kemudian sering dijadikan legitimasi pemuda Bali yang sering melakukan tindakan anarkis secara komunal terhadap kelompok etnis lain. Sikap pemuda Bali yang cenderung anarkis, memperkuat stigma negatif suku lain bahwa warga Bali memang “arogan”, sering memicu kerusuhan dan konflik.

Setelah kerusuhan Balinuraga, masyarakat Bali berupaya membangun kembali identitas ke-Bali-annya sebagai Hindu Bali yang ramah dan terbuka. Pengembalian citra diri yang damai, ramah dan terbuka dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai kultural keagamaan tentang harmoni sosial dalam konsep ajaran Hindu yang disebut *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan) dalam kegiatan *pasraman*.¹⁶⁵ Disinilah ajaran agama yang bersifat universal dapat turut berkontribusi dalam penciptaan perdamaian.¹⁶⁶

Namun sebelum jauh membahas tentang revitalisasi identitas yang dilakukan masyarakat Bali. Perlu diketahui bahwa status orang Bali di Balinuraga, yang disebut *jabawangsa*, juga ikut andil dalam pengkerdilan pandangan agama orang-orang Hindu Bali di Balinuraga, yang mayoritas berasal dari Bali Nusa Penida. Bali Nusa Penida dikenal sebagai tempat pembuangan tahanan pada masa kerajaan, hal ini berdampak pada status

¹⁶⁵ Wahyu Setiawan, *Op. Cit.* Hlm. 72.

¹⁶⁶ Dalam penelitiannya tentang dimensi budaya dalam perdamaian, Birgit Brauchker (2017) mengungkapkan bahwa budaya dan agama, keduanya dapat dipakai untuk memperburuk konflik atau mempromosikan perdamaian. Dalam Birgit Brauchler, *Op. Cit.* Hlm. 103.

dan kedudukan mereka, sehingga secara otomatis disebut sebagai orang *jaba* (luar). Status sebagai *jabawangsa* berimplikasi pada hal yaitu struktur sosial yang egaliter, etos kerja yang tinggi untuk menampakkan eksistensi dalam masyarakat Hindu, dan terikat konsep *ajawera* yaitu larangan yang membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan mempelajari agama secara mendalam kepada golongan sudra, dan hanya kasta *brahmana* serta *ksatria* yang boleh mempelajari kitab suci Weda.

Konsep *Tri Hita Karana* dalam kegiatan *pasraman* di Balinuraga menjadi modal sosial untuk membangun kehidupan yang lebih terbuka (inklusif). Terdapat lima *pasraman* di Balinuraga, yaitu Govinda Ashram di Sidorahayu, Parama Shiwa di Sukamulya, Dwipayana Ashram di Banjarsari, Ganesha Ashram di Sukanandi, dan Kertiyasa Ashram di Pandearga.¹⁶⁷ Beberapa ajaran agama yang diajarkan di *pasrman* yaitu *kirtanam* berupa pujian kepada para dewa, seperti *om...namah...syiwa...ya* sebagai manifestasi dari Ida hyang Widi Wasa. Ini merupakan salah satu program yang gencar disosialisasikan di Balinuraga. Meski pada awalnya mendapatkan penolakan warga Balinuraga karena sistem keberagaman yang bersifat konservatif, harus sama dengan cara peribadatan leluhur dari tanah kelahirannya di Bali Nusa Penida, namun akhirnya diterima setelah dilakukan pendekatan oleh Mangku Gede Pande Wayan Gambar, anak dari pendiri Desa Balinuraga. *kirtanam* akhirnya menjadi ritual yang memasyarakat, dan dapat menyatukan warga Bali antar banjar di Balinuraga.

Kemudian ada pembelajaran tentang sastra (*sloka*) dalam pembacaan kitab Bhagavadgita dan Sarassamutccaya. Bhagavadgita berisi tentang tuntunan, bahwa dalam dinamika perubahan sosial yang sarat akan kemerosotan moral dan etika, kebenaran harus menjadi prinsip utama yang tidak boleh ditawar. Sedangkan Sarassamutccaya banyak mengajarkan tentang etika. Secara prinsip kedua kitab memperkenalkan *konsep religius* kepada kalangan muda tentang nilai universal *Tri Hita*

¹⁶⁷ Wahyu Setiawan, *Op. Cit.* Hlm. 73.

Karana, bahwa kesembangan hidup dapat tercipta melalui baiknya relasi manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis sesama manusia maupun dengan alam (*tat twam asi*-engkau adalah aku, aku adalah engkau).

Bagi anak-anak dan pemuda, peran agama sebagai pembentuk karakter dan penguatan identitas Hindu Dharma terus dikonstruksi melalui berbagai macam kegiatan keagamaan, yang muaranya adalah menciptakan ikhsifatitas dan harmoni ke-hindu-an sebagai identitas keagamaan dan budaya yang kokoh.

Pertemuan Budaya antara Suku Bali dan Suku Lampung

Berdasarkan deskripsi dan penjelasan terkait transformasi kultural melalui revitalisasi budaya di atas, peneliti melihat adanya optimisme yang terbangun bahwa budaya dapat menjadi elemen pemersatu suku bangsa yang paling efektif dalam penyelesaian konflik sosial antar etnis Bali dan Lampung, serta perwujudan perdamaian yang berkelanjutan di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

Ulung Lampung memiliki falsafah pandangan hidup ber-*pi'il pesenggiri* sebagai karakter yang masih dipegang erat dan bertahan dalam gerusan serta arus globalisasi. Begitupun warga Bali juga memiliki nilai-nilai adiluhung Hindu dharma yang terangkum dalam konsep Tri Hita Karana. Meski kedua kelompok suku Bali dan suku Lampung memiliki tradisi, adat, budaya dan agama yang berbeda, namun secara garis besar falsafah pandangan hidup yang dipegang erat oleh keduanya memiliki nilai-nilai yang saling bersinggungan. Misalnya dalam adat dan tradisi, baik suku Bali maupun suku Lampung memiliki mekanisme pencapaian konsensus atau kesepakatan bersama melalui jalur musyawarah atau *rembug*.

Dalam tradisi *ulung* Lampung musyawarah mufakat merupakan manifestasi dan implementasi dari falsafah *sakai sambayan* yang berarti gotong royong. Sementara dalam tradisi dan adat suku Bali, musyawarah mufakat merupakan wujud dari nilai *salulung sebayantaka* yang biasa

digunakan sebagai alat mencapai konsensus bersama berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran.

Adanya persamaan tradisi yang dikedepankan dalam proses pencapaian kesepakatan dan penyelesaian masalah bersama melalui musyawarah. Maka pemerintah daerah Provinsi Lampung berinisiatif melakukan institusionalisasi budaya *rembug pekon* melalui Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2016 (sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya) sebagai mekanisme penyelesaian konflik baik pada tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun provinsi.

4. Transformasi Struktural

Perubahan struktural biasanya juga berhubungan dengan masa yang berkaitan dengan saat ini dan dinamika sejarah masa lampau antara kelompok-kelompok, dimana satu kelompok mendapatkan keistimewaan dan kelompok lain termarginalisasi. Perlu adanya upaya untuk mengangkat suara organisasi dan komunitas lokal; adanya keterbukaan, hubungan yang saling menghargai, dan komunikasi yang baik dengan pemerintah. Selain itu tidak ada lagi diskriminasi etnik, agama, dan ras secara struktural.

Beberapa upaya transformasi secara struktural yang dilakukan pemerintah antara lain, intitusionalisasi budaya *rembug pekon* sebagai mekanisme penyelesaian konflik (telah dijelaskan pada sub bab transformasi kultural), penguatan lembaga adat seperti MPAL (Majelis Penyimbang Adat Lampung), penguatan institusi keamanan TNI/POLRI melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa, serta penguatan institusi daerah seperti Kesbangpol, FKUB, FKDM, dan FOKMAL.

Pasca konflik Balinuraga, jejaring antar tokoh adat dalam penguatan struktur adat Lampung dan Bali semakin baik, serta didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Penguatan lembaga-lembaga adat ini berfungsi untuk menjadi saluran bagi kepentingan anggotanya. Jadi ada kekuatan yang sengaja dibina untuk menjadi ruang komunikasi diantara para elit lokal suku Bali dan Lampung, misalnya sering bersilaturahmi baik secara

verbal maupun langsung dengan elit-elit suku Bali, Jawa dan suku-suku lainnya yang ada di Lampung Selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi gejolak di bawah, diantara mereka kompak, masalah dapat diredam dan pemerintah daerah tertolong dengan itu.

Tetapi minusnya adalah hingga saat ini belum ada instrumen baku yang dibuat oleh Pemda, sebagai acuan untuk untuk meredam atau mengelola konflik laten. Kebetulan saja jejaring tokoh adat dan hubungan antara mereka kuat, hingga pemerintah bisa terbantu. Tetapi pola yang demikian belum tentu bisa diaplikasikan di masa mendatang, terlebih tidak ada pedoman yang jelas. Apabila Pemda memiliki pedoman pengelolaan konflik secara jelas, setidaknya berbagai institusi pemerintah, lembaga adat dan elemen masyarakat bisa saling mengacu pada pedoman tersebut. Sehingga ketika terjadi konflik atau ketegangan-ketegangan yang memicu kerusuhan, pedoman yang ada dapat digunakan dan dapat dievaluasi setiap saat.

Selain penguatan lembaga adat oleh pemerintah, usaha *ulun* Lampung dalam merekonstruksi budaya *pi'il pesenggiri*, tentu tidak terlepas dari peran pemerintah Provinsi Lampung yang mengangkat isu etnisitas melalui penyelenggaraan festival budaya setiap satu tahun sekali. Namun dibalik upaya-upaya pemerintah melakukan penguatan budaya Lampung, ada juga tujuan yang bersifat politis. Melalui tokoh-tokohnya yang duduk di kursi pemerintahan dan memegang jabatan penting, *ulun* Lampung berupaya melakukan lobi politik untuk meloloskan peraturan daerah yang dapat memperkuat dan mengangkat identitas Lampung kembali.

Contohnya, peraturan daerah tentang keharusan menggunakan simbol Lampung di setiap toko dan bangunan di Lampung, penggunaan bahasa Lampung pada hari tertentu di instansi pemerintah, memasukan bahasa dan sulam Lampung sebagai muatan lokal kurikulum sekolah, serta pemberian gelar-gelar sebagai bentuk strategi dan negosiasi politik. Upaya-upaya yang demikian merupakan strategi etnik Lampung untuk

mensejajarkan kembali posisi sosialnya dengan penduduk pendatang yang sudah mendominasi tanah leluhurnya.

Dari beberapa argumentasi yang mendekreditkan pihak pemerintah telah berlaku diskriminatif terhadap penduduk lokal asli Lampung, ternyata berdasarkan data tersebut di atas, banyak kebijakan pemerintah Provinsi Lampung yang justru pro terhadap penduduk lokal Lampung. Dengan demikian argumentasi tersebut terbantahkan dengan gambaran realita yang ada.

4.3.3 Evaluasi

Jika berpodaman pada Pasal 4 Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa ruang lingkup penanganan konflik meliputi, yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada upaya penanganan pasca konflik yang menurut Pasal 36 ayat 2 UU PKS bahwa pemulihan pasca konflik meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila berpijak pada pengertian pemulihan pasca konflik yang pertama, yaitu rekonsiliasi, maka boleh dibilang bahwa pemerintah daerah cukup optimal dalam melakukan tugasnya. Terlihat dari adanya beberapa pertemuan yang diinisiasi baik oleh pemerintah daerah, TNI/POLRI, kesbangpol, lembaga-lembaga adat, dan elemen masyarakat sendiri, serta menghasilkan suatu konsensus bersama melalui mekanisme adat dan jalur mediasi.

Sedangkan pada level rekonstruksi yang ditekankan di dalam UU PKS lebih kepada rekonstruksi jangka pendek dan bersifat fisik. Jika acuan yang digunakan UU PKS, maka pemerintah telah melakukannya dengan maksimal. Tetapi jika rekonstruksi yang dimaksud adalah transformasi konflik dalam konsep yang dikembangkan Lederach, yaitu bagaimana menciptakan kondisi yang rusak akibat konflik menjadi kondisi yang baik, dari destruktif menjadi konstruktif, rekonstruksi yang bukan hanya aspek fisik tetapi juga menjangkau aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, maka tahapan belum terjangkau secara optimal dan

maksimal. Sehingga belum nampak upaya yang sifatnya terstruktur dan terencana untuk melakukan rekonstruksi dalam artian yang lebih dalam.

Secara lebih spesifik, peneliti mendapati bahwa pemerintah daerah masih belum berhasil melakukan upaya transformasi struktural pasca konflik di Balinuraga yang meliputi tiga elemen, yaitu kondisi sosial, pola prosedural, dan pola institusional. Kondisi sosial misalnya, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung 2017 menunjukkan bahwa Provinsi Lampung mendapat raport merah dalam hal diskriminasi rasial dan etnik, yaitu masih kentalnya penggunaan kekerasan atau ancaman oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, dan kelompok hak-hak politik (33,33), serta penggunaan kekerasan atau ancaman oleh pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat (54,17); pola prosedural yaitu masih kecilnya angka kebebasan berpendapat (53,47) dan partisipasi politik (57,76); dan terakhir pola institusional yaitu belum optimalnya peran birokrasi pemerintah daerah (44,21).

Berdasarkan hasil analisis terhadap fakta dan data lapangan di atas, maka peneliti mengambil satu kesimpulan bahwa perdamaian yang tercipta di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan masih bersifat “semu” atau damai negatif. Meskipun pola hubungan kerjasama mulai berjalan dengan baik, ada pengakuan dan penghormatan terhadap hak kelompok lain, dan distribusi sumberdaya semakin merata, namun masih ada beberapa *Positive Peace Index* (PPI) yang belum tercapai. Misalnya, masih lemahnya sumber daya manusia ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung Selatan yang tergolong lebih rendah (66,95), dibandingkan dengan Bandar Lampung (75,98), Metro (75,87), Lampung Tengah (68,95), Pringsewu (68,61), Lampung Timur (6,05), dan Tulang Bawang (67,07) (BPS Provinsi Lampung, 2017). Kemudian, tingkat keterbukaan informasi, peran birokrasi pemerintah, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan masih rendah dibuktikan dengan indeks demokrasi Lampung yang masuk dalam urutan 26 dengan

poin 72,01 dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2017 (IDI Indonesia 2017, dalam BPS, Agustus 2018).

Apabila kondisi yang demikian tidak mendapat perhatian pemerintah, maka tidak mustahil akan muncul kekecewaan masyarakat akibat adanya rasa ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa, karena akar permasalahan berupa disparitas ekonomi, diskriminasi etnik dan rasial belum terselesaikan secara tuntas. Sehingga sewaktu-waktu ada pemicu, konflik serupa sangat mungkin untuk terulang kembali.

Dengan demikian, perbaikan harus dilakukan dalam berbagai aspek baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Perbaikan dan pembangunan menuju damai yang positif ini tentu memerlukan waktu yang panjang, dan menuntut peran aktif semua pemangku kepentingan serta andil masyarakat sebagai populasi mayoritas dalam kehidupan sosial.

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijabarkan, maka terdapat dua kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Berbagai dimensi kehidupan yang menjadi ruang konflikual dan berkontribusi terhadap pecahnya konflik sosial antaretnis Bali dan Lampung di Balinuraga, yakni faktor sosial budaya, migrasi penduduk, ekonomi, dan kontestasi politik. Jika diklasifikasikan berdasarkan faktornya, maka ada faktor struktural, akselerator dan *trigger* (pemicu) yang menyebabkan konflik laten menjadi konflik terbuka. *Pertama*, faktor struktural. Faktor struktural merupakan latar belakang yang menciptakan pra-kondisi konflik sosial. Faktor struktural biasanya berkaitan dengan disparitas akses dan kontrol sumber daya, kebijakan yang diskriminatif, kesewenangan dalam pengambilan keputusan serta adanya kesenjangan ekonomi yang inheren. Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor konflik, dan ditinjau dari aspek sosio historis provinsi Lampung, peneliti menemukan bahwa migrasi penduduk sebagai latar belakang yang menciptakan pra-kondisi konflik sosial di Provinsi Lampung terutama konflik di Bainuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Dampak kebijakan transmigrasi ke Provinsi Lampung, dikemudian hari menciptakan dominasi penduduk pendatang yang menguasai sumber strategis seperti ekonomi, lahan, dan dunia pendidikan. Terjadilah kesenjangan ekonomi antara pendatang dan pribumi. Selain itu, sistem transmigrasi yang dijalankan menciptakan struktur sosial berdasar enklaf-enklaf kedaerahan yang menyabab eksklusifitas kelompok semakin tajam. Kemudian, ini diperparah lagi dengan kebijakan pemerintah yang cenderung diskriminatif terhadap penduduk asli Lampung.

Pemerintah memberikan alokasi-alokasi tanah kepada para agrobisnis raksasa sehingga seluruh “*hinterland*”, daerah penyangga kediaman suku bangsa Lampung yang secara tradisional merupakan lahan tempat mereka mencari nafkah, praktis tidak ada yang tersisa. *Kedua*, faktor akselerator. Akselerator dalam analogi Ichsan Malik (2017) diibaratkan sebagai katalisator atau angin panan yang dapat menyebarkan konflik ke segala arah. Serangkaian konflik yang terjadi sebelumnya, dan belum terselesaikan secara tuntas menjadi katalisator yang menyebabkan intensitas konflik semakin membesar karena dendam yang sudah mengakar. Akibatnya, sentimen dan ego kelompok dikedepankan, solidaritas sosial internal (*ingroup*) menguat melebihi batas-batas wilayah komunitas inti konflik, dimana semua suku Lampung dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung ikut berkumpul dan membantu penyerangan terhadap warga Bali di Desa Balinuraga. Selain bentuk kekerasan antar kelompok, peningkatan bentuk agresivitas dan arogansi kelompok juga menjadi angin yang dapat memperluas konflik kekerasan semakin melebar. *Ketiga*, faktor pemicu. Pemicu biasanya berupa kejadian yang terjadi secara tiba-tiba mulai dari persoalan yang sederhana sampai pada persoalan mendasar dan kompleks, serta berada di luar konteks substansi permasalahan konflik yang sebenarnya. Jika dilihat berdasarkan dimensi aktornya, awal sebab munculnya konflik sosial dapat dimulai dari konflik antar individu, tindakan kriminal, maupun keributan antar pemuda. Pecahnya konflik kekerasan di Balinuraga Kecamatan Way Panji kabupaten Lampung Selatan sebenarnya hanya dipicu oleh permasalahan kenakalan remaja yang dilakukan oleh pemuda Balinuraga terhadap dua gadis suku Lampung.

2. Transformasi konflik merupakan proses perdamaian jangka panjang yang di dalamnya mencakup berbagai usaha untuk merekonstruksi hubungan baru, membangun *trust*, empati dan

kerjasama melalui rekonsiliasi dan penguatan ketahanan sosial baik pada level personal, relasional, struktural maupun kultural. Pasca terjadinya konflik sosial antaretnik Bali dan Lampung di Balinuraga terdapat banyak perubahan baik dalam pola hubungan personal, interpersonal, intrakomunal dan interkomunal, mulai ada penguatan budaya, revitalisasi identitas, dan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan keserasian sosial guna memperkokoh ketahanan sosial. Pada *level personal* mulai muncul kesadaran baik secara individual maupun komunal untuk melakukan perbaikan dalam internal kelompok masing-masing. Hubungan semakin cair, tidak lagi saling melirik saat berpapasan, orang tua ikut andil mengontrol anak-anak remajanya. Selanjutnya *transformasi relasional*, pada tahap ini kerjasama warga Bali dengan pihak Lampung sudah terjalin dengan baik kembali, terutama dalam pemenuhan kebutuhan janur yang menjadi bahan dasar peribadatan warga Bali sehari-hari. Selain itu, kerjasama dengan suku Lampung juga terjadi saat acara ngaben. Pada level komunal, hubungan dirajut kembali melalui sistem *anjang sana* yaitu saling bersilaturahmi antara tokoh adat Bali, Lampung dan suku lainnya, tokoh pemuda, tokoh agama, dan juga aparatur pemerintahan desa. Kemudian *transformasi kultural*, pemerintah menginstitutionalisasi budaya Lampung, yang disebut *rembug pekon*, sebagai mekanisme pencegahan potensi konflik di masyarakat. Selain mengangkat budaya *rembug pekon* sebagai mekanisme penyelesaian konflik, kesadaran secara komunal atau kelompok adat timbul untuk melakukan pembenah internal, yaitu melalui revitalisasi budaya, sebagai perbaikan citra diri dan menghilangkan stereotip negatif terhadap budaya masing-masing kelompok (suku Lampung dan Bali) yang memiliki nilai-nilai luhur. Meskipun kedua etnik, Lampung dan Bali, memiliki kultur yang berbeda tetapi ada nilai universal yang dapat ditarik dari kearifan

lokal masing-masing pihak. Masyarakat Lampung memiliki Piiil Pesenggiri, yaitu kehormatan dalam berpikir dan berperilaku, sementara masyarakat Bali memiliki konsep *Tri Hita Karana*, yaitu berupa harmonisasi hubungan antara Tuhan, manusia dan alam. Terakhir, transformasi struktural. Beberapa upaya transformasi secara struktural yang dilakukan pemerintah antara lain, intitusionalisasi budaya *rembug pekon* sebagai mekanisme penyelesaian konflik (telah dijelaskan pada sub bab transformasi kultural), penguatan lembaga adat seperti MPAL (Majelis Penimbang Adat Lampung), penguatan institusi keamanan TNI/POLRI melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa, serta penguatan institusi daerah seperti Kesbangpol, FKUB, FKDM, dan FOKMAL

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam upaya pengelolaan konflik, yaitu:

1. Melihat sistem kehidupan sosial yang terbangun di lingkungan suku Lampung dan suku Bali yang masih sama-sama memegang kuat tradisi adat, budaya dan agama mereka, maka penyelesaian konflik seharusnya lebih diutamakan dengan menggunakan kearifan lokal yang ada. Selain dipandang lebih dekat dengan lingkungan sosiokultural setempat dan menyentuh kalangan masyarakat bawah (*grassroot*), juga dapat mengangkat martabat dan penghargaan terhadap adat budaya Lampung. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan dukungan berupa penciptaan pranata adat dan sosial yang lahir dari nilai adat, budaya, pendidikan dan agama yang diakui dan dihormati masyarakat baik pendatang maupun pribumi, sesuai amanat UU No 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, sehingga jika terjadi

kembali konflik serupa, penanganan konflik dapat berjalan efektif dan optimal.

2. Gagalnya proses pembauran dan akulturasi budaya antara etnis Bali dan Lampung menciptakan eksklusifitas sebagai benih yang melatari terjadinya konflik Balinuraga pada 29 Oktober 2012. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat menciptakan program pembauran antar kelompok suku bangsa atau relokasi kampung Bali secara bertahap agar terjadi proses akulturasi dan komunikasi budaya antar kelompok etnis tidak buntu, sehingga struktur sosial yang berbentuk enklaf kesukuan dapat terurai. Dengan demikian sentimen dan ego antar suku bangsa dapat diminimalisir sehingga terwujud perdamaian yang berkelanjutan di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pecahnya konflik kekerasan di Balinuraga menjadi indikasi masih lemahnya pengelolaan konflik konstruktif di Provinsi Lampung. Pemerintah harus menciptakan berbagai kegiatan yang terencana, terprogram, terpadu dan terarah sebagai upaya mengelola konflik (yang meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan pascakonflik).
4. Dalam situasi dimana konflik telah bereskalasi menjadi kekerasan, hindari pendekatan keamanan dengan cara-cara represif baik langsung atau tidak langsung, dan simbolik.
5. Melihat sistem guyub dan kekerabatan yang sama-sama kuat baik suku Lampung atau suku Bali, pemerintah dirasa perlu melakukan penguatan jejaring tokoh adat dan lembaga adat agar dapat menjadi saluran komunikasi di antara komunitas adat lokal di Lampung. Penguatan juga mesti dibarengi dengan kerelaan memberikan porsi anggaran APBD, agar ada dan tidak ada konflik program-program penguatan adat tetap dapat berjalan. Hal ini menghindari vakumnya penguatan dan pengelolaan

lembaga adat, seperti mangkraknya kantor-kantor MPAL di Provinsi Lampung. Kondisi yang seperti ini ditakutkan dapat melemahkan sistem deteksi dan cegah dini di Provinsi Lampung.

6. Pemerintah harus memiliki instrumen yang memadai tentang pengelolaan keserasian sosial yang menjadi acuan utama dalam mengelola konflik, terutama dalam mengontrol dinamika hubungan antar kelompok sosial. Konflik Balinuraga terjadi salah satunya adalah karena masih rendahnya derajat kepekaan dan tingkat koordinasi antar multi pemangku kepentingan dalam mengantisipasi konflik-konflik potensial yang sering tak terduga begitu cepat bereskalasi menjadi konflik terbuka.
7. Peningkatan kualitas sumberdaya berbasis pengetahuan lokal agar memiliki kemampuan memahami kondisi sosiokultural yang ada. Sehingga mampu mengantisipasi dan merespon secara dini potensi konflik laten, yang dapat berkembang menjadi konflik terbuka dikemudian hari.
8. Pemerintah harus melakukan pemetaan sosial-budaya dan potensi kerawanan sosial secara berkelanjutan agar konflik kekerasan yang mengatasnamakan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) tidak terulang lagi.
9. Penguatan sistem koordinasi antarinstansi dengan asosiasi di tingkat desa yang berfungsi sebagai perantara untuk mendekatkan hubungan dengan masyarakat bawah.
10. Rekonstruksi harus dilakukan secara holistik tidak hanya terbatas pada aspek fisik tetapi juga harus menjangkau aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, penegakkan hukum dan budaya.
11. Rekonstruksi (transformasi konflik) menuntut peran aktif dari multipemangku kepentingan yang meliputi pemerintah daerah, TNI/POLRI, kesbangpol, tokoh adat, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga adat, FKUB, FKDM dan masyarakat bawah.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abu Ahmadi. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyik, Buchori & Trisnaningsih. 2015. *Provinsi Lampung dari Daerah Penerima menjadi Potensi Daerah Pengirim Transmigran*. Yogyakarta: Histokultura.
- Badri, Jusuf. 2002. *Raden Intan: Jatidiri Kepahlawanan Orang Lampung*. Jakarta: Pustaka Ilmu Abadi.
- Bahri, Syamsul, Seksi IPDS BPS Kabupaten Lampung Selatan. 2018. *Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2018*. Lampung Selatan: BPS Kabupaten Lampung Selatan.
- Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Lampung. 2018. *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2018*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Budiman, Budisantoso, *et al.* 2012. *Jurnalisme Damai di Lampung*, Bandar Lampung: Aji Bandar Lampung.
- Celia Cook-Huffman. 2011. *The role of identity in conflict*, lihat *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*, Edited by Dennis J. D. Sandole *et al.* New York: Routledge.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David Stuart-Fox. 2002. *Pura Besakih: Temple, Religion, and Society in Bali*. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal, Land-en Volkenkunde.
- Fisher, Simon, *et al.* 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*, diterjemahkan oleh *The British Council Indonesia*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putra.

- Furchan, A. 2004. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gundykunst, William B., and Kim, Young Yun. 2003. *Communicating with Strangers – 4th Edition*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Hartoyo. 2012. *Memutus Mata Rantai Konflik di Bumi Lampung: Merajut Jurnalisme Damai di Lampung*. Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung.
- Hartoyo. 2012. *Memutus Mata Rantai Konflik di Lampung*, dalam buku *Merajut Jurnalisme Damai di Lampung*. Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung.
- Jeong, Ho-Won. 2010. *Conflict Management and Resolution: an Introduction*, (New York: Routledge.
- John Paul Lederach, et al. 2007. *Reflective Peacebuilding: A Planning, Monitoring, and Learning Toolkit*. Notre Dame: The Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.
- John Paul Lederach, et al. 2007. *Reflective Peacebuilding: A Planning, Monitoring, and Learning Toolkit*. Notre Dame: The Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.
- Lederach, J. P. 2003. *The Little Book of Conflict Transformation*. STL: Distribution North America.
- Makhya, Syarief. 2012. *Kerusuhan Antaretnis dan Problem Integrasi di Lampung*, dalam *Merajut Jurnalisme Damai di Lampung*. Bandar Lampung: AJI Bandar Lampung.
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse. 2002. *Resolusi Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, Edisi terjemah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Migdad, Muhammad ,et al. 2012. *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*, CEWERS. Jakarta: Peace Through Development-BAPPENAS.
- Miles,M.B, Huberman ,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., Miall, H. 2011. *Contemporary Conflict Resolution*. UK: Polity Press.
- Risma Margaretha Sinaga. 2017. *Revitalisasi Budaya: Strategi Identitas Etnik Lampung*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Sarwono, S.W. 2001. *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok, dan Psikologi Terapan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sarwono, S.W. 2007. *Psikologi Prasangka Orang Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sen, Amrtya. 2007. *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas* (penerjemah: Arif Susanto). Serpong: Marjin Kiri.
- Sudrajat, Djadjat. 2012. *Catatan Penutup: Lampung, Merajut Jurnalisme Damai di Lampung*. Bandar Lampung: Aji Bandar Lampung.
- Susanto, Budi, S.J. (editor). 2008. *Penyam(b)un(g) Suara Lidah Rakyat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tajfel, H. 1982. *Social Identity and Intergroup Relation*. New York: Cambridge University Press.
- Taylor, SJ dan R Bogdan. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*, Second Edition. Toronto: John Wiley and Sons.
- Turner, H. 1981. *Social Stereotypes and Social Groups*, dalam J.C. Turner and H. Giles (eds.) *Inergroup Behaviour*. Oxford: Basil Blackwell.
- Webel, Charles & Galtung, Johan. 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York, Routledge.

Jurnal:

- Ariestha, Bethra. 2012. "Akar Konflik Kerusuhan Antar Etnik di Lampung Selatan", *Journal of Sociological and Industrial Psychology*, Vol. 1 (2).
- Denny J.A. 2014. "Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi". Jakarta: Inspira.co.
- Dudija, Nidya. 2015. "Cooperative vs Competitive: Filosofi Keseimbangan "Yin-Yang" dalam Hubungan Interdependency", *Buletin Psikologi*, Vol. 23 (2).
- Eva Nila Sari. 2015. "Komnas HAM Dorong Penyelesaian Konflik Horizontal Lampung", *Wacana HAM* Edisi IV/Tahun XIII/2015.
- Galtung, Johan. 1971. "A Structural Theory of Imperialisme. *Journal of Peace Research*." Vol 8 No 2; dari <http://www.jstor.org/stable/423477> diakses pada 5 Agustus 2018.
- Hendrastin, Refia Juniarti & Budi Purwoko. 2014. "Studi of Psychological Dynamics Interpersonal Conflict Reference from Galtung ABC Triangle Conflict and resolution Conflict Methode by The Department of Multimedia Class XII SMK Mahardhika Surabaya." *Jurnal BK UNESA*, Vol. 4 (02).
- Kajian Perdamaian dan Kebijakan. 2014. "Peta Kekerasan Indonesia (September-Desember 2013) dan Konflik Antarkelompok di Indonesia", *The Habibie Center*, Edisi 06 Maret.
- Khubban, Abdan. 2014. "Judicial Review Spread Hatred of Race: Case Study Riot Balinuraga-South Lampung", *International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER)*, Vol. 2 (4).
- Kusumowardhani, Retno Pandan Arum, *et al.* 2013. "Identitas Sosial, Fundamentalisme, dan Prasangka terhadap Pemeluk Agama yang Berbeda: Perspektif Psikologis," *Harmoni Jurnal Multikulturalan & Multireligius*, Vol. 12 (1).
- Kuszewska, Agnieszka. *India-Pakistan Conflict Escalation and De-Escalation: The Dynamics of Contemporary Security Challenges*.

Institute of Social Sciences, University of Social Sciences and Humanities, Warsaw. Diakses dari https://www.academia.edu/34965849/IndiaPakistan_Conflict_Escalation_and_De-Escalation_the_Dynamics_of_Contemporary_Security_Challenges; pada 7 Agustus 2018.

Mitchell, C. 2002. "Beyond Resolution: What does Conflict Transformation actually Transform?," *Peace and Conflict Studies*, Vol. 9 (1).

Paffenholz, Thania. 2009. "Understanding Peacebuilding Theory: Management, resolution and transformation", *New Routes A Journal of Peace Research and Action*, Vol. 14 (2).

Setiawan, Wahyu. 2015. "Pasraman sebagai Media Pembentuk identitas Pasca Konflik", *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 4 (1).

Sujdmiko, Bayu dan Intan Fitri Meutia. 2015. "Balinese Vs Lampungese: Measuring ADR Applicability to Resolve Ethnic Conflict in Indonesia", *12 US-China L. Rev.* 91.

Zainal, Suadi. 2016. "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, Vol. 21 (1).

Zulfa, Eva Achjani. 2014. "Bali Nuraga-Lampung: Identity Conflict Behind the Policy", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 11.

Tesis:

Meutia, Intan Fitri. 2016. "The Implementation of Community Policing in Indonesia", *Thesis Doktorat*. Jepang: Kanazawa University, Graduate School of Human and Socio-Environmental Studies.

Laporan:

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung. 2009. Buku Data Ketransmigrasian.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2012.

Laporan Khusus Nomor:R/Lapsus/XI/2012 Bidang Hankam, Perihal: Terjadinya bentrok antar warga yang mengakibatkan korban jiwa antara warga Desa Agom Kec. Kalianda dengan warga Desa Balinuraga Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan.

Laporan Penelitian LPM Unkris, dalam <http://eprints.ipdn.ac.id/9/2/ISI.pdf>, diakses pada 20 Juli 2018.

Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I. tahun 2015.

Website:

Jumlah Penduduk Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin 2014; dari <https://lampung.bps.go.id/dynamictable/2017/04/11/391/jumlah-penduduk-provinsi-lampung-menurut-kabupaten-kota-jenis-kelamin-dan-rasio-jenis-kelamin-2014.html>; diakses pada 4 Agustus 2018.

Noter, J., dan Diamond, L., "Occasional Paper: Building Peace and Transforming Conflict: Multy Track Diplomacy," dalam *Practice, Institute for Muty Track Diplomacy*, Washington, DC. Dari <http://www.imtd.org/publications/occasional-papers/>; diakses pada 7 Agustus 2018.

Rahardjo, Mudjia. 2017. "Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya", *UIN Maulana Malik Ibrahim*, Malang; dari <file:///D:/Bismillah%20Thesis%20S2/metlit.pdf>; diakses pada 8 Agustus 2018.

Yayasan Denny JA dan LSI Community, "Dicari Capres 2014 yang Melindungi Keberagaman", Materi Konferensi Pers, 23 Desember 2012.

Wawancara:

Wawancara dengan Brigpol Denni selaku Bhabinkamtibmas Kecamatan Way Panji Lampung Selatan di Kantor Kecamatan Way Panji Lampung Selatan pada tanggal 2 Oktober 2018.

Wawancara dengan Dr. Hartoyo seorang Sosiolog Universitas Lampung di Gedung Rektorat Universitas Lampung Lt. 3 pada tanggal 25 September 2018.

Wawancara dengan Dr. KH. Ahmad Rafiq Udin selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lampung Selatan di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin, Blambangan Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan pada 5 Oktober 2018.

Wawancara dengan Dr. Nina Yuda selaku Kepala Pusat Studi Kebudayaan Lampung Universitas Lampung pada tanggal 24 September 2018 di Gedung Rektorat Universitas Lampung Lantai 3.

Wawancara dengan Erdiasyah selaku Camat Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan di Kantor Kecamatan Kalinada, pada 4 Oktober 2018.

Wawancara dengan Fajar Isnawan selaku Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesabngpol Provinsi Lampung di Kantor Kesbangpol Provinsi Lampung pada tanggal 27 September 2018.

Wawancara dengan Isro Abdi selaku Camat Kecamatan Way Panji Lampung Selatan di Kantor Kecamatan Way Panji Lampung Selatan pada tanggal 2 Oktober 2018.

Wawancara dengan Kasi Intel Letkol Inf. Edi Yanto di Markas Korem 043/Gatam pada 24 September 2018.

Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Agom Kecamatan Kalianda di Kantor Desa Agom pada tanggal 5 Oktober 2018.

Wawancara dengan Kepala Desa Balinuraga, Made Santre, di Kantor Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, pukul 09.00-10.11 tanggal 5 Oktober 2018.

Wawancara dengan Kepala Staf Kodim 0421 Mayor Inf. Agus Waluyo di Markas Kodim 0421 Lampung Selatan 2 Oktober 2018.

Wawancara dengan Tri Mujiyanto S.IP selaku Kabid Penanganan Konflik Kesabngpol Lampung Selatan di Kantor Kesbangpol Lampung Selatan pada tanggal 2 Oktober 2018.

LAMPIRAN 1

**SURAT KETERANGAN
PENELITIAN**

Lampiran 2
Pedoman Wawancara

Teori				
No	Teori	Variabel	Indikator	Pertanyaan Penelitian
1	Konflik 1. Kesbangpol 2. FKUB 3. TNI/Polri 4. Camat 5. Kades 6. Akademisi	Konflik Struktural	<ul style="list-style-type: none"> • Disparitas akses dan kontrol sumber daya • Kebijakan yang diskriminatif • Kesewenangan dalam pengambilan keputusan 	1. Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat di Balinuraga dibandingkan desa Agom dan desa lainnya di Lampung Selatan? 2. Apakah di Lampung Selatan terjadi ketimpangan terhadap akses dan kontrol terhadap sumber daya (tanah, tambang, hutan)? 3. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur pengelolaan sumber daya yang ada di Lampung Selatan? 4. Apakah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan akses terhadap sumber daya menguntungkan semua pihak?
		Konflik Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemuasan kebutuhan • Mengorbankan orang lain 	1. Bagaimana anda mendefinisikan kepentingan kelompok anda? 2. Kepentingan apa yang harus dipertahankan dan tidak lagi bisa ditawarkan menurut anda (akses terhadap kebutuhan dasar, tata cara dalam menangani masalah, atau masalah psikologi, misal, rasa percaya, keadilan, rasa hormat)? 3. Adakah pihak yang dikorbankan atau dirugikan dalam pencapaian kepentingan anda atau kelompok lain? 4. Apakah kepentingan kelompok lain mengancam kepentingan kelompok anda?
		Konflik Hubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Stereotip 	1. Bagaimana cara anda membangun

			<ul style="list-style-type: none"> • Prejudice • Diskriminasi 	<p>komunikasi, ineterkasi dan kerjasama dengan kelompok lain (Bali/Lampung)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana cara pandang anda terhadap kelompok lain (Bali/Lampung) di luar kelompok (Bali/Lampung) anda? 3. Apakah anda pernah memperlakukan orang di luar kelompok anda secara diskriminatif? Jika iya, kenapa? 4. Menurut anda, apakah perilaku seseorang bersifat statis atau dinamis?
		Konflik Nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan nilai, adat, ideologis • Perbedaan implementasi agama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana anda menilai tentang perbedaan? Keniscayaan atau bukan? 2. Adakah nilai, budaya atau adat kelompok lain yang bersebrangan dengan nilai dan budaya kelompok anda? 3. Bagaimana anda mengatasi dan menyikapi perbedaan nilai dan budaya yang ada?
		Konflik Data	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang informasi • Perbedaan interpretasi • Pemalsuan sejarah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda biasa mengecek kembali informasi yang datang pada situasi konfliktual? 2. Bagaimana cara anda mengklarifikasi suatu informasi yang datang pada situasi konfliktual? 3. Apakah anda cenderung bersikap reaktif tanpa klarifikasi terhadap informasi yang datang pada situasi konfliktual dan langsung merepost ulang informasi tersebut? 4. Pernahkan anda menyebarkan informasi palsu demi mencapai kepentingan kelompok atau pribadi?
2	Transformasi Konflik	Transformasi Personal	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan sikap • Perubahan perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap/perilaku seperti apa yang dapat memunculkan konflik kekerasan saat ini?

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesbangpol 2. FKUB 3. TNI/Polri 4. Camat 5. Kades 6. Akademisi 			<ol style="list-style-type: none"> 2. Sikap/perilaku seperti apa yang diinginkan untuk menciptakan perubahan saat ini, baik dalam bentuk tindakan atau program tertentu? 3. Jika sikap/perilaku ini berubah, apa perbedaan yang akan terjadi dalam situasi saat ini? 4. Bagaimana anda mengetahui bahwa sikap/perilaku tersebut telah mengalami perubahan? 5. Bagaimana anda mengetahui perubahan sikap/perilaku dapat mengubah situasi ini?
		Transformasi Relasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pola komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada level mana hubungan antara kedua belah pihak (biasa, terbuka atau saling membatasi/menghindari)? 2. Apakah warga memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri secara objektif dalam percakapan tanpa rasa takut, penghakiman (prasangka), atau pembatasan? 3. Apakah warga mau mendengar kegelisahan kelompok lain tanpa mengadili secara sepihak?
			<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tingkat apa kerjasama kedua belah pihak, misalnya dalam mengerjakan suatu proyek atau mencapai tujuan yang penting bagi kedua belah pihak, dan membutuhkan kerja sama dari keduanya untuk keberhasilan bersama (sedikit atau tidak ada yang kuat dan aktif)?
			<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan keputusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda merasa cukup terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup dan komunitas anda? 2. Apakah informasi bersifat terbuka, dapat

				diakses dan adil? 3. Apakah proses pengambilan keputusan jelas dan adil?
			<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme penanganan konflik 	<ol style="list-style-type: none"> Ketika muncul konflik, adakah mekanisme yang efektif dan tepat untuk menyelesaikannya? Pola seperti yang akan muncul saat konflik bereskalasi (misal, apakah konflik akan bergerak cepat dari insiden kecil menjadi polarisasi yang semakin tajam)? Siapa orang-orang kunci yang memegang peran sebagai juru damai saat terjadi konflik, dan apakah mereka cukup siap?
		Transformasi Struktural	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi sosial (Kata kunci: disparitas, ketidaksetaraan, diskriminasi rasial, agama, dan etnik) 	<ol style="list-style-type: none"> Kondisi seperti apa yang menyebabkan munculnya perbedaan atas akses terhadap sumberdaya dan kekuasaan? Adakah pola pamarjinalan dan eksklusifitas yang secara konsisten terhadap suatu kelompok, dan memberikan keistimewaan serta keuntungan kelompok tertentu dan kerugian di pihak lain? Adakah catatan sejarah terkait tindakan rasisme, sektarianisme atau marjinalisasi etnik?
			<ul style="list-style-type: none"> Pola prosedural (Kata kunci: kurangnya transparansi, kesetaraan, akses, partisipasi, keadilan) 	<ol style="list-style-type: none"> Apakah setiap orang memiliki akses yang sama atas informasi dan proses pembuatan keputusan? Adakah kelompok-kelompok yang sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi yang mempengaruhi komunitas mereka? Apakah proses publik (seperti urusan politik,

			<p>ekonomi, sosial) sama-sama dipahami oleh semua pihak, dengan kejelasan tujuan, proses, dan partisipasi yang memadai?</p> <p>4. Apakah semua pihak memiliki hak berpendapat yang sama, dan bagaimana hal tersebut dilaksanakan?</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Pola institusional (Kata kunci: kurangnya akses, pola sejarah) 	<p>1. Apakah pola yang diidentifikasi di atas tercermin dalam fungsi dan pemeliharaan organisasi sosial, politik, dan ekonomi, terutama yang dibentuk untuk melayani publik secara luas?</p> <p>2. Adakah kepercayaan terhadap lembaga layanan primer oleh kelompok yang mereka layani? Jika tidak, mengapa?</p>
	Transformasi Kultural	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan pola dan sumber daya kultural 	<p>1. Identifikasi pola budaya yang memiliki dampak, baik positif atau negatif, tentang bagaimana konflik dipahami, didekati, dan ditangani?</p> <p>2. Aspek apa dari konflik antarkelompok yang dapat dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan cara pandang?</p> <p>3. Aspek apa dari budaya mereka yang berkontribusi positif dalam penanganan konflik dan pola mana yang justru memperburuk konflik?</p> <p>4. Identifikasi pola budaya yang telah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perpindahan atau migrasi, pertumbuhan penduduk, dinamika konflik, dan / atau "modernisasi," dengan perhatian khusus pada aspek mana budaya tradisional yang dipaksakan oleh elemen-elemen ini?</p>

3	Identitas Sosial 1. Kesbangpol 2. FKUB 3. TNI/Polri 4. Camat 5. Kades 6. Akademisi	Identifikasi Kategorisasi Komparasi	<ul style="list-style-type: none"> • Demografik 	1. Berapa umur anda? 2. Apa jenis kelamin anda? 3. Apa komunitas asal anda? 4. Apakah anda mengidentifikasi diri anda sebagai orang Bali yang tinggal di Lampung, orang Lampung keturunan Bali, orang Lampung, atau orang Indonesia yang tinggal di Lampung?
			<ul style="list-style-type: none"> • Komponen Kognitif (kesadaran tentang keanggotaan dirinya dalam suatu kelompok) 	1. Bagaimana anda mendefinisikan kelompok anda? 2. Bagaimana anda mengetahui bahwa anda adalah bagian dari kelompok anda? 3. Sejak kapan anda memutuskan untuk menjadi bagian dari kelompok anda? 4. Adakah kegiatan atau aktivitas khusus yang identik dengan kelompok anda? Contoh?
			<ul style="list-style-type: none"> • Komponen Evaluatif (Evaluasi seseorang di dalam kelompok dan keanggotaan seseorang di dalamnya) 	1. Apa hal positif dan negatif menjadi anggota dari kelompok anda? 2. Apa hal positif dan negatif tentang kelompok anda? 3. Apakah anda merasa diri anda sama/memiliki kesamaan dengan anggota kelompok anda yang lainnya? kenapa/kenapa tidak, contoh? 4. Apakah anda ikut terlibat dalam kegiatan atau aktivitas yang mencerminkan identitas anda sebagai anggota kelompok? Kenapa/kenapa tidak?
			<ul style="list-style-type: none"> • Komponen Emosional (perasaan memiliki atau tidak atas kelompoknya) 	1. Apa arti kelompok (Bali/Lampung) bagi anda? 2. Apakah anda merasa menjadi bagian atau cocok dengan kelompok anda? Kenapa/kenapa tidak? Contoh? 3. Adakah suatu kondisi dimana pada kondisi ini

				anda mengidentifikasi diri anda sebagai kelompok ini, dan pada kondisi lain tidak?
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ingroup favoritism</i> • <i>Favourable bias</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana anda memandang orang lain yang berbeda dengan kelompok anda? 2. Bagaimana anda memperlakukan kelompok lain yang berbeda dengan kelompok anda?
4	Kerjasama <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesbangpol 2. FKUB 3. TNI/Polri 4. Camat 5. Kades 6. Akademisi 	Kepentingan bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran adanya kepentingan bersama yang lebih besar • Motivasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dan seberapa besar kesadaran anda akan kepentingan orang lain? 2. Adakah kepentingan yang lebih besar melebihi kepentingan kelompok? 3. Maukah anda bekerjasama untuk mencapai kepentingan tersebut?
Konsep				
No	Konsep	Variabel	Indikator	Pertanyaan Penelitian
1	SAT <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesbangpol 2. FKUB 3. TNI/Polri 4. Camat 5. Kades 6. Akademisi 	Struktural	<ul style="list-style-type: none"> • Disparitas akses dan kontrol sumber daya • Kebijakan yang diskriminatif • Kesewenangan dalam pengambilan keputusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat di Balinuraga dibandingkan desa Agom dan desa lainnya di Lampung Selatan? 2. Apakah di Lampung Selatan terjadi ketimpangan terhadap akses dan kontrol terhadap sumber daya (tanah, tambang, hutan)? 3. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatur pengelolaan sumber daya yang ada di Lampung Selatan? 4. Apakah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dan akses terhadap sumber daya menguntungkan semua pihak?
		Akselerator	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebarkan konflik ke segala arah (Konflik bersenjata/kekerasan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pernah terjadi kekerasan antar kelompok yang memperbesar intensitas konflik?

			<p>antar kelompok, Peningkatan dukungan eksternal terhadap salah satu kelompok, kohesi kelompok <i>vis a vis</i> kelompok lainnya dan meningkatnya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap “integritas hidup” manusia)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana anda mengetahui bahwa tindak kekerasan tersebut memperbesar intensitas konflik? 3. Adakah dukungan eksternal terhadap salah satu kelompok yang memperbesar intensitas konflik? 4. Bagaimana anda mengetahui bahwa dukungan kelompok luar tersebut memperbesar intensitas konflik? 5. Adakah bentuk-bentuk pelanggaran terhadap “integritas hidup” manusia yang memperbesar intensitas konflik? 6. Bagaimana anda mengetahui bahwa bentuk-bentuk pelanggaran terhadap “integritas hidup” manusia tersebut memperbesar intensitas konflik?
		<i>Trigger</i> (pemicu)	<ul style="list-style-type: none"> • kejadian tiba-tiba yang memicu pecahnya konflik (pembunuhan tokoh penting, kecurangan dalam pemilihan umum, dan skandal politik) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah peristiwa yang muncul tiba-tiba yang memicu pecahnya konflik kekerasan pada 27-29 Oktober 2012 di Balinuraga? 2. Adakah perlakuan melukai atau menghilangkan nyawa oleh kelompok lain yang memperbesar konflik pada 27-29 Oktober 2012 di Balinuraga?
2	<p>Segitiga ABC Konflik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesbangpol 2. FKUB 3. TNI/Polri 4. Camat 5. Kades 6. Akademisi 	<i>Attitude</i> (sikap/kultural)	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek kognitif meliputi kesalahpahaman, stereotip negatif, dan perasaan seperti kemarahan, kebencian, kecurigaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perasaan dan emosi negatif apa yang berkembang di antara pihak-pihak dalam konflik yang anda hadapi? 2. Bagaimana perasaan ini dipertahankan dan berkelanjutan dan melalui proses apa? 3. Apakah program dan kebijakan tertentu menciptakan sikap negatif di antara para pihak atau penerima manfaat?
		<i>Contradiction</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ketidakcocokan tujuan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontradiksi apa yang mendahului konflik yang

		(struktural/akar konflik)	Kelangkaan sumber daya, Persaingan, Migrasi, Perubahan (sosial, politik, ekonomi, globalisasi, iklim)	<p>anda hadapi?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana kontradiksi tersebut terbentuk dalam struktur masyarakat? 3. Apa masalah kontroversial yang muncul dari adanya ketidaksesuaian tujuan dan kepentingan? 4. Bagaimana program pembangunan menciptakan ketidakcocokan tujuan dan kepentingan dalam masyarakat?
		<i>Behaviour</i> (perilaku/konflik terbuka)	<ul style="list-style-type: none"> • Polarisasi tindakan aktual, terkadang dalam bentuk destruktif antar pihak di dalam konflik (pembakaran, pembunuhan, intimidasi, penembakan, dan perang) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku konflik seperti apa yang muncul dalam situasi konflik yang Anda hadapi? 2. Strategi dan taktik apa yang digunakan? 3. Senjata apa yang digunakan dalam konflik? 4. Perilaku konflik apa yang muncul karena program pembangunan dan bantuan tertentu dalam suatu komunitas?
3	Eskalasi Deeskalasi Konflik	Eskalasi	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan, kontradiksi, polarisasi, kekerasan, perang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konflik bereskalasi? 2. Faktor apa yang menyebabkan eskalasi konflik?
		Deeskalasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mediasi, negosiasi, perjanjian damai, dan normalisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan apa yang digunakan untuk mendeeskalasi konflik? 2. Bagaimana anda tahu intensitas konflik menurun? 3. Melalui cara apa hubungan kembali dibangun antar pihak yang berkonflik?
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesbangpol 2. FKUB 3. TNI/Polri 4. Camat 5. Kades 6. Akademisi 			

LAMPIRAN 3
INFORMAN PENELITIAN



**Peneliti bersama dengan Kasi Intel Letkol Inf. Edi Yanto di Markas
Korem 043/Gatam pada 24 September 2018**



**Peneliti bersama dengan Fajar Isnawan selaku Kabid Bina Ideologi
dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Lampung**



**Peneliti bersama dengan Tri Mujiyanto S.IP selaku Kabid
Penanganan Konflik Kesabngpol Lampung Selatan**



**Peneliti bersama dengan Dr. KH. Ahmad Rafiq Udin selaku Ketua
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kabupaten Lampung Selatan**



Peneliti bersama dengan Isro Abdi selaku Camat Kecamatan Way Panji dan Brigpol Denni selaku Bhabinkamtibmas



Peneliti bersama dengan Erdiasyah selaku Camat Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan



Peneliti bersama dengan Kepala Desa Balinuraga, Made Santre, di Kantor Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji



Peneliti bersama dengan Kasi Pemerintah Desa Agom Kecamatan Kalianda di Kantor Desa Agom



Peneliti bersama dengan Dr. Hartoyo seorang Sosiolog Universitas Lampung di Lt. 3 Gedung Rektorat Universitas Lampung

LAMPIRAN 4

**DOKUMEN TERKAIT
PENELITIAN**

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Akbar Kurniadi. Lahir di Lampung pada 12 Maret 1994. Anak kedua dari pasangan Bapak Sukur Edy dan Ibu Sri Sugiani. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada SDN 1 Puji Rahayu Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan (lulus tahun 2005), kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) Banjarsari Lampung Selatan lulus pada tahun 2008, dan menamatkan studi di MAN 1 Model Bandar Lampung tahun 2011. Selanjutnya peneliti memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016. Peneliti juga menyelesaikan pendidikan sarjana Hadis dan Ilmu Hadis pada Darussunnah International Institute for Hadith Sciences dengan gelar Lc (Licence) tahun 2015 di bawah asuhan langsung Alm. Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Ya'qub. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan studi strata S2 (Magister) pada Prodi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.